

Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Dividend Payout Ratio*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur
Yang Terdaftar Di Bei 2015 - 2017)
Maria Jeannifer Lie, Maria Stefani Osesoga

Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Solvabilitas Dan Kualitas Audit
Terhadap Profitabilitas Perusahaan Serta Implikasinya
Terhadap Kualitas Laba
Pardomuan Ritonga

Pengaruh *Free Cash Flow*, Pertumbuhan Perusahaan,
Return On Assets*, *Cash Ratio*, *Debt To Equity Ratio
Dan *Firm Size* Terhadap Kebijakan Dividen
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2017)
Elisa Tjhoa

Mampukah Badan Usaha Milik Desa Menerapkan
Keadilan Prosedural?
Marryella Violetha Patiran, Intiyas Utami

Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, Ukuran Dan
Kompleksitas Perusahaan Terhadap *Audit Report Lag*
Elfina Astrella Sambuaga, Olivia Putri Santoso

Earning Persistence On Firm Tax Differences And Family Ownership
Synthia Madyakusumawati, Hyashinta Dyah P

Transaksi Afiliasi Dan *Capital Intensity* Mempengaruhi Emiten
Dalam Menghindari Pajak
Memed Sueb

JURNAL ILMU AKUNTANSI**ULTIMA Accounting****ISSN 2085-4595****Volume 12, Nomor 1, Juni 2020**

Jurnal Ilmu Akuntansi ULTIMA Accounting adalah Jurnal Ilmu Akuntansi yang diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Multimedia Nusantara mulai bulan Desember 2009. Terbit secara berkala dua kali dalam setahun yaitu setiap bulan Juni dan Desember. Jurnal Ilmu Akuntansi ULTIMA Accounting diharapkan menjadi wadah publikasi hasil riset akuntansi dengan kualitas yang dalam, bermutu, dan berbobot. Tujuan penerbitan Jurnal Ilmu Akuntansi ULTIMA Accounting adalah untuk mempublikasikan hasil riset, telaah ilmiah, analisis dan pemikiran akuntansi, keuangan, dan perpajakan yang relevan dengan pengembangan profesi dan praktik akuntansi di Indonesia. Jurnal Ilmu Akuntansi ULTIMA Accounting ditujukan bagi para akademisi, praktisi, regulator, peneliti, mahasiswa, dan pihak lainnya yang tertarik dengan pengembangan profesi dan praktik akuntansi di Indonesia.

Pelindung:

Dr. Ninok Leksono (Rektor Universitas Multimedia Nusantara)

Penanggung Jawab:

Dr. Y. Budi Susanto, M.M., CFP (Dekan Fakultas Bisnis)

Pengarah:

Friska Natalia, S.Kom., M.T., Ph.D (Wakil Rektor I)

Andrey Andoko, M.Sc (Wakil Rektor II)

Ika Yanuarti, S.E., M.S.F (Wakil Rektor III)

Prof. Dr. Muliawati G. Susanto, M.Eng.Sc (Wakil Rektor IV)

Pemimpin Umum:

Ir. Ito Wasito, M.Sc., Ph.D (Head of Research and Innovation Center)

Editor in Chief:

Elissa Dwi Lestari, S.Sos., M.S.M

Dewan Redaksi:

Dr. Y. Budi Susanto, M.M., CFP

Stefanus Ariyanto, S.E., M.Ak., CPSAK., AK., CA

Dr. Florentina Kurniasari, S.Sos., M.B.M

Tata Letak:

Hendrik Wijaya

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Intiyas Utami, SE, M.Si., AK., CA., CMA., QIA, CFrA (Universitas Kristen Satya Wacana)

Dr. Florentina Kurniasari, S.Sos., M.B.M (Universitas Multimedia Nusantara)

Dr. MEIRYANI., SE., Ak., MM., M.Ak., CA (Universitas Bina Nusantara)

Dr. Mulyono, SE., MM., RFA. (Universitas Bina Nusantara)

Mohamad Heykal, SE, M.Si . (Universitas Bina Nusantara)

Toto Rusmanto, MComm, Ph.D . (Universitas Bina Nusantara)

Dr. Ernie Hendrawaty, SE, M.Si (Universitas Lampung)

Stefanus Ariyanto, S.E., M.Ak., CPSAK., AK., CA (Universitas Multimedia Nusantara)

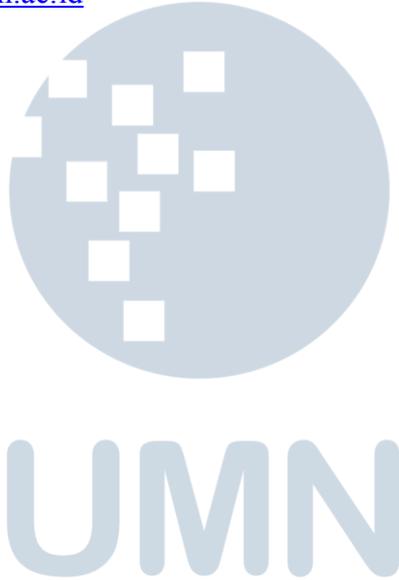
Alamat Redaksi:

Universitas Multimedia Nusantara

Scientia Garden, Jl. Boulevard Gading Serpong, Tangerang

Telp. (+6221) 5422 0808 | Fax. (+6221) 5422 0800

Email. ultimaaccounting@umn.ac.id



JURNAL ILMU AKUNTANSI

ULTIMA Accounting**DAFTAR ISI**

ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI <i>DIVIDEND PAYOUT RATIO</i> (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI 2015-2017) Maria Jeannifer Lie, Maria Stefani Osesoga	01-20
PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO SOLVABILITAS DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS LABA Pardomuan Ritonga	21-43
PENGARUH <i>FREE CASH FLOW</i> , PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, <i>RETURN ON ASSETS</i> , <i>CASH RATIO</i> , <i>DEBT TO EQUITY RATIO</i> DAN <i>FIRM SIZE</i> TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015 – 2017) Elisa Tjhoa	44-67
MAMPUKAH BADAN USAHA MILIK DESA MENERAPKAN KEADILAN PROSEDURAL? Marryella Violetha Patiran, Intiyas Utami	68-85
PENGARUH <i>CORPORATE GOVERNANCE</i> , PROFITABILITAS, UKURAN DAN KOMPLEKSITAS PERUSAHAAN TERHADAP <i>AUDIT REPORT LAG</i> Elfina Astrella Sambuaga, Olivia Putri Santoso	86-102
EARNING PERSISTENCE ON FIRM TAX DIFFERENCES AND FAMILY OWNERSHIP Synthia Madyakusumawati, Hyashinta Dyah P	103-115
TRANSAKSI AFILIASI DAN <i>CAPITAL INTENSITY</i> MEMPENGARUHI EMITEN DALAM MENGHINDARI PAJAK Memed Sueb	116-133

ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *DIVIDEND PAYOUT RATIO*

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2017)

Maria Jeannifer Lie¹

Universitas Multimedia Nusantara
maria.jeannifer@student.umn.ac.id

Maria Stefani Osesoga²

Universitas Multimedia Nusantara
maria.stefani@umn.ac.id

Diterima 8 Maret 2020

Disetujui 18 Mei 2020

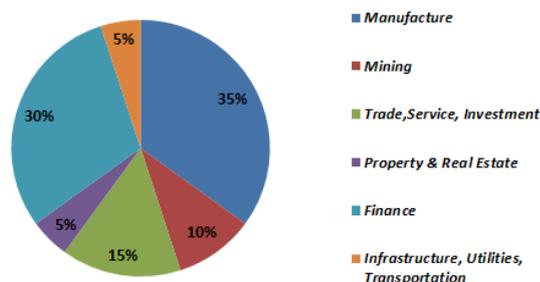
Abstract- The objective of the research is to obtain empirical evidence of the effect of Return on Assets, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, and Managerial Ownership towards Dividend Payout Ratio. Companies need to know any factors to determine the optimal dividend policy. The sample in this research is selected by using purposive sampling method and the secondary data used in this research was analyzed by using multiple regression method. The total amount of sample in this research is 13 firms which is registered as manufacturing sector in BEI for the year 2015-2017; published financial reports using Rupiah currency; audited by independent auditor; published financial reports for January 1 until December 31 periods, have positive net income, declared cash dividend, did not do stock split/ reverse stock split; and have managerial ownership on shareholders structure. The result of this research are Return on Assets, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, and Managerial Ownership simultaneously has significant effect towards Dividend Payout Ratio. Partially, variable Return on Assets, and Managerial Ownership have positive significant effect on Dividend Payout Ratio. While Current Ratio and Debt to Equity Ratio does not have significant effect towards Dividend Payout Ratio.

Keywords: *Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Dividend Payout Ratio, Managerial Ownership, Return on Assets.*

1. PENDAHULUAN

Untuk memudahkan investor yang menginginkan keuntungan investasi dari dividen dalam menetapkan saham-saham apa saja yang dividennya menguntungkan, Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Mei 2018 meluncurkan indeks *IDX High Dividend 20*. Indeks *IDX High Dividend 20* adalah harga atas 20 saham yang membagikan dividen tunai selama tiga tahun terakhir dan memiliki *dividend yield* yang tinggi. Konstituen Indeks *IDX High Dividend 20* adalah saham dari perusahaan tercatat yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir serta memiliki rata-rata harian nilai transaksi reguler untuk periode 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan terakhir masing-masing lebih besar dari Rp 1 miliar (Bursa Efek Indonesia, 2019). Berikut adalah grafik mengenai daftar saham yang termasuk dalam indeks *IDX High Dividend 20* periode Mei 2018 sampai Januari 2019 berdasarkan industrinya:

Gambar 1
Emiten yang termasuk dalam *IDX High Dividend 20*
periode Mei 2018 – Januari 2019 berdasarkan Industri



Sumber: Bursa Efek Indonesia (2019)

Gambar 1 menunjukkan bahwa perusahaan sektor manufaktur memiliki jumlah emiten terdaftar terbanyak dalam Indeks *IDX High Dividend 20*. Hal ini menunjukkan perusahaan sektor manufaktur memberikan dividen yang menjanjikan bagi investor.

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Bursa Efek Indonesia, 2019). Dividen menjadi salah satu kebijakan yang penting di dalam perusahaan karena menyangkut investasi yang dilakukan oleh investor. Ketika perusahaan memiliki potensi yang besar untuk membagikan dividen, perusahaan menunjukkan sinyal kepada investor bahwa perusahaan sedang dalam kondisi yang baik dan menguntungkan, sehingga akan mengakibatkan investor tertarik untuk melakukan investasi dan akan membuat potensi investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan akan semakin besar.

Dilansir dari bisnis.com, PT Astra International Tbk. merupakan salah satu saham yang diminati oleh investor asing. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, investor asing membukukan pembelian bersih pada saham PT Astra International Tbk. senilai Rp 230.200.000.000 dalam seminggu ke belakang (9/4/2019). Laporan keuangan tahun 2017 PT Astra International Tbk. menunjukkan bahwa perusahaan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2016 sebesar Rp 6.801.000.000.000. Pembagian dividen diumumkan pada tanggal 21 September 2016, dimana rata-rata harga saham perusahaan 15 hari sebelum pengumuman adalah sebesar Rp 8.145 per lembar saham. Setelah pengumuman pembagian dividen, harga saham PT Astra International Tbk. mengalami kenaikan. Rata-rata harga saham PT Astra International Tbk. 15 hari setelah adanya pengumuman pembagian dividen menjadi sebesar Rp 8.545 per lembar saham. Kemudian pada tahun buku 2017 PT Astra International Tbk. membagikan dividen tunai sebesar Rp 7.489.000.000.000 atau naik sebesar 10,12% dari tahun sebelumnya. Pembagian dividen tersebut diumumkan pada tanggal 27 September 2017, dimana rata-rata harga saham PT Astra International Tbk. 15 hari sebelum pengumuman pembagian dividen adalah sebesar Rp 7.850 per lembar saham. Rata-rata harga saham PT Astra International Tbk. kembali mengalami kenaikan setelah adanya pengumuman pembagian dividen 2017. Diketahui rata-rata harga saham 15 hari setelah pengumuman pembagian dividen menjadi sebesar Rp 7.966 per lembar saham. Hal ini menunjukkan jumlah dividen tunai yang dibagikan perusahaan dapat membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Adanya pengumuman pembagian dividen tunai dapat

meningkatkan permintaan saham perusahaan dan membuat harga saham perusahaan juga mengalami peningkatan.

Adanya kebijakan dividen dapat membantu investor untuk mempertimbangkan apakah akan melakukan investasi di perusahaan tersebut atau tidak. Investor yang mengharapkan keuntungan dari dividen akan melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki kebijakan dividen yang tinggi. Selain itu, kebijakan dividen juga dapat menjadi pertimbangan bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayarkan utang dan bunganya. Kreditor akan bersedia memberikan kredit pada perusahaan yang rutin membagikan dividen tunai karena menandakan kecukupan saldo kas dan saldo laba yang dimiliki perusahaan. Peranan kebijakan dividen dalam pertimbangan keputusan investor dan kreditor inilah yang memotivasi banyaknya dilakukan penelitian terkait kebijakan dividen.

Kebijakan dividen diukur dengan menggunakan *Dividend Payout Ratio*. *Dividend Payout Ratio* menggambarkan jumlah laba dari setiap lembar saham yang dialokasikan ke dalam bentuk dividen (Setiawati dan Yesisca, 2016). *Dividend Payout Ratio* merupakan perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan perusahaan. Semakin tinggi *DPR* menunjukkan semakin banyak dividen yang dibayarkan dari laba bersih perusahaan.

Kebijakan dividen dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *Dividend Payout Ratio* adalah *Return on Assets (ROA)*. *Return on Assets* merupakan salah satu proksi dari rasio profitabilitas. *ROA* menggambarkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Semakin tinggi *ROA* menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi dari aset yang dimilikinya. Semakin tinggi *ROA* suatu perusahaan, menggambarkan bahwa perusahaan mampu mengelola aset yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk memperoleh laba. Dengan meningkatnya laba perusahaan, maka *retained earning* perusahaan meningkat. Semakin tinggi *retained earning* perusahaan maka akan meningkatkan potensi perusahaan untuk membagikan laba dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Ketika dividen tunai yang dibagikan lebih besar daripada laba yang dijanjikan perusahaan, maka *Dividend Payout Ratio* akan meningkat. Dapat disimpulkan, ketika *ROA* meningkat maka *Dividend Payout Ratio* akan meningkat juga. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Laili, dkk. (2015) yang menyatakan bahwa *Return on Assets* berpengaruh signifikan terhadap variabel *Dividend Payout Ratio*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Laim, dkk. (2015) dan menunjukkan bahwa variabel *Return on Assets* tidak berpengaruh terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Faktor *Current Ratio* juga dapat mempengaruhi tingkat *Dividend Payout Ratio*. *Current Ratio* mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui sejumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan (Samrotun, 2015). Semakin tinggi *Current Ratio* suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki saldo kas yang cukup untuk dapat melunasi kewajiban lancarnya dan membuat kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen tunai kepada investor dari sisa kas yang tersedia meningkat. Semakin tinggi *Current Ratio* juga menunjukkan jumlah *current asset* lebih banyak daripada *current liabilities*. Perusahaan dapat menggunakan *current asset* berupa persediaan untuk mendukung operasional perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Kenaikan pendapatan yang diikuti dengan efisiensi biaya akan membuat laba yang dihasilkan perusahaan meningkat. Semakin tinggi laba, maka akan meningkatkan *retained earning*. Semakin tinggi *retained earning* perusahaan maka akan meningkatkan potensi perusahaan untuk membagikan laba dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Ketika dividen tunai yang dibagikan lebih besar daripada laba yang dijanjikan perusahaan, maka *Dividend Payout Ratio* akan meningkat. Dapat disimpulkan semakin tinggi *Current Ratio* maka *Dividend Payout Ratio* juga

akan mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani, dkk. (2018) yang menyatakan bahwa *Current Ratio* berpengaruh terhadap *Dividend Payout Ratio*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Laim, dkk. (2015) menunjukkan bahwa variabel *Current Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Debt to Equity Ratio (DER) juga merupakan faktor yang mempengaruhi *Dividend Payout Ratio*. *DER* menunjukkan perbandingan antara total utang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri (Martono dan Harjito, 2007 dalam Laim, dkk., 2015). Semakin rendah *DER* perusahaan maka menunjukkan bahwa jumlah utang perusahaan lebih kecil dari jumlah modal perusahaan. *DER* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal dibanding utang sebagai sumber pembiayaan. Semakin rendah jumlah utang perusahaan mengakibatkan beban bunga yang perlu dibayarkan perusahaan akan semakin rendah dan pembayaran utang melalui kas juga akan semakin rendah. Semakin rendah beban bunga akan mengakibatkan laba perusahaan meningkat dan semakin rendah pembayaran utang akan meningkatkan saldo kas yang tersedia. Dengan meningkatnya laba perusahaan, maka *retained earning* perusahaan meningkat. Semakin tinggi *retained earning* perusahaan maka akan meningkatkan potensi perusahaan untuk membagikan laba dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Ketika dividen tunai yang dibagikan lebih besar daripada laba yang dijanjikan perusahaan, maka *Dividend Payout Ratio* akan meningkat. Dapat disimpulkan bahwa semakin rendah nilai *DER*, maka *Dividend Payout Ratio* akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laim, dkk. (2015) yang menyatakan bahwa *DER* berpengaruh terhadap *Dividend Payout Ratio*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Palupi, dkk. (2015) menunjukkan bahwa variabel *DER* tidak berpengaruh terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *Dividend Payout Ratio* yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen termasuk juga dewan direksi dan komisaris (Awalina, 2016). Pihak manajerial sebagai pemegang saham akan mengharapkan *return* atas investasinya yaitu berupa dividen. Semakin tinggi kepemilikan manajerial menandakan persentase yang dimiliki manajerial perusahaan semakin besar sehingga pengaruh manajerial dalam pengambilan keputusan dalam RUPS menjadi lebih besar, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dividen. Manajerial akan cenderung mengupayakan agar jumlah dividen tunai yang dibagikan perusahaan semakin besar karena, semakin tinggi dividen yang dibagikan perusahaan maka semakin tinggi juga keuntungan yang diperoleh pihak manajerial. Semakin besar pembagian dividen maka *DPR* akan mengalami peningkatan juga. Dapat disimpulkan semakin tinggi kepemilikan manajerial maka *Dividend Payout Ratio* akan semakin tinggi juga. Hal ini sejalan dengan penelitian Sumanti dan Mangantar (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap *Dividend Payout Ratio*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Yudianta dan Yadnyana (2016) yang menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *Dividend Payout Ratio*. Adanya hasil penelitian sebelumnya yang memberikan hasil berbeda mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen membuat peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait kebijakan dividen.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Return on Asset* berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio*?
2. Apakah *Current Ratio* berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio*?
3. Apakah *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Dividend Payout Ratio*?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout*

Ratio?

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Agency Theory

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori mengenai hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajer diberi kekuasaan oleh para pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan (Brigham dan Houston, 2006 dalam Suci, 2016). Masalah keagenan timbul karena manajemen dan pemilik memiliki perbedaan kepentingan. *Agency problem* adalah masalah yang muncul ketika manajer menempatkan tujuan pribadi di atas tujuan pemegang saham (Gitman dan Zutter, 2015). Dalam kaitannya dengan kebijakan dividen perusahaan, investor menginginkan pembagian dividen yang besar karena dividen merupakan arus kas masuk bagi investor dan juga merupakan sinyal bagi investor mengenai kemampuan perusahaan dan prospek pada masa yang akan datang. Adapun pihak manajemen akan berusaha untuk membagikan dividen seminimal mungkin karena pembagian dividen membuat semakin kecil dana yang ada dalam pengendaliannya (Setiawati dan Yesisca, 2016).

2.2. Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan mengenai pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Kebijakan dividen adalah salah satu isu yang paling diperdebatkan dari sektor korporasi (Delikartika dan Ferry, 2017). Teori yang terkait dengan kebijakan dividen yaitu:

1. *Dividend Irrelevance Theory*. Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani (MM), mereka berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besarnya *Dividend Payout Ratio* namun nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan dasarnya dalam menghasilkan laba dan resiko bisnisnya (Bringham dan Houston, 2001 dalam Samrotun, 2015).
2. *Bird In The Hand Theory*. Teori ini dikemukakan oleh Gordon dan Lintner, pembayaran dividen dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi investor (Gitman dan Zutter, 2015). Investor lebih menghargai pendapatan dari dividen dibandingkan dengan *capital gain* karena komponen hasil dividen risikonya lebih kecil dari komponen *capital gain* (Wijayanto dan Putri, 2018).
3. *Tax Preference Theory*. Teori ini memiliki dua alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi, karena keuntungan modal (*capital gain*) dikenakan tarif pajak lebih rendah daripada pendapatan dividen, dan pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai sahamnya terjual sehingga ada efek nilai waktu (Suci, 2016).
4. *Information Content or Signaling Theory*. Suatu teori yang menyatakan bahwa investor menilai perubahan dividen sebagai pertanda bagi perkiraan manajemen atas laba. Modigliani dan Miller berpendapat bahwa kenaikan dividen atas jumlah yang diharapkan merupakan suatu sinyal bagi investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan laba yang baik di masa depan. Sebaliknya, penurunan dividen atau kenaikan dalam jumlah lebih kecil dari yang diharapkan, merupakan sinyal bahwa manajemen meramalkan laba masa depan yang buruk (Wijayanto dan Putri, 2018).
5. *Clientele Effect*. Teori ini menjelaskan bahwa rasio pembayaran yang berbeda menarik berbagai jenis investor tetapi tetap tidak mengubah nilai perusahaan (Gitman dan Zutter, 2015).

Menurut Gitman dan Zutter (2015) terdapat tiga jenis kebijakan dividen yang digunakan perusahaan, yaitu:

1. *Constant payout ratio dividend policy*
Kebijakan dividen rasio pembayaran konstan adalah kebijakandividen yang membayarkan dividen berdasarkan persentase tertentu pada setiap periodenya.
2. *Regular dividend policy*
Kebijakan dividen ini dilakukan berdasarkan pembayaran dengan jumlah per mata uang yang tetap setiap periodenya. Perusahaan biasanya menggunakan kebijakan dividen ini dengan menaikkan regular dividend setelah kenaikan pendapatan secara berkelanjutan terjadi dalam perusahaan.
3. *Low regular and extra dividend policy*
Kebijakan dividen ini dilakukan berdasarkan pada pembayaran dividen teratur yang rendah dan ditambahkan dengan bonus dividen saat perusahaan mendapatkan yang lebih tinggi daripada periode yang telah ditentukan. Dengan adanya bonus dividen, perusahaan menghindari pandangan mengenai peningkatan dividen adalah permanen. Kebijakan dividen ini banyak digunakan pada perusahaan yang memiliki banyak pergeseran pendapatan.

2.3. Dividend Payout Ratio

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan presentase dividen yang dibagikan dari keuntungan bersih perusahaan (Suci, 2016). *Dividend Payout Ratio* merupakan perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan perusahaan. Semakin tinggi rasio pembayaran dividen (*Dividend Payout Ratio*) akan menguntungkan untuk pihak investor, tetapi tidak berlaku untuk perusahaan karena akan memperlemah keuangan perusahaan, tetapi sebaliknya semakin rendah *Dividend Payout Ratio* akan memperkuat keuangan perusahaan dan akan merugikan para investor, karena dividen yang diharapkan investor tidak sesuai yang diharapkan (Samrotun, 2015).

2.4. Return on Asset (ROA)

ROA merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin besar rasio ini, menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian investasi (*return*) semakin besar (Samrotun, 2015).

Ha1: Return on Assets berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio.

2.5. Current Ratio

Current Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia (Hery, 2018).

Ha2: Current Ratio berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio.

2.6. Debt to Equity Ratio (DER)

Menurut Laili, dkk. (2015) *DER* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* perusahaan. *Financial leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya.

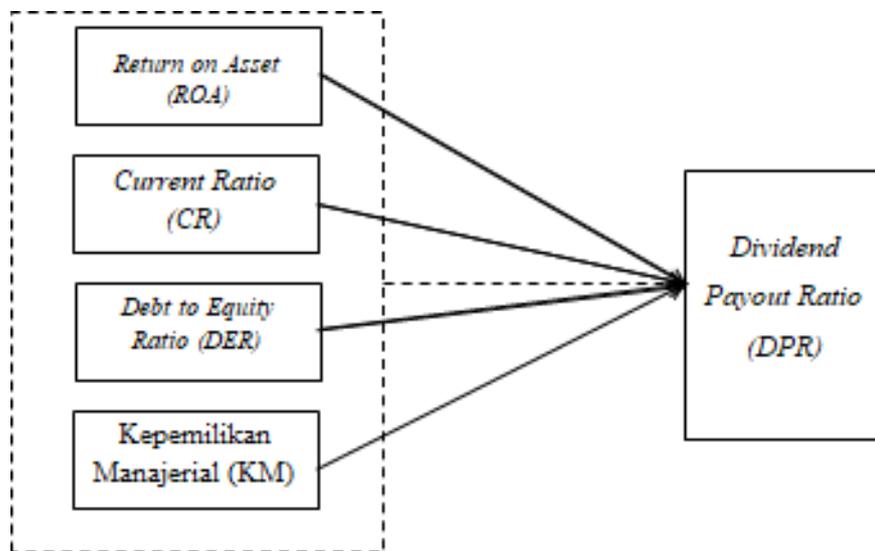
Ha3: Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio.

2.7. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen termasuk juga dewan direksi dan komisaris (Awalina, 2016). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017, direksi adalah organ perusahaan terbuka yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan terbuka untuk kepentingan perusahaan terbuka, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan terbuka serta mewakili perusahaan terbuka, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan dewan komisaris adalah organ perusahaan terbuka yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Ha4: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio*.

2.8. Model Penelitian



Gambar 2 Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Industri manufaktur terbagi dalam 3 subsektor manufaktur yaitu industri dasar & kimia, aneka industri dan industri barang konsumsi. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang diterbitkan selama periode 2015-2017.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hubungan sebab akibat (*causal study*). Menurut Sekaran & Bougie (2016) "*causal study* merupakan penelitian yang menguji apakah ada atau tidak satu variabel yang menyebabkan variabel lain untuk berubah. *Causal study* dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel yang mempengaruhi (independen), yaitu *Return on Assets*, *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan kepemilikan manajerial dengan variabel yang dipengaruhi (dependen), yaitu *Dividend Payout Ratio*.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Di dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen yang seluruhnya diukur dengan skala rasio. *Dividend Payout Ratio* merupakan persentase keuntungan per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai dari setiap laba yang dihasilkan per lembar saham. Gitman dan Zutter (2015) merumuskan *DPR* sebagai berikut:

$$DPR = \frac{\text{Dividend Per Share}}{\text{Earning Per Share}}$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen menurut Sekaran dan Bougie (2016) secara umum diduga bahwa variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen dengan cara positif atau negatif. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Return on Assets (ROA)* merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Weygandt, *et al.* (2019) rumus untuk menghitung *ROA* adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Total Assets}}$$

2. *Current Ratio (CR)* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar

$$CR = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liability}}$$

yang tersedia. Perhitungan *Current Ratio* berdasarkan Weygandt, et al. (2019) adalah sebagai berikut:

3. *Debt to Equity Ratio (DER)* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang dan ekuitas untuk membiayai perusahaan. *Debt to Equity Ratio (DER)* diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Gitman dan Zutter, 2015):

$$DER = \frac{\text{total liabilities}}{\text{shareholders equity}}$$

4. Kepemilikan manajerial menggambarkan persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh direksi dan komisaris perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sumanti dan Mangantar, 2015):

$$KM = \frac{\text{Saham yang dimiliki direktur dan komisaris}}{\text{total saham yang beredar}}$$

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini berupa data keuangan perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017, dimana telah diaudit secara profesional. Data tersebut dapat diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu www.idx.co.id.

3.5 Teknik Pengambilan Sampel

Data penelitian yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Kriteria perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017.
2. Menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang Rupiah secara berturut-turut selama periode 2015-2017.
3. Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara berturut-turut selama periode 2015-2017.
4. Menerbitkan laporan keuangan dengan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember secara berturut-turut selama periode 2015-2017.
5. Menghasilkan laba positif secara berturut-turut selama periode 2015-2017.
6. Membagikan dividen tunai secara berturut-turut selama periode 2016-2018.
7. Tidak melakukan *share split/reverse share split* secara berturut-turut selama periode 2015-2017.
8. Memiliki kepemilikan manajerial (direksi dan komisaris) dalam struktur kepemilikan saham perusahaan berturut-turut selama periode 2015-2017.

Berikut merupakan rincian sampel yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 1
Rincian Pengambilan Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017.	136
2	Menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang Rupiah secara berturut-turut selama periode 2015-2017.	110
3	Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara berturut-turut selama periode 2015-2017.	110
4	Menerbitkan laporan keuangan dengan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember secara berturut-turut selama periode 2015-2017.	110
5	Menghasilkan laba positif secara berturut-turut selama periode 2015-2017.	67
6	Membagikan dividen tunai secara berturut-turut selama periode 2016-2018.	46
7	Tidak melakukan <i>share split/reverse share split</i> berturut-turut selama periode 2015-2017.	35
8	Memiliki kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan saham perusahaan berturut-turut selama periode 2015-2017.	13
	Jumlah sampel penelitian	13

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data sampel dikumpulkan, maka data tersebut akan dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui peran masing-masing variabel independen (*Return on Asset*, *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan kepemilikan manajerial) dalam mempengaruhi variabel dependen (*Dividend Payout Ratio*). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi menggunakan *software SPSS* versi 23.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = *Dividend Payout Ratio*

α = Konstanta

β_1 s.d. β_4 = Koefisien regresi

X1 = *Return on Assets*

X2 = *Current Ratio*

X3 = *Debt to Equity Ratio*

X4 = Kepemilikan Manajerial

e = *Standard error*

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai *Dividend Payout Ratio*, *Return on Asset*, *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan kepemilikan manajerial. Berikut adalah tabel hasil statistik deskriptif:

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPR	39	1,0753	,1408	1,2161	,496091	,2788062
ROA	39	,3738	,0197	,3936	,116017	,0944189
CR	39	14,5590	,6056	15,1646	3,609906	3,4250063
DER	39	2,5784	,0761	2,6546	,724616	,6378773
KM	39	,323992	,000008	,324000	,04768790	,100919164
Valid N (listwise)	39					

Berdasarkan Tabel 2, Variabel *DPR* memiliki rata-rata (*mean*) 0,496091 yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan membagikan dividen sebesar 49,61% dari laba bersih yang dijanjikan oleh perusahaan. Variabel *ROA* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1160 atau 11,60% yang artinya kemampuan -rata perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menghasilkan laba adalah sebesar 11,60% dari penggunaan aset perusahaan. Variabel *CR* memiliki nilai rata-rata sebesar 3,6099 yang artinya kemampuan rata-rata perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya sebesar 3,61 kali dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Variabel *DER* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,724616 yang artinya struktur modal perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas dibandingkan dengan liabilitas. Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai rata-rata sebesar 0,04768 yang artinya rata-rata jumlah saham yang dimiliki oleh direksi atau komisaris dalam perusahaan adalah sebesar 4,77% dari jumlah saham yang beredar yang dimiliki oleh perusahaan.

4.2.2 Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan *Kolgomorov-Smirnov Test* adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,16883021
Most Extreme Differences	Absolute	,077
	Positive	,077
	Negative	-,075
Test Statistic		,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov yang ditunjukkan pada Tabel 3 menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.077 dengan nilai signifikansi sebesar 0.200. Melalui hasil pengujian ini, dapat dinyatakan bahwa semua variabel yang diuji datanya terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi dari hasil uji lebih besar dari 0.05.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolonieritas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
ROA	,616	1,623
CR	,557	1,794
DER	,402	2,485
KM	,712	1,404

a. Dependent Variable: DPR

Variabel *Return on Asset (ROA)*, *Current Ratio (CR)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, dan kepemilikan manajerial memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0.10 dan nilai *VIF (Variance Inflation Factor)* kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel.

2. Uji Autokorelasi

Berikut merupakan hasil uji autokorelasi dengan *Run Test*:

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,00398
Cases < Test Value	19
Cases >= Test Value	20
Total Cases	39
Number of Runs	22
Z	,329
Asymp. Sig. (2-tailed)	,742

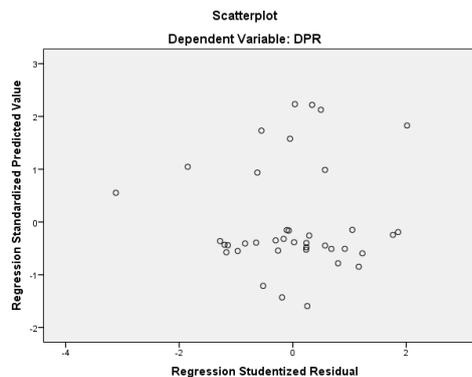
a. Median

Berdasarkan Tabel 5, hasil coba uji autokorelasi pada tabel, terdapat bahwa nilai *Asymp. Sig* sebesar 0.742. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas:

Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan grafik *scatterplot* pada Gambar 3 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu secara teratur, seperti bergelombang, melebar dan kemudian menyempit. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.2.4 Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,796 ^a	,633	,590	,1784853

a. Predictors: (Constant), KM, ROA, CR, DER

b. Dependent Variable: DPR

Berdasarkan Tabel 6 nilai koefisien korelasi (R) dalam penelitian ini adalah sebesar 0.914 atau 91.4%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen memiliki korelasi yang sangat kuat, karena nilai koefisien korelasi (R) berada dalam klasifikasi $>0.75-0.99$. Nilai *Adjusted R²* sebesar 0.794 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yakni nilai perusahaan (PBV) sebesar 79.4% dan sisanya sebesar 20.6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Nilai *Standard Error of Estimate (SEE)* sebesar 0.65046847656 yang artinya semakin kecil nilai *SEE* akan membuat model regresi dalam penelitian ini semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen yaitu nilai perusahaan (PBV).

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji statistik F:

Tabel 7
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	60.069	7	8.581	20.281	.000 ^b
Residual	11.847	28	.423		
Total	71.916	35			

a. Dependent Variable: PBV

b. Predictors: (Constant), LnTA, KA, DER, KM, KI, ROA, KEPINS

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa nilai F sebesar 20.281 dengan tingkat signifikansi dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan (PBV). Sehingga hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Thaharah & Asyik (2016), Tommy, & Saerang (2014), Pantow, Murni, & Trang (2015), dan Menurut Manoppo & Arie (2016).

Untuk mengukur signifikansi ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan menggunakan *goodness of fit* yaitu membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Hasil nilai F hitung dalam penelitian ini sebesar 2.45. Nilai F tabel dalam penelitian ini 20.281 sehingga lebih besar dari nilai F hitung yaitu 2.45. Hal ini

menunjukkan bahwa fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual sudah tepat atau *model fit*.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut merupakan hasil dari uji statistik t:

Tabel 8
Hasil Uji Statistik

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,279	,078		3,598	,001
	ROA	1,525	,391	,517	3,904	,000
	CR	-,019	,011	-,230	-1,655	,107
	DER	,047	,072	,108	,657	,515
	KM	1,542	,340	,558	4,536	,000

a. Dependent Variable: DPR

Berdasarkan Tabel 4.9, diperoleh suatu persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

$$DPR = 0,297 + 1,525ROA - 0,019 CR + 0,047 DER + 1,542 KM$$

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh nilai t sebesar 3,904 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini dapat disimpulkan H_{a1} diterima. Variabel *Return on Assets* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,525 yang berarti bahwa setiap peningkatan 1% *ROA* akan menyebabkan kenaikan *Dividend Payout Ratio (DPR)* sebesar 152,5%. Semakin tinggi *ROA* suatu perusahaan, menggambarkan bahwa perusahaan mampu mengelola aset yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk memperoleh laba. Dengan meningkatnya laba perusahaan, maka *retained earning* perusahaan meningkat. Semakin tinggi *retained earning* perusahaan maka akan meningkatkan potensi perusahaan untuk membagikan laba dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Ketika dividen tunai yang dibagikan lebih besar daripada laba yang dijanjikan perusahaan, maka *Dividend Payout Ratio* akan meningkat.

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh nilai t sebesar -1,655 dengan nilai signifikansi sebesar 0,107. Hal ini dapat disimpulkan H_{a2} ditolak. Variabel *Current Ratio (CR)* memiliki koefisien regresi -0,019 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 1% *Current Ratio* akan menyebabkan penurunan *DPR* sebesar 1,9%. Dalam penelitian ini, dari 39 observasi terdapat 26 observasi atau 66,67% yang memiliki nilai *Current Ratio* di bawah rata-rata. Rata-rata *current ratio* adalah sebesar 3,6099. Nilai ini lebih tinggi dari standar *current ratio* yaitu 2 (Kasmir, 2017). Dari 26 observasi tersebut yang mengalami penurunan *DPR* sebanyak 16 observasi (61,54%). Rata-rata proporsi *current asset* dari 16 observasi tersebut adalah sebesar 21,75% untuk kas, sebesar 27,08% untuk piutang, dan sebesar 30,54% untuk persediaan. Sedangkan dari 10 observasi (38,46%) yang mengalami kenaikan *DPR* memiliki rata-rata proporsi *current asset* adalah sebesar 16,02% untuk kas, sebesar 24,95% untuk piutang, dan sebesar 49,68% untuk persediaan. Hal ini menunjukkan bahwa

sebagian besar perusahaan tidak memiliki ketersediaan kas yang tinggi. Dalam perhitungan *Current Ratio* terdapat komponen *current asset* dan *current liability*. *Current asset* dalam laporan keuangan memiliki beberapa komponen diantaranya kas, piutang, persediaan, dan aset lancar lainnya. Salah satu syarat perusahaan membagikan dividen tunai adalah perusahaan harus memiliki kecukupan kas. Dengan adanya kecukupan kas perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dan membagikan dividen, namun ketika perusahaan mengandalkan piutang dan persediaan untuk dikonversi menjadi kas, perusahaan memerlukan waktu untuk mengkonversikan aset tersebut menjadi kas. Dapat disimpulkan tinggi rendahnya *current ratio*, jika tidak didukung oleh ketersediaan kas, tidak akan mempengaruhi pembagian dividen.

Berdasarkan hasil uji statistik t diperoleh nilai t sebesar 0,657 dengan nilai signifikansi sebesar 0,515. Hal ini dapat disimpulkan H_{a3} ditolak. Variabel *Debt to Equity Ratio (DER)* memiliki koefisien regresi 0,047 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 1% *DER* akan menyebabkan kenaikan *DPR* sebesar 4,7%. Hal ini disebabkan dari 39 observasi, terdapat 24 observasi atau 61,54% yang memiliki nilai *DER* di bawah rata-rata. Dari 24 observasi tersebut terdapat 15 observasi atau 62,5% yang memiliki nilai *DPR* di bawah rata-rata. Dari 15 observasi tersebut, terdapat 10 observasi atau 66,67% yang saldo kas-nya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dari 10 observasi tersebut, terdapat 9 observasi yang jumlah kas-nya lebih banyak digunakan untuk aktivitas investasi daripada untuk pembayaran dividen. Rata-rata arus kas yang dikeluarkan perusahaan untuk aktivitas investasi perolehan aset tetap adalah 261% lebih tinggi daripada kas yang digunakan untuk pembayaran dividen. Semakin rendah jumlah utang perusahaan mengakibatkan beban bunga yang perlu dibayarkan perusahaan akan semakin rendah dan pembayaran utang melalui kas juga akan semakin rendah. Semakin rendah beban bunga akan mengakibatkan laba perusahaan meningkat dan semakin rendah pembayaran utang akan meningkatkan saldo kas yang tersedia. Dengan meningkatnya saldo kas yang tersedia maka akan meningkatkan potensi perusahaan untuk membagikan laba dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham. Namun dalam penelitian ini kenaikan kas tidak diikuti dengan kenaikan pembayaran dividen karena kas tersebut lebih banyak digunakan untuk investasi perusahaan seperti pembelian aset tetap. Hal ini menyebabkan tinggi rendahnya nilai *DER* tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan *DPR*.

Berdasarkan hasil uji statistik t, kepemilikan manajerial memperoleh nilai t sebesar 4,536 dengan tingkat signifikan 0.000. Hal ini dapat disimpulkan H_{a4} diterima. Variabel kepemilikan manajerial memiliki koefisien regresi 1,542 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 1% kepemilikan manajerial akan menyebabkan kenaikan *DPR* sebesar 154,2%. Semakin tinggi kepemilikan manajerial menandakan persentase yang dimiliki manajerial perusahaan semakin besar sehingga pengaruh manajerial dalam pengambilan keputusan dalam RUPS menjadi lebih besar, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dividen. Manajerial akan cenderung mengupayakan agar jumlah dividen tunai yang dibagikan perusahaan semakin besar karena, semakin tinggi dividen yang dibagikan perusahaan maka semakin tinggi juga keuntungan yang diperoleh pihak manajerial. Semakin besar pembagian dividen maka *DPR* akan mengalami peningkatan juga.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh *Return on Assets*, *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan kepemilikan manajerial baik secara parsial maupun secara simultan terhadap *Dividend Payout Ratio*. secara parsial maupun secara simultan. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Ha₁ diterima, sehingga disimpulkan bahwa *Return on Assets* berpengaruh positif signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*. Berpengaruh positifnya ROA menunjukkan bahwa perusahaan dengan penggunaan aset yang efisien lebih mampu untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya.
2. Ha₂ ditolak, sehingga disimpulkan bahwa *Current Ratio* tidak berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio*.
3. Ha₃ ditolak, sehingga disimpulkan bahwa *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh negatif terhadap *Dividend Payout Ratio*.
4. Ha₄ diterima, sehingga disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*. Berpengaruh positif signifikannya kepemilikan manajerial terhadap DPR ini menunjukkan bahwa pemegang saham manajerial terlibat aktif dalam penentuan jumlah dividen yang dibagikan perusahaan. Hal ini mendukung pendapat bahwa kebijakan dividen merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengatasi *agency problem*.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini nilai adjusted R square (R²) sebesar 59% yang berarti bahwa variabel *Return on Assets*, *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan kepemilikan manajerial dapat menjelaskan variabel *Dividend Payout Ratio* sebesar 59%. Sedangkan 41% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2017 dengan sampel penelitian yaitu 12 perusahaan, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi terhadap semua perusahaan yang terdaftar di BEI.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat ditujukan kepada peneliti selanjutnya terkait dengan nilai perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan variabel-variabel lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap *Dividend Payout Ratio* seperti *cash position*, *life cycle*, dan ukuran perusahaan.
2. Menggunakan data lebih dari tiga tahun dan memperluas objek penelitian ke sektor manufaktur agar hasil penelitian dapat digeneralisasi.

5.4 Implikasi

Implikasi penelitian ini untuk perusahaan adalah perusahaan sebaiknya mengelola aset yang dimiliki secara efisien dan efektif untuk memperoleh laba, sehingga perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional dan meningkatkan potensi perusahaan dalam dividen kepada pemegang saham. Perusahaan juga dapat memperhatikan persentase kepemilikan pemegang saham yang dimiliki oleh manajerial perusahaan, karena

semakin tinggi kepemilikan manajerial perusahaan maka semakin tinggi pengaruh manajerial dalam pengambilan keputusan dalam RUPS, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dividen. Oleh sebab itu perusahaan dapat memperhatikan berapa besar persentase maksimum untuk kepemilikan saham manajerial yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan bagi investor yang mengharapkan *cash dividend* perusahaan yang tinggi, maka investor perlu memilih perusahaan dengan tingkat *Return On Asset* yang tinggi dan investor juga dapat memperhatikan struktur kepemilikan perusahaan.

REFERENSI

- Asmirantho, Edhi. 2015. Pengaruh *Dividen Per Share (DPS)*, *Dividen Payout Ratio (DPR)*, *Price To Book Value (PBV)*, *Debt To Equity Ratio (DER)* *Net Profit Margin (NPM)* Dan *Return On Asset (ROA)* terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman dalam Kemasan Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi. Vol.1 No.2*
- Apriliani, Amalia dan Kartina Natalylova. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol.19.No.1a.*
- Awalina, Putri. 2016. Pengaruh Struktur Kepemilikan, *Free Cash Flow*, dan *Return on Assets* terhadap *Dividend Payout Ratio* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). *Cendekia Akuntansi. Vol.4. No.1.*
- Darmayanti, Ni Kadek D. & I ketut Mustanda. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Jaminan Aset, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada Sektor Industri Barang Konsumsi. *E-Jurnal Management. Vol. 5 No.8.*
- Delikartika, Lusiyana dan Ferry. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol.19 No.1a.*
- Destriana, Nicken. 2016. Analisis Empiris Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol.18 No.1.*
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program. IBM SPSS 23 (edisi 8). Cetakan ke VIII.
- Gitman, Lawrence J. & Chad J. Zutter. 2015. *Principles of Managerial Finance. 14th edition.*
- Handayani, Nursakinah B.R. 2017. Analisis Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014). *Journal of Accounting. Vol.6 No.3.*
- Hery, S.E., M.Si., CRP., RSA. 2015. Analisis Kinerja Manajemen. PT Grasindo, Jakarta.
- Hornngren, Charles T, Srikant M. Datar dan Madhav V. Rajan. 2015. *Cost Accounting a Managerial Emphasis Fifteenth Edition.* USA : Pearson Education Limited.
- Kieso, Donal E., Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2018. *Intermediate Accounting IFRS Third Edition. United States: John Wile & Sons.*
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia
- Laili, Darmawan & Sinarwati. 2015. Pengaruh *Debt to Equity Ratio*, Kepemilikan Manajerial, *Return on Assets*, dan *Current Ratio* terhadap *Dividend Payout Ratio*. *Jurnal Akuntansi. Vol.3 No.1. tahun 2005.*

- Laim, Nangoy, & Murni. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Dividend Payout Ratio* pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ-45 Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.1.
- Palupi, Mayang T.W., Nengah Sudjana dan Zahrah Z.A. 2017. Pengaruh Struktur Modal terhadap Kebijakan Dividen (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar & Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol 44 No.1.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04//2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
- Samrotun, Yuli Chomsatu. 2015. Kebijakan Dividend dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Paradigma*. Vol.13 No.01.
- Sari, M. Renika, Abrar Oemar dan Rita Andini. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, *Earning Per Share*, *Current Ratio*, *Return on Equity* dan *Debt To Equity Ratio* Terhadap Kebijakan Dividen. *Journal of Accounting*. Vol.2 No.2.
- Sari, Ni Komang Ayu P. & I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. Pengaruh Kepemilikan Managerial, Kepemilikan Institusional, *Free Cash Flow* dan Profitabilitas pada Kebijakan Dividen. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol.15 No.3.
- Setiawati, Loh Wenny & Lusiana Yesisca. 2016. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Kebijakan Utang, *Collateralizable Assets*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. *Jurnal Akuntansi*. Vol.10 No.1.
- Suci, Rizky Indra Wulan. 2016. Pengaruh Arus Kas Bebas, kebijakan Pendanaan, Profitabilitas, *Collateral Assets* Terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.5 No.2.
- Sumanti, Jorenza Chiquita & Marjam Mangantar. 2015. Analisis Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Utang dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23.PMK No. 141/PMK.03/2015.
- Wahyuni, Sri Fitri & M.Shareza Hafiz. 2018. Pengaruh *CR*, *DER* dan *ROA* terhadap *DPR* pada perusahaan manufaktur di BEI. *Jurnal Ekonomi*. Vol.1 No. 2.
- Wardana, K. Kusuma, Nyoman T.H. dan A.Tungga Atmadja. 2017. Analisis Kemampuan Perusahaan Guna Mengembalikan Rasio Keuangan dalam Kondisi Ideal. *Jurnal Akuntansi*. Vol.8. No2.
- Wardani, Irin Arian, Isharijadi dan Asstuti. 2018. Pengaruh *Current Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* Terhadap *Dividend Payout Ratio* Perusahaan Manufaktur BEI. *Jurnal Akuntansi*. Vol.11.No3
- Wijayanto, Edi & Anggi Navulani Putri. 2018. Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio *Leverage*, Rasio Profitabilitas dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Akutal Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*. Vol.1 No.2.
- Weygandt, Jerry J. et al.. 2019. *Financial Accounting IFRS Edition*. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Wuisan, F., Fransiskus Randa dan Lukman. 2018. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*. Vol.16. No.2

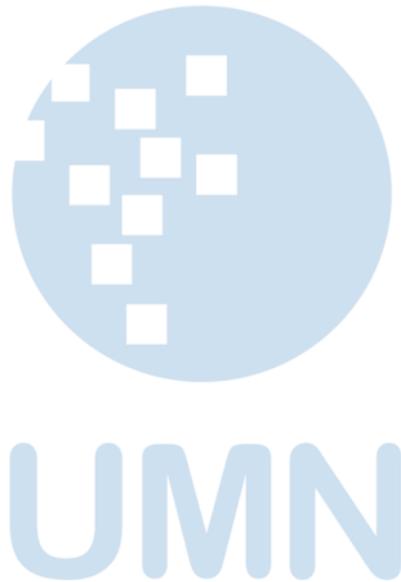
Yudiana, I Gede Yoga & I Ketut Yadnyana. 2016. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, *Leverage, Investment, Opportunity Set* dan Profitabilitas pada Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi. Vol.15.1.*

www.idx.co.id

www.market.bisnis.com

www.pajak.go.id

www.yahoo.finance.com



PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO SOLVABILITAS DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS LABA

Pardomuan Ritonga

Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta – Indonesia

pardomuanritonga1974@gmail.com

Diterima 8 April 2020

Disetujui 20 Mei 2020

Abstract- This research aims to analyze the influence of financial risk i.e. credit and solvency risk as long as audit quality on the firm's profitability and implications with earnings quality. This type of research is quantitative. The research population is sub-sectors of general insurance listed in the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. The sampling method using purposive sampling technique is counted 10 companies. The method of analysis using linear regression analysis and sobel test. These results indicate that financial risk has significant effect simultaneously on the profitability of firms as long as financial risk and audit quality has no significant effect simultaneously on the earnings quality. The partial test results showed that solvency risk and audit quality have a negative effect while credit risk has no significant effect to the profitability of firms. However, credit and solvency risk as long as audit quality have no indirect effect to the earnings quality through profitability of firms.

Keywords: *solvency risk, profitability of firms, earnings quality value*

I. PENDAHULUAN

Perusahaan asuransi merupakan salah satu pilar usaha pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berkontribusi dan sangat siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Industri ini merupakan bagian yang terintegrasi pada kinerja agen asuransi dengan serangkaian proses atau *paperwork* yang cukup kompleks, hadirnya era 4.0 yang diimplementasikan ke konsep digitalisasi, modernisasi dan digitalisasi jalur proses antara perusahaan-agen-nasabah (Baskoro, 2018). Usaha perasuransian sebagai jasa pengelolaan risiko menjalankan aktivitas utama antara lain strategi penetapan harga, penanganan klaim, *underwriting*, dan *reinsurance management* yang harus dikelola sebaik-baiknya dalam rangka perusahaan mempertahankan kelangsungannya (Wani & Dar, 2015).

In IDR Trillions												
Economic Sector	2016			2017			2018			Growth YOY 2018	Growth YTD 2018	
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
Agriculture, Forestry And Fishery	265	306	332	347	272	317	348	359	283	4.00%	3.92%	
Mining And Quarrying	196	195	196	196	195	200	201	200	200	2.20%	1.81%	
Manufacturing	508	511	525	536	530	534	545	559	553	4.30%	4.28%	
Electricity And Gas Supply	26	25	25	26	26	26	26	27	28	5.46%	5.47%	
Water Supply, Sewerage, Waste Management	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7.90%	5.43%	
Construction	245	234	240	251	263	251	253	266	278	5.58%	6.05%	
Wholesale And Retail Trades, Repair of Motor Vehicles	318	318	307	337	332	333	343	354	346	4.45%	4.81%	
Transport And Storage	98	97	100	105	105	105	108	111	111	5.94%	7.10%	
Accommodation And Food Service Activities	72	72	73	74	76	77	78	80	81	5.57%	6.33%	
Information And Communication	189	189	196	198	198	191	194	198	198	6.47%	7.71%	
Financial And Insurance Services	95	99	99	103	99	102	102	105	105	6.28%	4.19%	
Real Estate Activities	70	71	72	72	73	74	75	76	76	4.18%	3.87%	
Business Services	41	42	43	44	45	45	47	48	48	8.94%	8.71%	
Public Adm and Defense; Compulsory Social Security	85	78	78	80	81	82	84	86	87	7.15%	7.10%	
Education	80	72	74	75	85	75	77	80	89	5.05%	5.31%	
Human Health And Social Work Activities	27	27	27	27	29	28	29	29	31	7.88%	7.24%	
Other Services Activities	40	41	42	43	44	44	46	47	48	9.15%	9.08%	
Gross Domestic Product	2,386	2,378	2,473	2,551	2,509	2,499	2,604	2,684	2,630	5.18%	5.18%	

(Sumber: SEKI Bank Indonesia, 2019)

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia per Sektor pada Harga Konstan

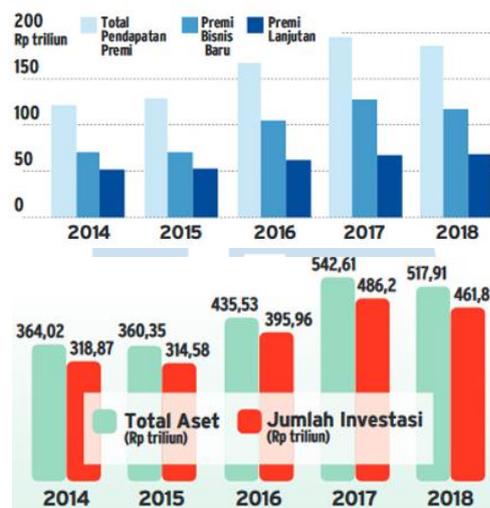
Sektor Keuangan dan Jasa Asuransi mengalami pertumbuhan GDP tahun 2018 sebesar 4,19 persen YTD atau sebesar 6,28 persen YOY. *Trend* positif ini menempatkan sektor jasa keuangan berdasarkan GDP per kuartal dan *forecast* yang terus mengalami peningkatan pangsa pasar Indonesia seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat atas manfaat produk asuransi dalam strategi pengelolaan risiko yang pemegang polis (Bank Indonesia, 2019). Menurut Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), adanya program dari regulator OJK melalui gerakan inklusi keuangan kepada masyarakat dalam mendukung pengetahuan terkait risiko-risiko yang melekat pada nasabah asuransi atau aset-aset yang dimiliki dan dikelola melalui agen perusahaan asuransi. Atas produk dan layanan asuransi tersebut juga ditandai dengan potensi pasar yang sangat besar di Indonesia dengan pertumbuhan premi asuransi jiwa pada hingga kuartal ketiga 2017 mengalami pertumbuhan 37,76 persen dengan total investasi sebesar Rp486,5 triliun (Al Hafiz, 2018).

Setiap perusahaan asuransi harus menyampaikan laporan tingkat solvabilitas dengan menggunakan metode *risk-based capital* (RBC) sebagaimana tertuang pada Pasal 3 POJK No.71 tahun 2016 atas tingkat solvabilitas paling rendah 100 persen dari risiko modal minimum berbasis risiko (MMBR) (OJK, 2016). Ketidakmampuan dalam pemenuhan klaim sebelumnya atas dispersi arus kas bersih dan kewajiban jangka pendek menjadi bagian dari pengelolaan likuiditas perusahaan dalam konteks risiko kebangkrutan tunai (*cash insolvency*) (Wani & Dar, 2015). Perusahaan asuransi mengumpulkan dana dari nasabah (tertanggung) berupa premi dalam rangka menanggulangi risiko dari aktivitas operasionalnya. Premi yang terkumpul harus dikelola dengan baik agar perusahaan mendapatkan laba yang optimal dan memenuhi segala kewajiban atas nasabahnya (Nurfadila, Hidayat, & Sulasmiyati, 2015). Perusahaan asuransi mengasuransikan sejumlah risiko yang ditanggung untuk mengurangi risiko kebangkrutan jika terjadi kerugian besar walaupun reasuransi dapat meningkatkan stabilitas perusahaan asuransi melalui penyebaran risiko, pencapaian persyaratan solvabilitas, keseimbangan profil risiko, dan pertumbuhan kapasitas penjaminan (Worku & Asmare, 2018). Pasal 4 POJK No.71 tahun 2016 memperkuat dengan perhitungan kebutuhan modal paling sedikit adalah risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional (OJK, 2016).

Faktor penting lainnya untuk pengelolaan modal berbasis risiko dan profitabilitas melalui sistem supervisi dari organ komite audit, audit internal dan eksternal untuk lebih memantau ketentuan keuangan yang disyaratkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2014 dalam penunjukkan auditor eksternal

(Merawati & Hatta, 2014), kondisi di atas menjadi bukti bahwa kualitas audit menjadi prasyarat untuk memastikan kinerja keuangan perusahaan asuransi.

Tantangan pada sektor industri asuransi ini dapat dijadikan peluang di Indonesia yang saat ini masih terbelang memiliki penetrasi sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura setelah Indonesia bergabung menjadi bagian dari masyarakat MEA sejak tahun 2016 (Intan, 2019). Kenaikan atau penurunan harga saham di bursa, khususnya untuk perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sangat dipengaruhi oleh baik atau buruknya kinerja perusahaan yang digambarkan dengan rasio profitabilitas.



(Sumber: <https://finansial.bisnis.com/>, 2019)

Gambar 2. Total Pendapatan dan Nilai Aset dibandingkan dengan Jumlah Investasi Industri Asuransi

Data total pendapatan dan indikator kinerja industri asuransi selama periode 2014-2018 mencatat bahwa terjadi penurunan indikator kinerja dan nilai aset pada tahun 2018 sebesar Rp24,7 triliun dan juga penurunan investasi sebesar Rp24,39 triliun dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini menjadi perhatian bagi industri asuransi dibandingkan periode 2014 hingga 2017 yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penurunan hasil total pendapatan dan nilai aset ini berdampak pada pengukuran rasio profitabilitas untuk mengukur keberhasilan dari kinerja perusahaan asuransi. Penurunan kinerja yang terjadi diantaranya indikator yang diantaranya adalah pendapatan premi, premi bisnis baru dan lanjutan serta nilai aset (*impairment of assets*) dibandingkan dengan jumlah investasi (Aldila, Jatmiko, & Hana, 2019). Industri pada sektor keuangan asuransi masih cukup optimis tumbuh sepanjang tahun 2019. Menurut Direktur eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia melaporkan bahwa pendapatan premi bruto Rp39,95 triliun hingga Juni 2019 dengan persentase pertumbuhan 20,6 persen dibandingkan Rp33,31 triliun pada Juni 2018 (Dalimunthe, 2019).

Beberapa temuan penelitian dari kalangan akademis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah menguji risiko kredit dengan hasil yang cukup beragam pada industri perbankan maupun asuransi. Asumsi risiko kredit dapat dipahami sejauh mana kemampuan dalam menyerap kerugian dan pengembalian minimum yang diharapkan dapat diterima untuk tingkat risiko tertentu termasuk obligasi, risiko gagal bayar, pinjaman utang yang dipertanggungjawabkan dan peran debitor (The National Bank of Ethiopia (NBE), 2010). Risiko kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan asuransi yang melibatkan 8 perusahaan asuransi dalam kurun 16 periode pengamatan (Sisay, 2017). Risiko kredit juga diungkap dengan arah pengaruh negatif terhadap profitabilitas yang melibatkan 14 bank komersial dalam kurun 6 periode pengamatan (Olalekan, Olumide, & Irom, 2018) serta temuan risiko kredit juga yang berpengaruh negatif studi empiris pada 22 perusahaan perbankan yang *listing* di BEI Tahun 2011-2015 dengan proksi *non-performing Loan* (NPL) (Suryo, Rahayu, & Nurbaiti, 2016). Oleh karena itu, faktor risiko kredit yang masih sedikit diteliti khususnya di Indonesia untuk menilai kesehatan perusahaan asuransi penting untuk dikaji lebih lanjut.

Risiko solvabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dengan proksi *solvency margin* pada 24 perusahaan asuransi jiwa di India (Wani & Dar, 2015). Pengukuran *solvency risk* dengan temuan arah pengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan asuransi dengan pengukuran perbandingan total kewajiban dan total aset (Sisay, 2017). Pengaruh positif *solvency margin* terhadap profitabilitas pada 8 perusahaan yang terdaftar di Dhaka Stock Exchange (DSE) - Bangladesh (Ullah, Faisal, & Zuhra, 2016) serta temuan analisis *risk-based capital* (RBC) yang berpengaruh terhadap stabilitas kesehatan perusahaan asuransi dengan proksi tingkat solvabilitas, batas tingkat solvabilitas minimum, tingkat perimbangan investasi dengan kewajiban, tingkat perimbangan premi neto dengan modal sendiri (Bogar, 2016). Penentu Kinerja Bisnis Asuransi Mikro di Ethiopia yang melibatkan 9 perusahaan asuransi selama 2009-2017 dengan pendekatan *return on assets* dengan hasil yang membuktikan pengaruh negatif atas faktor ketergantungan reasuransi, pertumbuhan premi, risiko penjaminan emisi serta inflasi sementara volum modal dan pangsar berpengaruh positif terhadap ROA (Worku & Asmare, 2018).

Kinerja perusahaan yang diukur berdasarkan *profitability ratio's* dengan pendekatan *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) juga telah dilakukan oleh beberapa penelitian di atas dengan hasil yang cukup konsisten atas faktor risiko keuangan yang mencakup risiko kredit dan risiko solvabilitas. Pentingnya keterlibatan mekanisme *corporate governance* dalam fungsi monitoring dan pengawasan struktur pengendalian eksternal yaitu auditor eksternal yang dapat menjembatani fungsi *agent* dan *stakeholders'* dalam konteks biaya keagenan untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Berdasarkan POJK No.71/POJK.05/2016 tentang kesehatan perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi, pencapaian rasio solvabilitas minimal adalah 100 persen atas target internal yang sekurang-kurangnya adalah 120 persen dari MMBR. Temuan penelitian yang membuktikan pengaruh positif kualitas audit terhadap kesehatan keuangan perusahaan dan dampaknya terhadap profitabilitas dalam pengawasan atas kegiatan operasional perusahaan yang melibatkan 11 perusahaan asuransi periode 2012 (Merawati & Hatta, 2014) Oleh karena itu, faktor kualitas audit untuk menilai kesehatan perusahaan asuransi di Indonesia juga penting untuk dikaji lebih lanjut.

Kualitas laba yang dilaporkan yang ditinjau dari tingkat profitabilitas sebagai faktor penghubung juga belum banyak dilakukan penelitian di Indonesia. Pengaruh risiko keuangan

dengan pengukuran *leverage* yang tidak membuktikan pengaruhnya terhadap perataan laba yang melibatkan 150 data observasi selama tahun 2013-2015 pada industri manufaktur sehingga perusahaan yang memiliki nilai risiko keuangan yang lebih besar tidak cenderung untuk melakukan tindakan perataan laba (Lathifah, Hidayati, & Malikah, 2018). Hasil pengujian solvabilitas yang diprosikan dengan *risk-based capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba perusahaan reasuransi dengan proksi ROA (Suud, 2016). Temuan penelitian lainnya yang membuktikan pengaruh positif *book-tax differences* terhadap *earnings quality* yang melibatkan faktor kualitas audit dengan hasil yang tidak memediasi pengaruh *book-tax differences* terhadap *audit quality* yang juga melibatkan 77 perusahaan manufaktur selama tahun 2013-2017 (Ritonga, 2019). Faktor penentu risiko keuangan yang cukup banyak digunakan peneliti untuk menilai kinerja perusahaan adalah rasio profitabilitas dengan proksi *return on assets*.

Penetapan proksi laba perusahaan dalam riset ini menggunakan pengukuran *return on investment* (ROI) pada subjek penelitian sektor keuangan perusahaan asuransi, karena masih minimnya penelitian khususnya di Indonesia dengan melibatkan faktor-faktor risiko keuangan seperti risiko kredit dan risiko solvabilitas sehingga penelitian ini diharapkan dapat merepresentasikan kinerja dan kesehatan perusahaan serta kualitas laba yang dilaporkan atas keputusan investasi. Kualitas laba pada penelitian ini menggunakan pengukuran distribusi laba (Phillips, Pincus, & Rego, 2003). Tujuan penelitian ini adalah merumuskan faktor risiko kredit dan risiko solvabilitas dengan menambahkan faktor kualitas audit terhadap profitabilitas perusahaan serta implikasinya terhadap kualitas laba. Pemilihan subjek penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan asuransi kategori umum yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Saham perusahaan asuransi cukup diminati investor dalam pengambilan keputusan investasi sehubungan dengan pendapatan premi, premi bisnis baru dan premi lanjutan untuk perusahaan-perusahaan asuransi atau *rate of return* menjadi tolok ukur suatu investasi. Tantangan pada sektor industri asuransi umum ini dapat dijadikan peluang dengan semakin maraknya atau menjamurnya produk-produk asuransi online berbasis digital untuk pangsa pasar generasi milenial

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Teori

2.1.1. *Signalling Theory*

Teori sinyal (*signalling theory*) diperkenalkan oleh Spence pada tahun 1973 yang menjelaskan bahwa sinyal atau isyarat yang berasal dari pihak perusahaan sebagai pemilik informasi semaksimal mungkin akan memberikan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lainnya sebagai penerima informasi. *Signalling theory* merupakan perilaku seorang manajer yang memberikan petunjuk kepada investor atas prospek perusahaan di masa yang akan datang (Brigham & Houston, 2014). Sinyal dimaksud dapat berupa informasi bahwa perusahaan tersebut dinyatakan lebih baik dari perusahaan lain. Informasi keuangan yang dirilis oleh perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memberikan sinyal bagi investor yang terlebih dahulu dilakukan analisis dan interpretasi untuk pengambilan keputusan investasi.

2.1.2. *Risk-based capital* (RBC)

Risk-based capital (RBC) sebagai instrumen untuk mengukur solvabilitas atas rasio kecukupan modal menjadi tolok ukur atas kepentingan nasabah khususnya pada perusahaan-

perusahaan asuransi yang menjadi salah satu objek penting dalam penelitian ini. Menurut Pasal 3 ayat (2) dan (3) Salinan POJK menetapkan bahwa target tingkat solvabilitas internal serendah-rendahnya adalah 120 persen dari MMBR berdasarkan profil risiko perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi atas skenario perubahan (*stress test*) (OJK, 2016). Target tingkat solvabilitas ini pada setiap perusahaan sebagai alat untuk mengirimkan isyarat yang nyata kepada pasar mengenai keamanan *stakeholders*. Setelah menerima syarat maka pasar akan bereaksi terhadap keputusan investasi dan regulator akan memonitoring pada setiap perusahaan asuransi yang memiliki *risk-based capital* yang di bawah 120 persen.

2.1.3. Risiko Kredit

Teori Risiko pada dipandang sebagai sesuatu yang negatif, seperti bahaya, kehilangan, dan konsekuensi lainnya yang terjadi. Potensi kerugian yang menjadi ketidakpastian yang dipahami dan semestinya dikelola dengan baik yang tertuang dalam strategi perusahaan sehingga menjadi *value added* dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi (Lokobal, 2014, hal. 2).

Menurut SE-OJK No.24/SEOJK.05/2017 bagian II pada poin (1) huruf a, risiko kredit dapat dipahami sebagai potensi terjadinya kehilangan atau penurunan nilai aset yang disebabkan oleh: (1) kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan; (2). kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang (reasuradur) untuk memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan. Ketika mengelola risiko kredit, perusahaan asuransi terutama harus berupaya menghindari risiko konsentrasi (misalnya konsentrasi investasi dalam kategori investasi tertentu, tingkat rendah diversifikasi portofolio) dan berusaha keras untuk mencapai sebanyak mungkin diversifikasi dalam investasi mereka. Adanya risiko kredit adalah risiko kerugian finansial, terlepas dari realisasi jaminan agunan atau properti, yang dihasilkan dari kegagalan seorang debitur dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan (Sisay, 2017). Risiko kredit dapat menjadi potensi penurunan suatu aset atas kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau penanggung ulang (reasuradur) untuk memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Kerugian finansial akan muncul jika salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian polis dalam konteks perusahaan asuransi (Solomon, Muntean, & Alecsandri, 2012).

2.1.4. Risiko Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi biaya tetap jangka panjang dan mencapai ekspansi dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Rasio solvabilitas lebih dari dua puluh persen dianggap sehat secara finansial. Rasio solvabilitas yang tersedia berarti kelebihan nilai aset di atas nilai kewajiban asuransi dan kewajiban lain dari dana pemegang polis dan pemegang saham. Solvabilitas kategori asuransi sebagaimana dinyatakan melalui solvabilitas margin dan dengan demikian memberi kita gambaran tentang ukuran dan kondisi kecukupan modal perusahaan asuransi. *Solvency margin* adalah jumlah modal yang harus dipegang perusahaan asuransi untuk menutupi biaya yang mungkin terjadi karena terjadinya peristiwa yang tidak terduga (Nurfadila, Hidayat, & Sulasmiyati, 2015).

2.1.5. Kualitas Audit

Kualitas audit dapat dipahami dengan memisahkan antara pengertian kualitas dan audit. Audit didefinisikan atas pemeriksaan secara objektif yang dilakukan oleh seorang akuntan atas informasi keuangan organisasi yang bertujuan dalam menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan kinerja perusahaan (Tandiontong, 2016, hal. 159,67). Kantor akuntan dengan klasifikasi *Big Four* dianggap

memiliki kualitas jasa audit yang lebih baik dibandingkan dengan kantor akuntan publik dengan klasifikasi selain *Big Four*. Seorang auditor dituntut untuk memiliki independensi, kompetensi dan pertimbangan profesional dalam menilai keadaan entitas dan penilaian risiko perusahaan berdasarkan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) dalam bentuk opini atas laporan keuangan perusahaan yang dirilis oleh KAP. Banyak peneliti yang sependapat bahwa penggunaan audit yang berkualitas harus dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen dan menjadi kekuatan pemantauan (*monitoring strength*) (Tandiontong, 2016). Penggunaan audit yang berkualitas dapat dilihat dari penunjukan KAP *Big Four* dan KAP selain *Big Four*. KAP diyakini akan memberikan jasa attestasi maupun audit yang lebih independen dalam mengungkapkan praktik-praktik manajemen laba yang diterapkan oleh perusahaan dengan tujuan tertentu.

2.1.6. Kualitas Laba

Kualitas laba merujuk pada suatu ukuran untuk mengkonfirmasi apakah laba yang diperoleh sama dengan yang direncanakan sebelumnya. Kemampuan laba merefleksikan laba perusahaan yang sebenarnya dalam memprediksi laba periode mendatang dengan mempertimbangkan persistensi dan stabilitas laba (Surifah, 2010). Kualitas laba (*earnings quality*) yang tinggi merepresentasikan fundamental laba perusahaan yang relevan ditujukan kepada para pengambil keputusan (Dechow, Ge, & Schrand, 2010). Beberapa atribut yang digunakan untuk mengukur *earnings quality* meliputi persistensi (*persistence*), *value relevance*, kualitas akrual (*accruals quality*), prediktabilitas (*predictability*), *conservatism*, *smoothness*, *timeliness* serta pendekatan distribusi laba (Dechow, Ge, & Schrand, 2010; Phillips, Pincus, & Rego, 2003).

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu dan Hipotesis

Risiko kredit menjadi **dampak** dari suatu kegagalan dalam memenuhi suatu kewajiban kepada pihak tertentu sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Risiko kredit mencakup kegagalan pembayaran portofolio obligasi atas entitas asuransi. Likuiditas yang tinggi akan menghilangkan kebutuhan manajemen untuk meningkatkan kinerja operasional tahunannya pada perusahaan asuransi (Wani & Dar, 2015). Risiko kredit juga timbul karena ketidakmampuan atau keengganan pihak peminjam untuk mengeksekusi sesuai dengan yang telah dikomitmenkan sebelumnya sehingga pengendalian risiko kredit dapat dikurangi pada tingkat minimum pinjaman yang macet atas kinerja melalui tingkat pengembalian aset / *return on assets* (ROA) (Olalekan, Olumide, & Irom, 2018). Beberapa peneliti terdahulu menyatakan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank dan perusahaan asuransi (Sisay, 2017; Olalekan, Olumide, & Irom, 2018; Suryo, Rahayu, & Nurbaiti, 2016).

Risiko solvabilitas mencerminkan perbedaan atas pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagai akibat dari risiko yang timbul. Rasio solvabilitas dengan tingkat lebih besar dari 20 persen menggambarkan kinerja keuangan dinyatakan perusahaan pada industri asuransi properti mengungkapkan bahwa kekuatan perusahaan jauh akan lebih besar finansial perusahaan-perusahaan ketika menduduki rangking atas premi asuransi (Wani & Dar, 2015). Ketidakmampuan lembaga keuangan saat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya sehingga terjadi penghentian aktivitas atau likuidasi (Sisay, 2017). Risiko solvabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan melalui profitabilitas ROA dan ROE (Wani & Dar, 2015; Ullah, Faisal, & Zuhra, 2016; Bogar,

2016; Sisay, 2017). Oleh karena itu, hipotesis alternatif ke-1 dan ke-2 dinyatakan sebagai berikut:

H₁: Risiko Kredit berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas

H₂: Risiko Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas

Profitabilitas sebagai *outcome* kinerja perusahaan atas investasi diakhiri dengan *net income* sebagai *bottom-line* yang menjadibahkan bagi *stockholders* sebelum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi dan kesehatan perusahaan. Penetapan untuk memilih KAP *Big Four* maupun selain *Big Four* melibatkan seperangkat struktur pengendalian eksternal yang tertuang dalam *corporate governance*. Audit eksternal dalam menjalankan perannya secara efektif mempunyai 2 (dua) dimensi yaitu: standar umum dan standar pelaporan yang diukur dengan beberapa indikator yang mencerminkan kualitas audit (Merawati & Hatta, 2014). Temuan penelitian yang menguji kualitas audit *Big-4* terhadap profitabilitas perusahaan belum banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Pentingnya pengukuran kualitas audit ini untuk menguji profitabilitas perusahaan dirumuskan ke dalam hipotesis alternatif ke-3 berikut ini:

H₃: Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Profitabilitas

Profitabilitas untuk mengukur tingkat kualitas laba juga dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan dengan pendekatan *income smoothing* (perataan laba) secara positif (Lathifah, Hidayati, & Malikhah, 2018). Sementara pengukuran profitabilitas dengan pengembalian investasi masih menghasilkan nilai di bawah batas minimal atau dengan kata lain rasio profitabilitas ini memiliki hubungan yang sangat lemah yaitu 15 persen (Nurfadila, Hidayat, & Sulasmiyati, 2015). Temuan penelitian yang menguji kualitas laba dengan faktor profitabilitas dengan proksi ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan (Laoli & Herawaty, 2019). Pentingnya rasio profitabilitas ini untuk menguji kualitas laba dirumuskan ke dalam hipotesis alternatif ke- berikut ini:

H₄: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Kualitas Laba

Risiko keuangan yang diproksikan dengan *leverage* juga tidak mengkonfirmasi temuannya terhadap kualitas laba dengan pendekatan perataan laba (Lathifah, Hidayati, & Malikhah, 2018). Sementara variabel *Risk Based Capital (RBC)* berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Sumartono & Harianto, 2018). Oleh karena itu, hipotesis alternatif ke-5 dan ke-6 dinyatakan sebagai berikut:

H₅: Risiko Kredit berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laba

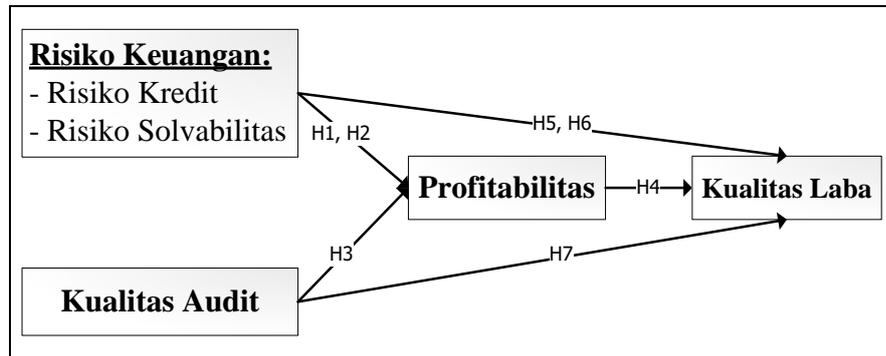
H₆: Risiko Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laba

Auditor dapat meningkatkan kepercayaan *stockholders* menggunakan standar profesional kerja yang bertujuan mengurangi risiko litigasi serta menjaga reputasi dengan memberikan jaminan atas *misstatement* dan kecurangan dalam laporan keuangan *auditee*. Pembatasan praktik kualitas laba ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan sinyal baik bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Kualitas audit mempunyai peran terhadap kualitas laba dengan arah positif (Aryengki, Satriawan, & Rofika, 2016), sementara dalam mendeteksi praktik manajemen laba yang menggunakan salah satu teknik pengukuran kualitas laba tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan menggunakan faktor ukuran KAP dengan proksi *The Big-4* dan lainnya (Ulina, Mulyadi, & Tjahjono, 2018). Temuan penelitian di atas yang mengkonfirmasi dan tidak mengkonfirmasi faktor kualitas audit

dengan pendekatan KAP *Big-Four* dan selain *Big-Four*, melatarbelakangi penggunaan kualitas audit yang difungsikan terhadap kualitas laba dengan rumusan hipotesis berikut ini:

H7: Kualitas Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laba

Berikut ini adalah model yang dirumuskan pada penelitian ini:



Gambar 3. Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mencoba melakukan pengukuran yang akurat terhadap perilaku, pengetahuan, opini, atau sikap (Indrawati, 2015, hal. 184). Penelitian ini menggunakan serangkaian observasi atau pengukuran hasilnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan sub sektor asuransi umum yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2014-2018. Prosedur sampling menggunakan metode *purposive*, yaitu dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018, hal. 126). Penetapan sampel penelitian ini dengan pertimbangan kriteria: (a) Perusahaan merupakan kategori asuransi umum; (b) Perusahaan *listing* di BEI berturut-turut selama periode pengamatan; dan (c) Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah (IDR) sebagai mata uang pelaporan dikonversikan ke dalam Kurs Tengah Bank Indonesia (BI).

Sampel awal perusahaan sub sektor asuransi yang terdaftar di BEI tahun 2018 sebanyak 15 (lima belas) perusahaan dengan mengeliminasi: (a) 2 perusahaan pada kategori asuransi jiwa, yaitu PT Asuransi Jiwa Syari'ah Jasa Mitra Abadi, Tbk. dan Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, Tbk.; (b) 1 perusahaan reasuransi, yaitu PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk.; dan (c) perusahaan yang *listing* sejak periode tahun 2017-2018 yaitu PT Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk. dan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. Akhirnya, hasil seleksi sampel menghasilkan 10 (sepuluh) perusahaan sub sektor asuransi umum pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Seleksi Sampel

Kode Saham	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
ABDA	Asuransi Bina Dana, Tbk.	06-Jul-1989
AHAP	Asuransi Harta Aman Pratama,	14-Sep-1990
AMAG	Tbk.	23-Dec-2005
ASBI	Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.	29-Nov-1989
ASDM	Asuransi Bintang, Tbk.	15-Dec-1989
ASJT	Asuransi Dayin Mitra, Tbk.	29-Dec-2003
ASMI	Asuransi Jasa Tania, Tbk.	16-Jan-2014
ASRM	Asuransi Kresna Mitra, Tbk.	19-Mar-1990
LPGI	Asuransi Ramayana, Tbk.	22-Jul-1997
VINS	Lippo General Insurance, Tbk.	28-Sep-2015
	Victoria Insurance, Tbk.	
10	Perusahaan	Jumlah

(Sumber: Data BEI, 2019)

Total pengamatan yang dilakukan untuk tahun penelitian yaitu 50 data observasi.

3.3. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel Risiko Kredit (X1) didefinisikan sebagai potensi risiko akibat adanya penurunan nilai atau kehilangan aset atas kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan serta kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang (reasurador) untuk memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Pengukuran risiko kredit dikalkulasikan dengan rumus berikut ini:

$$CR = \frac{\text{Premium Debtor} + \text{Due from Reinsurer's} + \text{Other Receivable}}{TA}$$

Keterangan:

CR = *Credit Risk*

TA = *Net Assets*

(Sisay, 2017, hal. 57)

Variabel Risiko Solvabilitas (X2) didefinisikan sebagai potensi risiko yang berdampak atas deviasi dalam pengelolaan kekayaan. Tingkat solvabilitas mengabaikan adanya jumlah kekayaan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah kewajiban dan modal yang disetor minimum (MMBR). Pengukuran risiko profitabilitas menggunakan proksi *risk-based capital* (RBC) yang merupakan satu parameter untuk mengukur kinerja kesehatan dan keamanan keuangan perusahaan.

Variabel Kualitas Audit (X3) menggunakan pengukuran *dummy variable*, yaitu pengkodean "1" dan "0" berdasarkan kategori Kantor Auditor *Big Four* dan selain *Big Four*. Jika perusahaan diaudit auditor *Big Four* diberi kode "1" dan apabila perusahaan diaudit auditor selain kategori *Big Four* diberi kode "0" (Oh, Park, & Hong, 2016).

Variabel Profitabilitas Perusahaan (Y1) didefinisikan sebagai efektivitas manajemen dalam konteks pengelolaan suatu investasi (Kasmir, 2016, hal. 201). Pengukuran profitabilitas

perusahaan menggunakan pendekatan *return on investment* (ROI) yang dikalkulasikan dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{Investment Income}}{\text{Average Fair Value of Investments}}$$

Keterangan:

$\text{Average FV of Investments} = \text{Beginning FV} + \text{Ending FV} / 2$
(Subramanyam, 2014, hal. 321)

Variabel Kualitas Laba (Y2) merupakan kualitas (*quality*) yang tinggi dan secara *faithfully* yang menggambarkan fundamental labaperusahaan bagiparastakeholders' (Dechow, Ge, & Schrand, 2010). Pengukuran kualitas laba menggunakan pendekatan *earnings allocation* yang dikalkulasikan dengan rumus berikut:

$$\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{it-1}}$$

Keterangan:

ΔE = Distribusi laba, jika nilai E = positif atau 0 maka perusahaan menghindari penurunan laba. Jika nilai E = negatif maka perusahaan menghindari pelaporan kerugian.

E_{it} = laba perusahaan i pada tahun t

E_{it-1} = laba perusahaan i pada tahun t-1

MVE_{it-1} = *Market value of equity* perusahaan i pada tahun t-1

(Phillips, Pincus, & Rego, 2003; Sumomba & Hutomo, 2012)

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan pengembangan model analisis regresi linear berganda yang telah dirumuskan sebelumnya berdasarkan teori. Hubungan kausalitas antar variabel penelitian yang dirumuskan dengan suatu model berdasarkan landasan teoritis yang bertujuan untuk menentukan pola hubungan tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis imajiner (Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program: IBM SPSS 23, 2017, hal. 237). Persamaan regresi yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu:

$$Y1 = \alpha + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 X3 + e1 \quad (1)$$

$$Y2 = \alpha + \beta_4 Y1 + \beta_5 X1 + \beta_6 X2 + \beta_7 X3 + e2 \quad (2)$$

Keterangan:

Y1 : Profitabilitas Perusahaan

Y2 : Kualitas Laba

α = Konstanta

β_1 = Koefisien jalur X1 dengan Y1

β_2 = Koefisien jalur X2 dengan Y1

β_3 = Koefisien jalur X3 dengan Y1

β_4 = Koefisien jalur Y1 dengan Y2

β_5 = Koefisien jalur X1 dengan Y2

β_6 = Koefisien jalur X2 dengan Y2

β_7 =Koefisien jalur X3 dengan Y2
 ϵ =Faktor Pengganggu (*error*)

Uji asumsi klasik sebagai langkah awal untuk memprediksi sampel yang diteliti dengan kriteria BLUE (*best linier unbiased estimator*) terbebas dari permasalahan normalitas, multikolinearitas heteroskedastisitas serta gangguan autokorelasi. Setelah lolos dari uji asumsi klasik, maka dapat dilanjutkan ke dalam uji hipotesis spesifikasi model yang digunakan apakah sudah benar atau tidak yang digunakan sebagai dasar model apakah berbentuk linier, kuadrat, kubik, inverse, *logarithmic*, *power*, *S*, *compound*, *growth* dan eksponensial dengan kriteria jika nilai $F_{-Stats} > F_{-Table}$ atau nilai signifikansi $\alpha < 0,05$, maka model dinyatakan linear (Ha diterima) (Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program: IBM SPSS 23, 2017, hal. 159). Selanjutnya uji koefisien determinasi total (R_m^2) dilakukan untuk mengukur kekuatan pengaruh yang terjadi antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model penelitian (Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program: IBM SPSS 23, 2017, hal. 239). Uji analisis jalur (*path analysis*) yang dimaksudkan untuk memprediksi sejauhmana kontribusi perubahan yang terjadi pada masing variabel independen terhadap besarnya variabel dependen baik secara langsung maupun melalui variabel intervening dalam pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dengan *multiple mediation model* dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan uji Sobel (*Sobel test*) dan *Bootstrapping* dalam bentuk *script* makro SPSS (Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program: IBM SPSS 23, 2017, hal. 243). *Sobel test* bertujuan untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) kepada variabel (Y) melalui variabel intervening (M). Pengaruh tidak langsung Variabel X ke Y melalui M dapat dihitung dengan cara mengalikan jalur (*path*) $X \rightarrow M$ (a) dengan jalur (*path*) $M \rightarrow Y$ (b) atau disingkat dengan “ab”. Koefisien $ab = (c - c')$, dimana “c” adalah pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M (Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program: IBM SPSS 23, 2017, hal. 236) [17]. Keseluruhan data diolah dengan software IBM SPSS Versi 24.00.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 2. Hasil Deskriptif Statistik
Descriptive Statistics**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	50	0,0814	0,6136	0,229442	0,1189992
X2	50	1,3087	10,6419	3,02231	2,1730141
X3	50	0	1	0,28	0,454
Y1	50	-0,2130	5,0500	0,452556	1,1272085
Y2	50	0	3,2998	-0,002287	0,6412138
Valid N (listwise)	50				

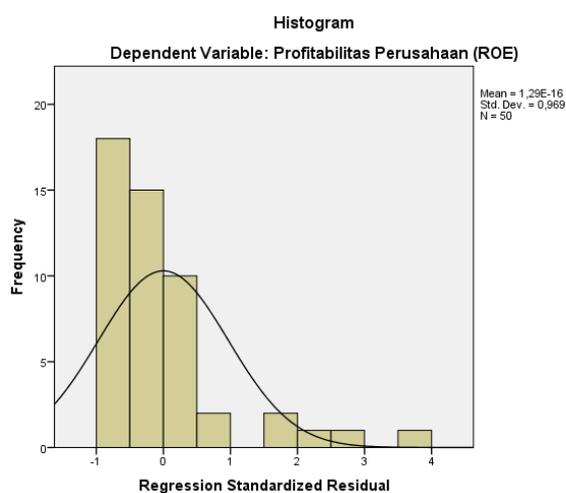
(Sumber: Output SPSS 23,00, 2020)

Risiko Kredit (X1) menghasilkan sebaran deskriptif yang berkisar antara skor 0,0814 dan 0,6136. Nilai rata-rata *credit risk* (CR) diperoleh sebesar 0,229442 dengan standar deviasi sebesar 0,1189992. Artinya, 50 data observasi pada perusahaan sub sektor asuransi umum yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 memiliki variasi data sampel yang cukup besar (perbandingan nilai rata-rata dengan standar deviasi lebih dari 30%).

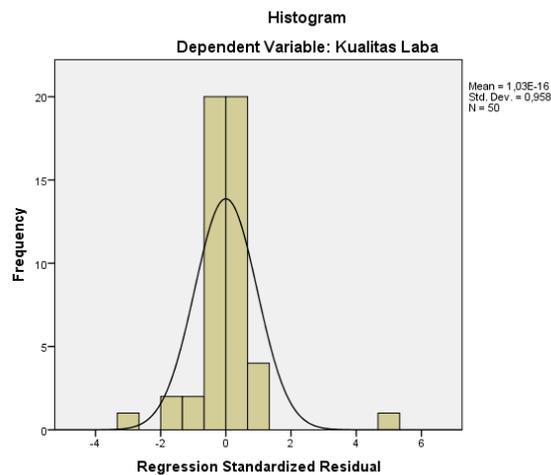
Risiko Solvabilitas (X2) menghasilkan sebaran deskriptif yang berkisar antara skor 1,3087 dan 10,64191. Nilai rata-rata *risk-based capital* (RBC) diperoleh sebesar 3,02231 dengan standar deviasi sebesar 2,1730141. Artinya, 50 data observasi pada perusahaan sub sektor asuransi umum yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 memiliki variasi data sampel yang cukup besar (perbandingan nilai rata-rata dengan standar deviasi lebih dari 30%).

Kualitas Audit (X3) menghasilkan sebaran deskriptif yang berkisar antara skor 0 dan 1. Nilai rata-rata diperoleh sebesar 0,28 dengan standar deviasi sebesar 0,454. Nilai 0,28 persen artinya perusahaan diaudit oleh KAP dengan kategori *Big-Four*. 50 data observasi pada perusahaan sub sektor asuransi umum yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 memiliki variasi data sampel yang cukup besar (perbandingan nilai rata-rata dengan standar deviasi lebih dari 30%).

4.2. Uji Asumsi Klasik



Gambar 4. Histogram Uji Normalitas ... (1)



Gambar 5. Histogram Uji Normalitas ... (2)

Grafik histogram pada model regresi 1 dan 2 menghasilkan nilai residual data menunjukkan kurva normal yang membentuk lonceng sempurna.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Nilai Tolerance	Nilai VIF
Model Regresi 1		
X1	0,841	1,189
X2	0,801	1,248
X3	0,932	1,073
Model Regresi 2		
X1	0,774	1,291
X2	0,684	1,463
X3	0,844	1,185
Y1	0,806	1,240

(Sumber: Data diolah SPSS 23,00, 2020)

Hasil uji multikolinearitas pada model regresi 1 dan 2 menghasilkan nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari skor 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua model regresi terbebas dari permasalahan multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Korelasi Spearman's Rho

Variabel Penelitian	Nilai Signifikansi
Model Regresi 1	
X1	0,338
X2	0,256
X3	0,076
Model Regresi 2	
X1	0,149
X2	0,981

X3	0,405
Y1	0,288

(Sumber: Data diolah SPSS 23,00, 2020)

Hasil uji korelasi *Spearman's Rho* pada model regresi 1 dan 2 dalam uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua model regresi terbebas dari permasalahan heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

	dU	dL	4-dU	dW
Model 1	1,6692	1,3989	2,3308	0,605
Model 2	1,7203	1,3535	2,2797	2,308

(Sumber: Data diolah SPSS 23,00, 2020)

Hasil uji autokorelasi menghasilkan nilai durbin watson pada kedua model regresi masing-masing sebesar 0,605 dan 2,308. Ketentuan uji autokorelasi mensyaratkan bahwa model regresi berada di antara nilai $du \leq dw \leq (4 - du)$. Nilai dW pada model regresi 1 berada pada $0 < d < dL$ yang artinya tidak ada autokorelasi positif, hal ini masih memiliki permasalahan autokorelasi sementara pada model regresi 2 berada pada $4 - du \leq d \leq 4 - dL$ yang artinya tidak ada korelasi negatif. Untuk mengatasi permasalahan autokorelasi dalam penelitian ini maka selanjutnya dapat kembali melakukan transformasi *cochrane orcutt* agar mendapatkan nilai koefisien autokorelasi *Rho* (ρ) pada masing-masing model regresi sebesar sebesar 0,689 dan -0,154 yang kemudian ditransformasi ke masing-masing variabel baru.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi
(setelah transformasi data)

	dU	dL	4-dU	dW
Model 1	1,6692	1,3989	2,3308	1,667
Model 2	1,7203	1,3535	2,2797	2,068

(Sumber: Data diolah SPSS 23,00, 2020)

Hasil uji autokorelasi pada model regresi 1 menghasilkan nilai durbin watson sebesar 1,630, hasil ini telah mendekati nilai di antara nilai $du \leq dw \leq (4 - du)$ sedangkan pada model regresi 2 menghasilkan nilai durbin watson sebesar 2,068 yang disyaratkan dalam ketentuan uji autokorelasi yaitu model regresi tidak menunjukkan adanya autokorelasi positif atau negatif.

4.3. Uji Hipotesis

Tabel 7. Rangkuman Hasil Uji Koefisien Determinasi Total (Rm^2)

	Nilai R	Nilai Adjusted R-Square	S.E. of the Estimate
Model Regresi 1	0,194	0,141	1,0445666
Model Regresi 2	0,021	-0,067	0,6621291

(Sumber: Output SPSS 23,00, 2020)

Hasil Perhitungan *Standar error of estimate* dari Model Regresi 1 dan 2:

$$\begin{aligned} Pe1 &= \sqrt{1-R^2} \\ &= \sqrt{1 - (0,194)} \\ &= \sqrt{0,806} \\ &= 0,8977 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Pe2 &= \sqrt{1-R^2} \\ &= \sqrt{1 - (0,021)} \\ &= \sqrt{0,979} \\ &= 0,9894 \end{aligned}$$

Berdasarkan total keragaman data yang dijelaskan oleh model regresi 1 dan 2 dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} Rm^2 &= 1 - p^2e_1 - p^2e_2 \\ &= 1 - (0,8977)^2 - (0,9894)^2 \\ &= 1 - (0,8059 - 0,9789) \\ &= 1 - 0,7889 \\ &= 0,2111 \end{aligned}$$

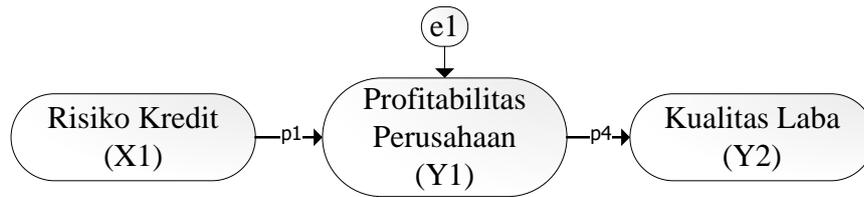
Tabel 8. Hasil Uji Analisis Jalur (*path analysis*) – Pengaruh Langsung

Jalur (Path)	Pengaruh antar Variabel	Nilai Standard ized Beta (β)	Nilai Signifikan si
p1	H ₁ : X ₁ → Y ₁	-2,727	0,052
p2	H ₂ : X ₂ → Y ₁	-0,216	0,007
p3	H ₃ : X ₃ → Y ₁	-0,750	0,033
p4	H ₄ : Y ₁ → Y ₂	0,000	0,999
p5	H ₅ : X ₁ → Y ₂	-0,820	0,369
p6	H ₆ : X ₂ → Y ₂	-0,025	0,632
p7	H ₇ : X ₃ → Y ₂	-0,066	0,771

(Sumber: Output SPSS 23,00, 2020)

Hasil uji *path analysis* hanya 2 (dua) yang memiliki probabilitas signifikansi yang lebih kecil dari (<) 0,05 yaitu p2 (X₂ → Y₁) dan p3 (X₃ → Y₁) sehingga menerima H₂ dan H₃, sisanya p1, p4, p5, p6 dan p7 memiliki probabilitas signifikansi yang lebih besar dari (>) 0,05 sehingga masing-masing menerima H₀. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hanya risiko solvabilitas dan kualitas audit yang terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas

perusahaan. Sementara, hasil dari pengujian hipotesis melalui analisis jalur (*path analysis*) pengaruh tidak langsung dijelaskan secara rinci sebagai berikut:



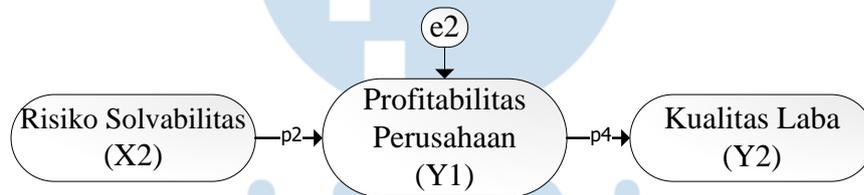
$$z = 0,8815, (p1 = -1,1195; p4 = 0,0198), sa = 1,3576; sb = 0,0829$$

Gambar 6. Pengaruh Risiko Kredit pada Kualitas Laba melalui Profitabilitas Perusahaan

Hasil *sobel test* pada bagian *indirect effect* terlihat pengaruh tidak langsung Risiko Kredit terhadap Kualitas Laba melalui Profitabilitas Perusahaan sebesar -0,6352 yang merupakan hasil perkalian koefisien antara $b(MX)$ atau jalur $p1$ dengan $b(YM.X)$. Nilai koefisien mediasi -0,0221 berada pada tingkat signifikansi 0,8815 yang lebih besar dari 0,05. Nilai *standard error* adalah 0,1484 sehingga nilai t hitung menjadi:

t	$= \frac{-0,0221}{0,1484}$
t	$= -0,1489$

Nilai t hitung ini adalah lebih kecil dari t tabel dengan signifikansi 5% yaitu sebesar 1,96 sehingga menolak H_8 . Variabel Profitabilitas Perusahaan tidak memediasi pengaruh Risiko Kredit terhadap Kualitas Laba.



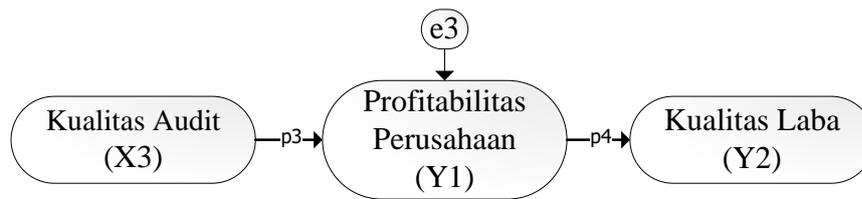
$$z = 0,7914, (p2 = -0,1250; p4 = 0,0264), sa = 0,0727; sb = 0,0854$$

Gambar 7. Pengaruh Risiko Solvabilitas pada Kualitas Laba melalui Profitabilitas Perusahaan

Hasil *sobel test* pada bagian *indirect effect* terlihat pengaruh tidak langsung Risiko Solvabilitas terhadap Kualitas Laba melalui Profitabilitas Perusahaan sebesar -0,0054 yang merupakan hasil perkalian koefisien antara $b(MX)$ atau jalur $p2$ dengan $b(YM.X)$. Nilai koefisien mediasi -0,0033 berada pada tingkat signifikansi 0,7914 yang lebih besar dari 0,05. Nilai *standard error* adalah 0,0125 sehingga nilai t hitung menjadi:

t	$= \frac{-0,0033}{0,0125}$
t	$= -0,264$

Nilai t hitung ini adalah lebih kecil dari t tabel dengan signifikansi 5% yaitu sebesar 1,96 sehingga menolak H_9 . Variabel Profitabilitas Perusahaan tidak memediasi pengaruh Risiko Solvabilitas terhadap Kualitas Laba.



$z = 0,8056, (p3 = -0,4902; p4 = 0,0260), sa = 0,3517; sb = 0,0845$

Gambar 8. Pengaruh Kualitas Audit pada Kualitas Laba melalui Profitabilitas Perusahaan

Hasil *sobel test* pada bagian *indirect effect* terlihat pengaruh tidak langsung Kualitas Audit terhadap Kualitas Laba melalui Profitabilitas Perusahaan sebesar -0,0304 yang merupakan hasil perkalian koefisien antara $b(MX)$ atau jalur $p3$ dengan $b(YM.X)$. Nilai koefisien mediasi -0,0128 berada pada tingkat signifikansi 0,8056 yang lebih besar dari 0,05. Nilai *standard error* adalah 0,0518 sehingga nilai t hitung menjadi:

t	$=$	$\frac{-0,0128}{0,0518}$
t	$=$	-0,2471

Nilai t hitung ini adalah lebih kecil dari t tabel dengan signifikansi 5% yaitu sebesar 1,96 sehingga menolak H_{10} . Variabel Profitabilitas Perusahaan tidak memediasi pengaruh Kualitas Audit terhadap Kualitas Laba.

Tabel 9. Rangkuman Hasil Uji-F

Model	df1	df2	Nilai F-Hitung	Probabilitas Signifikansi
1	3	46	3,687	0,018
2	4	45	0,236	0,917

(Sumber: Data diolah SPSS 23,00, 2020)

Nilai f -hitung pada model regresi 1 (sebelum moderasi) adalah sebesar 3,687 dengan nilai probabilitas 0,018 sehingga menolak H_0 , sementara nilai f -hitung pada model regresi 2 (setelah moderasi) adalah sebesar 0,236 dengan nilai probabilitas sebesar 0,917 sehingga menerima H_0 . Artinya Variabel Risiko Keuangan yang terdiri dari Risiko Kredit dan Risiko Solvabilitas serta Variabel Kualitas Audit berpengaruh secara simultan sebelum dimediasi oleh Profitabilitas Perusahaan terhadap Kualitas Laba sementara setelah dimediasi oleh Profitabilitas Perusahaan tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laba.

5. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, maka pembahasan hasil penelitian yang dimaksud dikaitkan dengan teori maupun hasil dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Hipotesis alternatif ke-1 menyatakan bahwa Risiko Kredit berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas Perusahaan memiliki koefisien regresi β_1 sebesar -2,727 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,052. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Risiko Kredit yang diukur berdasarkan *credit risk* terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perusahaan. Risiko kredit juga timbul karena ketidakmampuan debitur untuk mengeksekusi suatu komitmen pada tingkat minimum pinjaman yang macet atas kinerja melalui tingkat pengembalian aset / *return on assets* (ROA) (Olalekan, Olumide, & Irom, 2018). Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang direviu atas pengaruh negatif risiko kredit terhadap profitabilitas tetapi tidak secara signifikan (Sisay, 2017; Olalekan, Olumide, & Irom, 2018; Suryo, Rahayu, & Nurbaiti, 2016). Penelitian ini juga tidak membuktikan teori pensinyalan bagi investor atas keputusan investasi terkait dengan risiko keuangan sehubungan dengan tingkat kredibilitas perusahaan.
- b. Hipotesis alternatif ke-2 menyatakan bahwa Risiko Solvabilitas berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas Perusahaan memiliki koefisien regresi β_2 sebesar -0,216 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,007. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Risiko Solvabilitas yang diukur berdasarkan *risk-based capital* (RBC) terbukti berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas Perusahaan. Risiko solvabilitas terbukti instrumen untuk mengukur solvabilitas dan tolok ukur atas kepentingan nasabah khususnya pada perusahaan-perusahaan asuransi berdasarkan Salinan POJK dinyatakan bahwa Target Tingkat Solvabilitas internal ditetapkan paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR (OJK, 2016), hal ini diperkuat dengan analisis statistik deskriptif dengan skor RBC 130,87 persen. Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang direviu atas pengaruh negatif risiko solvabilitas terhadap profitabilitas secara signifikan (Wani & Dar, 2015; Ullah, Faisal, & Zuhra, 2016; Bogar, 2016; Sisay, 2017).
- c. Hipotesis alternatif ke-3 menyatakan bahwa Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perusahaan memiliki koefisien regresi β_3 sebesar -0,750 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,033. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kualitas Audit yang diukur berdasarkan kategori KAP *Big-Four* dan selain *Big-Four* tidak terbukti berpengaruh negatif melainkan berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perusahaan. Seorang auditor dituntut untuk memiliki independensi, kompetensi dan pertimbangan profesional dalam menilai keadaan entitas dan penilaian risiko perusahaan berdasarkan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) dalam bentuk opini atas laporan keuangan perusahaan yang dirilis oleh KAP. Berdasarkan data statistik deskriptif hanya 28 persen perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini diaudit oleh KAP *Big-Four*. Temuan penelitian ini dengan penelitian yang direviu yang membuktikan pengaruh positif audit eksternal terhadap kesehatan keuangan perusahaan (Merawati & Hatta, 2014).
- d. Hipotesis alternatif ke-4 menyatakan bahwa Profitabilitas Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laba memiliki koefisien regresi β_4 sebesar 0,000 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,999. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Profitabilitas Perusahaan yang diukur dengan *return on equity* terbukti berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kualitas Laba. Temuan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang membuktikan pengaruh positif profitabilitas dan nilai perusahaan terhadap praktik perataan laba (Lathifah, Hidayati, & Malikhah, 2018) sementara juga bertolak belakang dengan penelitian yang membuktikan pengaruh negatif profitabilitas yang diukur

- dengan *return on assets* terhadap kualitas laba dengan proksi total akrual (Laoli & Herawaty, 2019)
- e. Hipotesis alternatif ke-5, ke-6, dan ke-7 menyatakan bahwa Risiko Kredit, Risiko Solvabilitas dan Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laba memiliki koefisien regresi β_5 , β_6 dan β_7 masing-masing sebesar -0,820, -0,025 dan -0,066 dengan probabilitas signifikansi masing-masing sebesar 0,369, 0,632 dan 0,771. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Risiko Kredit, Risiko Solvabilitas dan Kualitas Audit terbukti berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Kualitas Laba. Temuan penelitian bahwa risiko keuangan dengan proksi *leverage* sejalan dengan tidak signifikannya terhadap kualitas laba dengan pendekatan perataan laba (Lathifah, Hidayati, & Malikhah, 2018). Sementara variabel *Risk Based Capital (RBC)* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Sumartono & Harianto, 2018) dan kualitas audit pada penelitian ini dengan proksi *Big Four* dan selain *Big Four* sejalan dengan tidak signifikannya terhadap kualitas laba dengan pendekatan *discretionary accruals (DA)* (Ulina, Mulyadi, & Tjahjono, 2018) sementara bertolak belakang dengan pengaruh positif kualitas audit terhadap kualitas laba (Aryengki, Satriawan, & Rofika, 2016).
 - f. Hipotesis alternatif ke-8, ke-9, dan ke-10 menyatakan bahwa Risiko Kredit, Risiko Solvabilitas dan Kualitas Audit yang dimediasi oleh Profitabilitas Perusahaan terhadap Kualitas Laba memiliki koefisien regresi β_8 , β_9 dan β_{10} masing-masing sebesar -1,195, -0,1250 dan -0,4902 dengan probabilitas signifikansi masing-masing sebesar 0,8815, 0,7914 dan 0,8056. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Risiko Kredit dan Risiko Solvabilitas. Sementara kualitas audit juga tidak dimediasi oleh Profitabilitas Perusahaan terhadap Kualitas Laba yang juga sejalan dengan tidak dibuktikan oleh variabel kualitas audit yang menjadi prediktor dalam pengukuran *book-tax differences* terhadap kualitas laba (Ritonga, 2019).

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi total (R_m^2) memberikan informasi untuk mengukur kekuatan pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap profitabilitas serta implikasinya pada kualitas laba dari kedua model regresi. Hasil perhitungan yang diperoleh dari Tabel 7 menunjukkan skor koefisien determinasi sebesar 0,2111 atau hanya 21,11 persen variabel dependen tersebut dipengaruhi oleh faktor risiko keuangan yaitu risiko kredit dan solvabilitas serta faktor kualitas audit sementara sisanya 78,89 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji ke dalam model penelitian ini. Hasil analisis ini dapat dinyatakan bahwa pengaruh Risiko Kredit, Risiko Solvabilitas dan Kualitas Audit terhadap Profitabilitas Perusahaan serta Implikasinya terhadap Kualitas Laba pada perusahaan sektor keuangan sub sektor asuransi umum yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2014-2018 dengan model yang sangat terbatas.

6. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Risiko kredit dengan pendekatan *credit risk* yang menggambarkan risiko kemungkinan adanya kehilangan atau penurunan nilai aset yang disebabkan oleh kegagalan debitur tidak berpengaruh signifikan baik secara langsung maupun yang dimediasi oleh profitabilitas perusahaan terhadap kualitas laba. Risiko solvabilitas dengan pendekatan *risk-based capital (RBC)* yang menggambarkan risiko kemungkinan yang timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba secara langsung maupun yang dimediasi oleh profitabilitas perusahaan terhadap kualitas laba. Kualitas audit dengan pengukuran kategori KAP *Big-Four* dan selain *Big-Four* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan

tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba secara langsung maupun yang dimediasi oleh profitabilitas perusahaan terhadap kualitas laba.

Penentuan sampel hanya terbatas pada sub sektor asuransi kategori umum yang lingkungannya sangat sempit dibandingkan dengan sektor keuangan dan keseluruhan perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, hasil penelitian ini juga dibuktikan dengan koefisien determinasi total (R^2) sebesar 0,2111 yang artinya masih banyak terdapat faktor-faktor lain yang tidak dilibatkan pada penelitian ini. Di samping itu, pada model pengukuran profitabilitas perusahaan dan kualitas laba menggunakan pendekatan ROE dan distribusi laba yang cenderung menghasilkan pengukuran yang sama sehingga hasil penelitian yang dimediasi oleh profitabilitas perusahaan juga tidak mampu membuktikan signifikansi temuan penelitian.

Agenda pada penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian pada sektor lainnya dan pengukuran profitabilitas perusahaan menggunakan pengukuran selain *return on equity* (ROE) serta menggunakan pengukuran kualitas laba dengan pendekatan lainnya seperti kualitas akrual (*accruals quality*), persistensi (*persistence*), prediktabilitas (*predictability*), *smoothness*, *value relevance*, *timeliness* dan *conservatism* (Dechow, Ge, & Schrand, 2010). Penambahan faktor-faktor lain untuk memprediksi Profitabilitas perusahaan serta dampaknya atas Kualitas Laba seperti pengukuran rasio keuangan serta faktor risiko dalam perhitungan MMBR pada Pasal 3 ayat (1) tentang Kesehatan Keuangan perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko asuransi dan risiko operasional (OJK, 2016).

7. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih pada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan serta Universitas Multimedia Nusantara yang memberi kesempatan untuk melakukan penelitian serta masukan-masukan dalam penyempurnaan isi artikel mengenai Risiko Keuangan, Profitabilitas dan Kualitas Laba Perusahaan.

REFERENSI

- Al Hafiz, M. P. (2018, Januari 11). Asuransi Jiwa Pada Tahun 2018, Masih Prospektif. Dipetik Januari 25, 2020, dari Marketeers #1 Marketing Media & Mice: <https://marketeers.com/54146-2/>
- Aldila, N., Jatmiko, L. D., & Hana, O. D. (2019, Pebruari 28). Rapor Merah Asuransi Jiwa: Terburuk 5 Tahun Terakhir. Dipetik Januari 25, 2020, dari <https://finansial.bisnis.com/read/20190228/215/894490/rapor-merah>
- Aryengki, R., Satriawan, R. A., & Rofika. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Industry & Chemical Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014. *JOM Fekon*, 3 (1), 2192-2206.
- Bank Indonesia. (2019). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Jakarta.
- Baskoro, F. M. (2018, Pebruari 15). Bagaimana Nasib Agen Asuransi di Era Revolusi Industri 4.0? Dipetik Januari 26, 2020, dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/478733/bagaimana-nasib-agen-asuransi-di-era-revolusi-industri-40>
- Bogar, S. (2016). Analisis Risk Base Capital (RBC) di Perusahaan Asuransi. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 7 (2), 54-70.

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Dalimunthe, D. A. (2019, Agustus 20). Meski bisnis asuransi tumbuh 20,6%, AAUI akui masih ada tantangan hingga akhir tahun. (Yoyok, Penyunt.) Dipetik Januari 25, 2020, dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/meski-bisnis-asuransi-tumbuh-206-aaui-akui-masih-ada-tantangan-hingga-akhir-tahun>

Dechow, P. M., Ge, W., & Schrand, C. M. (2010). Understanding Earnings Quality: A Review of the Proxies, Their Determinants and Their Consequences. *Journal of Accounting and Economics* , 50 (2-3), 344-401.

Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program: IBM SPSS 23 (VIII ed.)*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Indrawati. (2015). *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informatika*. Bandung: PT.Refika Aditama.

Intan, N. (2019, Maret 12). OJK: Investor Asing Gencar Masuk Pasar Asuransi Indonesia. (N. Zuraya, Editor) Retrieved Januari 25, 2020, from *Republika Berita Ekonomi*: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/19/03/12/po92ca383-ojk-investor-asing-gencar-masuk-pasar-asuransi-indonesia>

Kasmir, D. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Laoli, A. N., & Herawaty, V. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Growth, Leverage, Operating Cycle Dan Preduence Terhadap Kualitas Laba Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi. *Seminar Nasional Cendekiawan ke-5 Tahun 2019, Buku 2: "Sosial dan Humaniora"* (hal. 2.39.1-7). Jakarta: Lemlit Universitas Trisakti.

Lathifah, Hidayati, H. N., & Malikhah, H. A. (2018). Pengaruh Risiko Keuangan, Profitabilitas, dan Nilai Perusahaan terhadap Praktik Perataan Laba (Income Smoothing) (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015). 96-110.

Lokobal, A. M. (2014). *Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi di Propinsi Papua (Study Kasus Di Kabupaten Sarmi)*. *Jurnal Ilmiah Media Engineering* , 42, 109-118.

Merawati, E. E., & Hatta, I. H. (2014). Pengaruh Pengawasan Komite Audit, Audit Internal, Audit Eksternal terhadap Kesehatan Keuangan Perusahaan dan Dampaknya terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi* , XVIII (03), 335-349.

Nurfadila, S., Hidayat, R. R., & Sulasmiyati, S. (2015). Analisis Rasio Keuangan Dan Risk Based Capital Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi (Studi Pada PT. Reasuransi Indonesia (Persero) Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* , 22 (1), 2-9.

Oh, H., Park, S., & Hong, S. (2016). Effect of Corporate Governance on The Association between Book-Tax Differences and Audit Quality: Evidence from Korea. *The Journal of Applied Business Research* , 32 (4), 1097-1114.

OJK. (2017). *Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*.

OJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*.

Olalekan, L. I., Olumide, M. L., & Irom, M. (2018). Financial Risk Management and The Profitability An Empirical Evidence from Commercial Banks in Nigeria. *Sahel Analyst: Journal of Management Sciences* , 16 (2), 117-137.

Phillips, J., Pincus, M., & Rego, S. O. (2003). Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense. *The Accounting Review* , 78 (2), 491-521.

Ritonga, P. (2019). Pengaruh Book-Tax Differences Terhadap Earnings Quality serta Implikasinya pada Audit Quality. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan (Forbiswira)* , 9 (1), 23-34.

Sisay, D. (2017). The Effect of Financial Risk on Perfomance of Insurance Companies in Ethiopia. School of Graduates Studies, Accounting & Finance. Ethiopia: Addis Ababa University.

Solomon, D. C., Muntean, M., & Alecsandri, V. (2012). Assessment of Financial Risk in Firm's Profitability Analysis. *Economy Transdisciplinarity Cognition* , 15 (2), 58-67.

Subramanyam, K. (2014). *Financial Statement Analysis* (11th International Edition ed.). New York: McGraw-Hill.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sumartono, & Harianto, K. A. (2018). Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Di Indonesia dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *Future Jurnal Manajemen dan Akuntansi* , 6 (1), 1-14.

Sumomba, C. R., & Hutomo, Y. S. (2012). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. *KINERJA* , 16 (2), 103-115.

Surifah. (2010). Kualitas Laba dan Pengukurannya. *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi* , 8 (2), 31-47.

Suryo, M. G., Rahayu, S., & Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas Dan Risiko Tingkat Bunga Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *e-Proceeding of Management*, 3, hal. 3450-3457.

Suud, C. F. (2016). Pengaruh Underwriting dan Solvabilitas terhadap Laba Perusahaan Reasuransi. Skripsi, Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bandar Lampung.

Tandiontong, M. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Lafabeta.

The National Bank of Ethiopia (NBE). (2010). *Risk Management Guideline for insurance Companies in Ethiopia*. Retrieved Januari 25, 2020, from Addis Ababa: <https://nbebank.com/wp-content/uploads/2019/04/insurance-busines.pdf>

Ulina, R., Mulyadi, R., & Tjahjono, M. E. (2018). Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia. *Tirtayasa EKONOMIKA* , 13 (1), 1-26.

Ullah, G. M., Faisal, M. N., & Zuhra, S. T. (2016). Factors Determining Profitability of the Insurance Industry of Bangladesh. *International Finance and Banking* , 3 (2), 138-147.

Wani, A. A., & Dar, D. S. (2015). Relationship between Financial Risk and Financial Performance: An Insight of Indian Insurance Industry. *International Journal of Science and Research (IJSR)* , 4 (11), 1424-1433.

Worku, A., & Asmare, A. (2018). Determinants of Micro-Insurance Business Performance in Ethiopia. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies* , 4 (4), 160-172.

**PENGARUH *FREE CASH FLOW*, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, *RETURN ON ASSETS*, *CASH RATIO*, *DEBT TO EQUITY RATIO* DAN *FIRM SIZE* TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang
Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 –
2017)**

Elisa Tjhoa

Universitas Multimedia Nusantara

elisa.tjhoa@gmail.com

Diterima 21 April 2020

Disetujui 18 Mei 2020

Abstract- The company's decision on the distribution of dividend, as one of the returns expected by investors aside of capital gain, is an important decision due to its impacts on company's value and shareholders' wealth. The purpose of this research is to obtain empirical evidence regarding the determinants on Dividend Payout Ratio, namely Free Cash Flow, Company's Growth, Return on Assets, Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, and Firm Size (Empirical Study on Consumption Goods Industry Companies Listed on Indonesia Stock Exchange between 2015-2017). The samples in this study were selected through purposive sampling method and secondary data were analyzed through multiple linear regression methods. In total, 13 companies were used as samples. The result of this study showed Free Cash Flow, Cash Ratio and Firm Size partially have significant and positive effect towards Dividend Payout Ratio, and Company's Growth has significant and negative effect towards Dividend Payout Ratio. While Return on Assets and Debt to Equity Ratio has no significant effects toward Dividend Payout Ratio. Free Cash Flow, Company's Growth, Return on Assets, Cash Ratio, Debt to Equity Ratio and Firm Size simultaneously have significant effect toward Dividend Payout Ratio (DPR).

Keywords: *Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, Dividend Payout Ratio, Firm Size, Free Cash Flow, Growth, Return on Assets*

1. PENDAHULUAN

Dividen merupakan salah satu imbal hasil, selain keuntungan dari selisih harga beli dan jual atau capital gain, yang diharapkan oleh para investor dari investasinya pada suatu perusahaan. Pembagian dividen selalu dianggap memiliki efek yang positif terhadap nilai perusahaan, hingga pada tahun 1961 Modigliani dan Miller mencetuskan Dividend Irrelevance Hypothesis, di mana menurut hasil penelitian mereka pembagian dividen disebut tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Gordon dan Lintner (1962), yang berpendapat bahwa investor pada dasarnya tidak menyukai risiko, sehingga investor akan lebih menyukai return perusahaan dalam bentuk dividen yang lebih pasti, dibandingkan dengan capital gain yang masih belum pasti akan diperoleh (Bird in the Hand Theory). Perbedaan pendapat ini menjadi awal bagi munculnya penelitian-penelitian

terkait dividen, termasuk diantaranya faktor-faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi dividend payout suatu perusahaan.

Banyaknya penelitian yang dilakukan ternyata menunjukkan hasil yang berbeda-beda, hingga muncul istilah Dividend Puzzle yang dikemukakan oleh Black pada tahun 1976. Diantaranya hasil penelitian Kaźmierska-Jóźwiak (2015) pada perusahaan publik di Polandia yang menunjukkan bahwa kebijakan dividen dipengaruhi oleh leverage dan profitabilitas, dan tidak dipengaruhi oleh likuiditas, ukuran perusahaan dan risiko future earnings perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Bostanci, Kadioglu dan Sayilgan (2018) pada perusahaan yang terdaftar pada Turkish Stock Market menunjukkan bahwa keputusan pembagian dividen dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, market value, dan dividen pada periode sebelumnya. Di Indonesia hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda, diantaranya Widyawati dan Indriani (2019) pada penelitiannya atas perusahaan manufaktur salah satunya menyimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio tidak mempengaruhi kebijakan dividen secara signifikan, sementara Winarko (2017) yang juga meneliti perusahaan manufaktur menemukan bahwa Debt to Equity Ratio merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembagian dividen perusahaan, selain Cash Ratio dan Return on Assets.

Terlepas dari hasil penelitian sebelumnya yang memberikan hasil beragam, pengumuman pembagian dividen oleh manajemen perusahaan terbukti mampu menggerakkan respon pasar. Sebagai contoh, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) yang membagikan dividen tunai atas kinerja keuangan tahun 2018 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp13,63 triliun atau Rp117,2 per saham Adapun besaran dividen tersebut lebih tinggi dari laba bersih 2018 yang mencapai Rp 13,53 triliun karena menyertakan saldo laba tahun sebelumnya, sehingga lebih dari 100% laba bersih perusahaan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen (<https://investasi.kontan.co.id>). Dampak pengumuman pembagian dividen mendorong volume perdagangan dan harga saham HMSP meningkat. Sebelum pengumuman pembagian dividen per tanggal 8 Mei 2019, volume perdagangan berjumlah 18,92 juta lembar saham dengan harga penutupan Rp 3.360 per lembar saham. Per tanggal 9 Mei 2019 atau setelah pengumuman meningkat menjadi 66,87 juta (peningkatan lebih dari 250%) dengan harga penutupan meningkat menjadi Rp 3.550 per lembar (www.yahoofinance.com). Peningkatan volume perdagangan maupun harga saham menandakan bahwa pembagian dividen membuat para investor bereaksi dan merespon dengan memperjualbelikan saham atas perusahaan tersebut, sehingga pembagian dividen merupakan hal yang penting untuk diteliti.

Berdasarkan IAI (2018) dalam PSAK 23, dividen adalah distribusi laba kepada pemegang saham investasi ekuitas sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu. Dividen tunai adalah aliran kas yang harus dibayarkan perusahaan kepada para pemegang saham setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham (Husnan, 2012 dalam Widyasari dan Widyawati, 2017). Pembagian dividen tidak bersifat wajib, sehingga perusahaan dapat memilih apakah akan membagikan atau tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. Kebijakan dividen merupakan keputusan manajemen perusahaan apakah akan mendistribusikan laba bersih yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham, atau disimpan dalam bentuk saldo laba. Kebijakan dividen merupakan sebuah keputusan yang penting, karena dianggap dapat memberi sinyal kepada pasar tentang kondisi dan prospek perusahaan. Teori sinyal (Bhattacharya, 1979) menyatakan bahwa karena manajemen adalah pihak yang paling mengetahui kondisi investasi perusahaan dibandingkan dengan para pemegang saham, maka mereka menggunakan keputusan pembagian dividen sebagai cara untuk menyampaikan

informasi tersebut kepada pihak luar. Kebijakan dividen dianggap optimal saat kebijakan dividen dapat menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan perusahaan di masa depan, sehingga dapat mengoptimalkan harga saham.

Penelitian ini menggunakan Dividend Payout Ratio sebagai proksi atas kebijakan dividen perusahaan. Menurut Fitriati, Chabachib dan Muharam (2018), Dividend Payout Ratio menentukan porsi keuntungan yang akan dibagi kepada pemegang saham dan yang akan ditahan untuk digunakan sebagai modal operasi perusahaan pada periode selanjutnya. Payout ratio adalah pengukuran persentase laba bersih yang didistribusikan dalam bentuk dividen tunai (Weygandt, Kimmel dan Kieso, 2019). Rasio pembayaran dividen menentukan jumlah laba yang dibagi dalam bentuk dividen kas dan saldo laba sebagai sumber pendanaan (Kuniawan, Arifati dan Andini, 2016). Terdapat banyak faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam pendistribusian laba dalam bentuk dividen tunai. Penelitian ini memprediksi 6 faktor, yaitu Free Cash Flow, Pertumbuhan Perusahaan, profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets, likuiditas yang diukur dengan Cash Ratio, solvabilitas yang diukur dengan Debt to Equity Ratio, dan ukuran perusahaan atau Firm Size yang diukur dengan logaritma natural dari total aset.

Free Cash Flow merupakan sisa arus kas yang tersedia setelah perusahaan memenuhi kebutuhannya dalam berinvestasi pada proyek-proyek dengan net present value positif (Jensen, 1986). Free Cash Flow yang tinggi berarti manajemen memiliki fleksibilitas dalam penggunaan sisa kas tersebut, diantaranya dalam pembagian dividen, sehingga akan meningkatkan Dividend Payout Ratio. Penelitian Khan et al., (2017) pada perusahaan sektor manufaktur di Pakistan menunjukkan bahwa Free Cash Flow berpengaruh secara positif signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Sedangkan penelitian Kafata dan Hartono (2018) memperoleh hasil bahwa Free Cash Flow tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout Ratio.

Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan akan membutuhkan banyak dana untuk membiayai pertumbuhan tersebut. Dengan demikian perusahaan yang sedang bertumbuh dan berfokus pada ekspansi akan mengurangi proporsi keuntungan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham, sehingga berpotensi menurunkan juga tingkat Dividend Payout Ratio. Penelitian Afas, Wardiningsih dan Utami (2017) memperoleh hasil bahwa Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap Dividend Payout Ratio. Namun hasil penelitian Pribadi dan Sampurno (2012) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan perusahaan dan Dividend Payout Ratio.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang paling sering dikaitkan dengan pembagian dividen. Hal ini jelas karena dividen pada dasarnya merupakan pembagian keuntungan atau profit perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Penelitian ini menggunakan rasio Return on Assets (ROA) sebagai proksi dari profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi laba yang dapat dihasilkan perusahaan dari pengelolaan asetnya, sehingga potensi perusahaan dalam membagikan laba dalam bentuk dividen tunai juga akan semakin besar, dan dengan demikian meningkatkan Dividend Payout Ratio. Hasil penelitian Kusuma, Hartoyo dan Sasongko (2018) menunjukkan adanya pengaruh ROA yang positif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, namun penelitian Adnan, Gunawan dan Candrasari (2014) menunjukkan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout Ratio.

Dalam pembagian dividen, khususnya dividen tunai, manajemen perusahaan harus juga memperhatikan kecukupan kas perusahaan. Cash Ratio merupakan salah satu rasio likuiditas yang mengukur kemampuan kas yang dimiliki perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka pendeknya. Cash Ratio yang tinggi berarti kas yang tersisa setelah pembayaran utang lancar berpotensi untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, sehingga akan

meningkatkan Dividend Payout Ratio. Hasil penelitian Maura et al. (2019) memperoleh hasil bahwa Cash Ratio memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Sedangkan hasil penelitian Afas, Wardiningsih dan Utami (2017) menunjukkan bahwa Cash Ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout Ratio.

Selain modal yang disetorkan oleh para pemegang saham, pendanaan yang berasal dari utang kepada kreditor juga merupakan sumber pendanaan yang penting bagi perusahaan. Namun utang yang semakin tinggi akan meningkatkan juga risiko gagal bayar perusahaan, karena tingginya beban bunga maupun pokok utang yang harus dibayarkan, yang dapat berujung pada tuntutan hukum maupun kebangkrutan perusahaan. Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap ekuitas dari perusahaan (Kusuma, Hartoyo dan Sasongko, 2018). DER yang tinggi berarti ketergantungan perusahaan akan pendanaan dari kreditor juga tinggi, sehingga semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayarkan, dan laba bersih akan semakin kecil. Hal ini akan menyebabkan potensi pembagian dividen serta Dividend Payout Ratio semakin menurun. Winarko (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa Debt Equity Ratio berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, demikian juga penelitian Zulkifli, Endri dan Kurniasih (2017) memperoleh hasil yang serupa. Namun hasil penelitian Kusuma, Hartoyo dan Sasongko (2018) memperoleh hasil bahwa Debt Equity Ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Dividend Payout Ratio.

Menurut Rajan dan Zingales (1995) dalam Kaźmierska-Jóźwiak (2015), perusahaan berukuran besar cenderung lebih terdiversifikasi dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga lebih tidak rentan terhadap risiko kebangkrutan. Penelitian ini menggunakan pengukuran total aset sebagai dasar untuk ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar dapat menggunakan aset tersebut untuk meningkatkan produktivitas perusahaan yang diharapkan menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi, sehingga pembagian dividen juga akan semakin besar dan Dividend Payout Ratio meningkat. Penelitian Pribadi dan Sampurno (2012) menunjukkan bahwa Firm Size memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Namun penelitian Kaźmierska-Jóźwiak (2015) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Firm Size dengan Dividend Payout Ratio.

Hasil yang tidak konsisten pada beberapa faktor di atas terhadap keputusan pembagian dividen oleh perusahaan membuat peneliti mencoba mengkaji ulang pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap kebijakan dividen, khususnya pada perusahaan dalam sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 hingga 2017.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Teori

Dividen adalah pembagian laba kepada para pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki (Herawati, 2017). Menurut Weygandt, Kimmel dan Kieso (2019), terdapat 4 jenis dividen: *Cash Dividend*, adalah distribusi uang tunai secara pro rata kepada pemegang saham; *Share Dividend*, adalah distribusi saham secara pro rata kepada pemegang saham perusahaan; *Property Dividend*, merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk aset/barang, tidak dengan tunai ataupun saham; *Scrip Dividend* merupakan dividen yang dibayarkan dalam bentuk surat janji hutang. Diantara beberapa jenis dividen tersebut, dividen tunai atau *Cash Dividend* merupakan jenis dividen yang paling banyak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham.

Kebijakan dividen merupakan rencana tindakan perusahaan yang harus diikuti setiap kali membuat keputusan mengenai pembagian dividen (Gitman dan Zutter, 2015). Kebijakan dividen merupakan keputusan penempatan laba, apakah laba yang diperoleh perusahaan akan

dibagikan kepada investor sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk saldo laba untuk pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Saldo laba adalah sumber dana yang penting untuk pembiayaan pertumbuhan perusahaan (Fauziah, 2017). Menurut Margaretha (2005) dalam Fitri, Hosen dan Muhari (2016), masalah dalam kebijakan dividen memiliki dampak yang sangat penting karena memiliki dua efek yang berlawanan dan kepentingan yang berbeda. Di satu sisi, perusahaan perlu untuk mendanai perbaikan pada struktur modal dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan, selain itu perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan yang lebih besar kepada pemegang saham perusahaan dengan pembagian dividen. Kebijakan dividen optimal adalah kebijakan yang menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan perusahaan di masa depan, sehingga dapat memaksimalkan harga saham perusahaan.

Brigham dan Houston (2012) dalam Kusuma, Hartoyo dan Sasongko (2018) menyatakan bahwa terdapat 3 kelompok besar teori atas dividen, yaitu *Dividend Irrelevance Theory*, *Bird in the Hand Theory*, dan *Tax Preference Theory*. Pada *Dividend Irrelevance Theory*, Modigliani dan Miller (1961) berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya *Dividend Payout Ratio*, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak (*EBIT*) dan kelas risiko perusahaan, sehingga dividen tidak relevan untuk diperhitungkan karena tidak akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Kenaikan nilai perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau *earning power* dari aset perusahaan (Fauziah, 2017). Pendapat Modigliani dan Miller (MM) ini didasarkan pada asumsi kondisi pasar modal sempurna, tidak ada biaya pasar modal, dan tidak ada pajak. Pada realitanya, kondisi pasar tidak selalu sempurna dan terdapat *asymmetric information* yang berkaitan dengan *agency problem*. Teori keagenan (pertama kali dikemukakan oleh Jensen (1976) mengemukakan hubungan antara *principle* (pemilik) dengan *agent* (manajer) dalam hal pengelolaan perusahaan, dimana *principle* merupakan suatu entitas yang mendelegasi wewenang untuk mengelola perusahaan kepada pihak *agent* (manajemen). Teori keagenan menjelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham sering kali bertentangan sehingga dapat terjadi konflik (Tarjo dan Hartono, 2003 dalam Herawati, 2017). Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Manajer dapat membuat keputusan yang menguntungkan kepentingannya, namun berpotensi merugikan kepentingan *principal* maupun *stakeholders* lainnya (Fauziah, 2017). MM Model juga berpendapat bahwa pemegang saham akan indifferen terhadap *return* dari dividen maupun *capital gain* karena investor yang membutuhkan dana dapat menjual sahamnya kapanpun untuk mendapatkan dana yang diinginkan tanpa biaya (Khan *et. al.*, 2017). Namun pada kenyataannya transaksi penjualan maupun pembelian saham pada pasar modal selalu membutuhkan biaya transaksi. Asumsi tidak ada pajak juga sulit untuk diterapkan, karena pendapatan akan selalu dikenakan pajak, dan pemegang saham akan cenderung memilih jenis pendapatan dengan pengenaan pajak yang lebih kecil atau lebih rendah (Bostanci, Kadioglu dan Sayilgan, 2018).

Teori *Bird in the Hand* berawal mula dari Lintner (1956) Model, yang menyatakan bahwa manajemen cenderung enggan untuk merubah tingkat *dividend payout* perusahaan, dan hanya akan meningkatkan *dividend payout* jika manajemen yakin bahwa peningkatan tersebut dapat dipertahankan di masa depan. Dengan demikian *dividend payout* yang tinggi dapat diartikan perusahaan akan memiliki prospek keuangan yang baik di masa mendatang. Hal ini dapat dikaitkan dengan *Signaling Theory* oleh Bhattacharya (1979) yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak terkait perusahaan dibandingkan investor, dan kebijakan dividen digunakan sebagai salah satu cara untuk menunjukkan

informasi tersebut kepada para investor (Bostanci, Kadioglu dan Sayilgan, 2018). Berdasarkan *Bird in the Hand Theory* (Gordon dan Lintner, 1962), pemegang saham cenderung lebih memilih imbal hasil yang aman, sehingga dividen yang diperoleh saat ini dan tingkat risikonya lebih rendah akan lebih disukai dibandingkan dengan imbal hasil dari *capital gain* yang pendapatannya masih belum pasti (Livoreka *et al.*, 2014).

Tax Preference Theory diajukan oleh Litzenberger dan Ramaswamy (1979), yang menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan *capital gain*, para investor lebih menyukai *capital gain* karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan *dividend yield* yang tinggi dan *capital gain yield* yang rendah, daripada saham dengan *dividend yield* yang rendah dan *capital gain yield* yang tinggi (Fauziah, 2017). Menurut Khan *et al.* (2017), jika pemegang investor menerima *return* dalam bentuk dividen, maka mereka akan dikenakan pajak secara dobel, yaitu atas investasi mereka di perusahaan, dan atas penerimaan dividen, sehingga investor cenderung tidak menginginkan pembagian dividen dan ingin menginvestasikan kembali *return* dividen tersebut ke dalam perusahaan.

Menurut Livoreka *et al.* (2014), faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, sebagai berikut:

1. Faktor eksternal, terdiri dari:
 - a. *The overall economy* – pada kondisi perekonomian tidak pasti, maka manajemen akan cenderung menahan labanya dalam bentuk saldo laba, sebagai cadangan atas ketidakpastian bisnis di masa depan.
 - b. *Situation on capital market* – pada pasar modal stabil dan secara umum sering terjadi pergerakan dalam harga saham, maka kebijakan dividen perusahaan cenderung lebih liberal.
 - c. *Legal restrictions* – beberapa negara menerapkan aturan yang berbeda-beda terkait pembagian dividen. Biasanya pembagian dividen dapat bersumber dari laba tahun berjalan atau sisa laba tahun sebelumnya yang dicadangkan, namun pembagian laba yang bersumber dari modal pemegang saham umumnya tidak diperbolehkan.
 - d. *Contractual restrictions* – beberapa kreditur menetapkan pembatasan pembagian dividen untuk mengamankan pembayaran kewajiban perusahaan kepada pihak kreditur.
 - e. *Entries in capital market* – perusahaan besar dan memiliki laba yang stabil biasanya memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan tambahan modal. Namun bagi perusahaan kecil dengan akses yang lebih sulit, akan cenderung menyimpan labanya dalam bentuk saldo laba sebagai sumber tambahan modal di masa mendatang.
2. Faktor internal, terdiri dari banyak hal, diantaranya:
 - a. *Shareholders' expectations* – terdapat dua jenis imbal hasil yang diharapkan oleh pemegang saham, yaitu dividen dan *capital gain*. Investor yang lebih *risk averse* biasanya lebih memilih dividen karena pendapatan dari dividen lebih pasti, mengindikasikan kekuatan finansial perusahaan, dan untuk kebutuhan investor akan dana secara periodik.
 - b. *Fiscal situation of shareholders* – pemegang saham pada negara yang menetapkan pajak yang tinggi atas dividen akan lebih memilih untuk menunda atau bahkan mendapatkan *return* dalam bentuk selain dividen.
 - c. *Others* – diantaranya kondisi likuiditas perusahaan, kebutuhan dana untuk pembayaran utang, stabilitas saldo laba, dan banyak lainnya.

2.2. Pengembangan Hipotesis

Subramanyam (2014) menjelaskan bahwa *Free Cash Flow* menunjukkan jumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis setelah mencukupi kebutuhan pendanaan dan investasi untuk mempertahankan tingkat kapasitas produksi. Menurut Fadila (2017) dalam Wijaya, Yamasitha dan Oklahoma (2020), *Free Cash Flow* adalah sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan perusahaan pada akhir periode setelah membayar gaji, biaya produksi, tagihan, cicilan hutang berikut bunga, pajak, dan juga belanja modal. Dengan kata lain, manajemen perusahaan memiliki kebebasan dalam penggunaan dana *Free Cash Flow* karena semua kebutuhan pendanaan untuk operasional dan investasi yang menguntungkan telah tercukupi, salah satunya dapat digunakan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham. Semakin tinggi *Free Cash Flow* suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula fleksibilitas manajemen dalam membuat keputusan untuk membagikan dividen. Saat pembagian dividen lebih besar daripada laba yang diestimasikan dapat diperoleh investor, maka akan meningkatkan *Dividend Payout Ratio*. Penelitian Lucyanda & Lilyana (2012), Adnan, Gunawan & Candrasari (2014) menunjukkan bahwa *Free Cash Flow* berpengaruh secara positif signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Parsian dan Koloukhi (2014) pada perusahaan di Teheran, Iran menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara *Free Cash Flow* dan *Dividend Payout Ratio*, namun dengan arah negatif. Sedangkan penelitian Kusuma, Hartoyo dan Sasongko (2018) serta Wijaya, Yamasitha dan Oklahoma (2020) memperoleh hasil bahwa *Free Cash Flow* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Ha₁: *Free Cash Flow* berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan, maka akan membutuhkan banyak dana untuk membiayai pertumbuhan tersebut, misalnya untuk menambah kapasitas produksi, ataupun untuk melakukan perluasan usaha dengan mengakuisisi perusahaan lain. Semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, akan semakin besar juga kebutuhan dana untuk waktu mendatang untuk membiayai pertumbuhannya (Riyanto, 2001 dalam Adnan, Gunawan & Candrasari, 2014). Menurut D'Souza (2010) dalam Widyawati dan Indriani (2019), semakin besar proporsi dividen yang didistribusikan kepada pemegang saham, maka semakin besar pengurangan atas proporsi keuntungan yang digunakan perusahaan untuk investasi dan ekspansi bisnis. Dengan demikian perusahaan yang sedang bertumbuh dan berfokus pada ekspansi akan mengurangi proporsi keuntungan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Sesuai dengan *pecking order theory* (Myers dan Majluf, 1984), perusahaan akan memilih untuk mendanai kebutuhan pendanaan perusahaan dengan dana internal terlebih dahulu, sebelum mencari sumber pendanaan dari luar perusahaan, yaitu dengan menerbitkan utang maupun penjualan saham. Perusahaan yang sedang dalam fase pertumbuhan akan lebih memilih untuk menahan laba yang dihasilkannya untuk keperluan ekspansi, daripada membagikannya kepada para investor dalam bentuk dividen. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan, maka dividen tunai yang dibagikan akan semakin kecil. Jika dividen tunai yang didistribusikan kepada para pemegang saham lebih kecil daripada laba yang diestimasikan dapat diperoleh oleh para pemegang saham, maka *Dividend Payout Ratio* akan menurun. Penelitian Adnan, Gunawan & Candrasari (2014) memperoleh hasil bahwa Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap *Dividend Payout Ratio*. Namun hasil penelitian Laim, Nangoy dan Murni (2015) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan perusahaan dan *Dividend Payout Ratio*.

Ha₂: Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan operasional suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu (Weygandt, Kimmel dan Kieso, 2019). Menurut Mylen dan Marcus (2008) dalam Yasa dan Wirawati (2016), profitabilitas menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yang dapat diukur melalui jumlah laba operasi atau laba bersih perusahaan. Penelitian ini menggunakan rasio *Return on Assets (ROA)* sebagai proksi dari profitabilitas perusahaan. Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2018), *ROA* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan melalui penggunaan asetnya. *Return On Asset* menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar *ROA*, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang besar, dan sebaliknya (Sudana, 2011 dalam Winarko, 2017). *Return on Assets* yang tinggi berarti perusahaan semakin efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi laba bersih yang mampu dihasilkan, maka potensi perusahaan untuk mendistribusikan laba tersebut dalam bentuk dividen tunai akan semakin besar juga. Jika dividen tunai yang dibagikan lebih besar daripada laba yang diestimasikan dapat diperoleh pemegang saham, maka *Dividend Payout Ratio* akan meningkat. Hasil penelitian Widyasari dan Windyasari (2017), Muhammadinah dan Jamil (2015), serta Widyawati & Indriani (2019) menyatakan *Return on Assets* memiliki pengaruh signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio* dengan arah hubungan positif. Namun hasil penelitian Kurniawan, Arifati dan Andini (2016) menunjukkan bahwa *Return on Assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Ha₃: *Return on Assets* berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Likuiditas merupakan suatu evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Likuiditas juga dapat diartikan sebagai kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan, atau dapat diperoleh perusahaan dalam waktu cepat (Subramanyam, 2014). Menurut Yasa dan Wirawati (2016), likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Salah satu ukuran likuiditas perusahaan adalah *Cash Ratio*, yang mengukur kemampuan kas yang dimiliki perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka pendeknya. Menurut Kasmir (2012) dalam Susmiandini dan Khoirotunnisa (2017), *Cash Ratio* adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Sedangkan menurut Prihadi (2010) dalam Winarko (2017), kas adalah bagian paling likuid dari aset lancar, karena sebenarnya yang digunakan untuk membayar utang adalah kas. Oleh karena itu rasio kas (*cash ratio*) menawarkan perhitungan kemampuan kas untuk menutupi seluruh utang jangka pendek. Dividen pada dasarnya merupakan pembagian keuntungan perusahaan terhadap para investor. Namun dalam pembagian dividen, khususnya dividen tunai, manajemen perusahaan harus juga memperhatikan kecukupan kas perusahaan. Manajemen perusahaan harus mempertimbangkan antara ketersediaan kas perusahaan, dengan kebutuhan operasional perusahaan dalam membuat kebijakan dividen. Semakin tinggi *Cash Ratio*, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk melunasi utang lancarnya, sehingga kas yang tersisa setelah pembayaran utang lancar berpotensi untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham. Jika dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham lebih besar dari laba yang diestimasikan dapat diterima oleh para pemegang saham, maka *Dividend Payout Ratio* akan meningkat. Hasil penelitian Susmiandini dan Khoirotunnisa (2017) memperoleh hasil bahwa *Cash Ratio* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*, dan penelitian

Winarko (2017) juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan, namun dengan arah hubungan yang negatif. Sedangkan hasil penelitian Afas, Wardiningsih dan Utami (2017) menunjukkan bahwa *Cash Ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Ha4: *Cash Ratio* berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Selain modal yang disetorkan oleh para pemegang saham, pendanaan yang berasal dari utang kepada kreditor juga merupakan sumber pendanaan yang penting bagi perusahaan. Namun demikian, pendanaan yang berasal dari utang memiliki biaya berupa beban bunga, serta tempo pembayaran baik bunga maupun pokok utang yang mengikat secara legal. Utang yang semakin tinggi akan meningkatkan juga risiko gagal bayar perusahaan, baik atas bunga maupun atas pokok utang, yang dapat berujung pada tuntutan hukum maupun kebangkrutan perusahaan. *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan salah satu dari rasio *leverage* atau solvabilitas. Menurut Munawir (2010) dalam Sabri, Deviyanti dan Kurniawan (2017), rasio *leverage* yaitu rasio untuk mengukur sampai seberapa jauh aset perusahaan dibiayai dari utang. *Debt to Equity Ratio*, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan (Kasmir, 2017). Menurut Widyawati dan Indriani (2019), perhitungan *DER* bertujuan untuk mengetahui jumlah ekuitas yang tersedia sebagai cadangan untuk pembayaran kewajibannya, sehingga jika *DER* meningkat, maka perusahaan akan mengurangi distribusi dividen untuk meningkatkan cadangan tersebut. Semakin tinggi *DER*, maka dapat diartikan semakin tinggi ketergantungan perusahaan akan pendanaan dari kreditor, sehingga semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayarkan. Semakin besar beban bunga, maka laba bersih perusahaan akan semakin menurun. Jika laba perusahaan semakin kecil, maka potensi pembagian dividen kepada para pemegang saham juga akan semakin menurun. Ketika dividen tunai yang dibagikan lebih kecil dibandingkan dengan laba yang diestimasikan dapat diperoleh investor, maka *Dividend Payout Ratio* akan menurun. Yudiana dan Yadnyana (2016) dalam penelitiannya menyatakan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *Dividend Payout Ratio*, demikian juga penelitian Fitriati, Chabachib dan Muharam (2018) memperoleh hasil yang serupa. Namun hasil penelitian Afas, Wardiningsih dan Utami (2017) memperoleh hasil bahwa *Debt Equity Ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*.

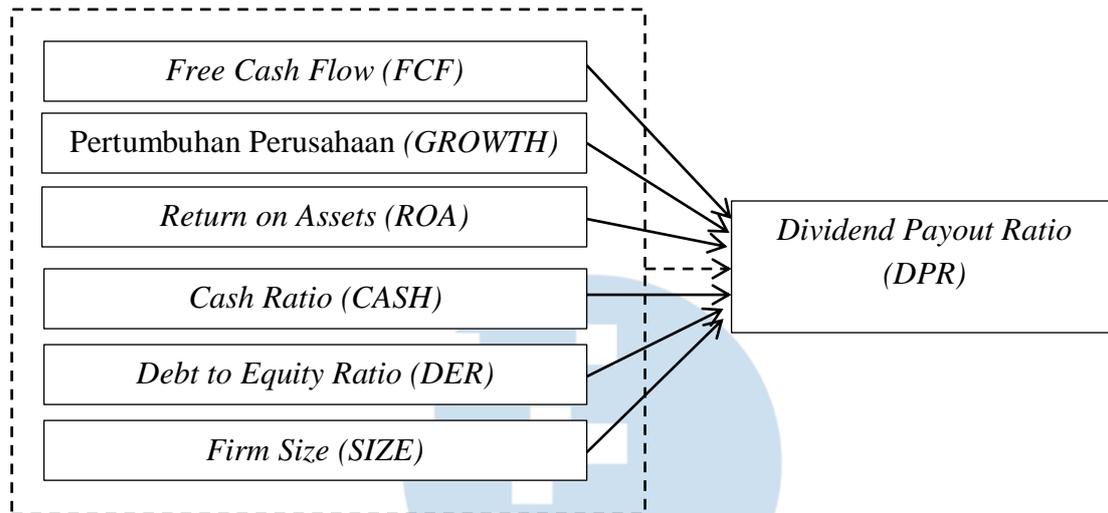
Ha5: *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Ukuran perusahaan atau *Firm Size* dapat diukur dengan beberapa hal, diantaranya total aset dan total pendapatan perusahaan (Kusuma, Hartoyo dan Sasongko, 2018). Penelitian ini menggunakan pengukuran logaritma natural dari total aset sebagai dasar untuk ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar, maka diharapkan dapat menggunakan total aset yang dimilikinya tersebut untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, sehingga pendapatan perusahaan juga diharapkan ikut meningkat. Pendapatan perusahaan yang meningkat, jika dibarengi dengan efisiensi beban, akan menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi. Selain itu, perusahaan dengan skala ukuran besar juga biasanya sudah berada dalam tahap *maturity*, memiliki tingkat keuntungan yang stabil dan tidak lagi berfokus pada pengembangan perusahaan yang membutuhkan biaya tinggi. Dengan laba bersih yang tinggi dan stabil, maka potensi manajemen dalam melakukan pembagian dividen juga akan semakin besar. Jika pembagian dividen tunai lebih besar dari laba yang diestimasikan dapat diperoleh para investor, maka *Dividend Payout Ratio* akan meningkat. Penelitian Fitriati,

Chabachib dan Muharam (2018) serta Bostanci, Kadioglu dan Sayilgan (2018) menunjukkan bahwa *Firm Size* memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap *Dividend Payout Ratio*. Namun penelitian Parsian & Koloukhi (2014) pada perusahaan publik di Teheran, Iran serta Afas, Wardiningsih dan Utami (2017) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara *Firm Size* dengan *Dividend Payout Ratio*.

Ha₆: *Firm Size* berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Berikut merupakan model penelitian pada penelitian ini:



Gambar 1. Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel dependen *Dividend Payout Ratio* dan 6 (enam) variabel independen yaitu *Free Cash Flow*, *Pertumbuhan Perusahaan*, *Return on Assets*, *Cash Ratio*, *Debt to Equity Ratio* dan *Firm Size* sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Rumus Pengukuran	Sumber
<i>Dividend Payout Ratio (DPR)</i>	$DPR = \frac{\text{Cash Dividend per Share}}{\text{Earnings per Share}}$	Subramanyam (2014)
<i>Free Cash Flow (FCF)</i>	$FCF = \frac{\text{Operating Cash Flow} - \text{Capex}}{\text{Total Assets}}$	Khan <i>et al.</i> (2017) Kafata & Hartono (2018)
<i>Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH)</i>	$GROWTH = \frac{\text{Total Assets}_t - \text{Total Assets}_{t-1}}{\text{Total Assets}_{t-1}}$	Pribadi dan Sampurno (2012)

<i>Return on Assets (ROA)</i>	$ROA = \frac{Net\ Income}{Average\ Total\ Assets}$	Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2019)
<i>Cash Ratio (CASH)</i>	$CASH = \frac{Cash\ \&\ Cash\ Equivalents}{Current\ Liabilities}$	Kasmir (2014)
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	$DER = \frac{Total\ Debt}{Total\ Equity}$	Ross et al. (2016)
<i>Firm Size (SIZE)</i>	Ln Total Aset	Kaźmierska-Jóźwiak (2015)

3.2. Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari laporan keuangan (*audited*) perusahaan-perusahaan dan terdapat di dalam *website* BEI (Bursa Efek Indonesia) yaitu www.idx.co.id maupun *website* perusahaan. Populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi, dengan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan. yaitu: (1) terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015 – 2017, (2) Melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember periode 2015 – 2018 dalam mata uang rupiah, (3) Membagikan dividen tunai dan menghasilkan laba setelah pajak yang positif berturut-turut untuk periode 2015 – 2017, (4) Tidak melakukan *share split/reverse share split* selama periode 2015-2017.

3.3. Teknik Analisis Data

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kenormalan dan kelayakan data untuk digunakan, dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda (*multiple regression analysis*) untuk menguji pengaruh antara variabel independen *Free Cash Flow*, *Pertumbuhan Perusahaan*, *Return on Assets*, *Cash Ratio*, *Debt to Equity Ratio* dan *Firm Size* terhadap variabel dependen *Dividend Payout Ratio*. Persamaan fungsi regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$DPR = \alpha + \beta_1 FCF - \beta_2 GROWTH + \beta_3 ROA + \beta_4 CASH - \beta_5 DER + \beta_6 SIZE + e$$

Keterangan :

a	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$	= Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen
DPR	= <i>Dividend Payout Ratio</i>
FCF	= <i>Free Cash Flow</i>
GROWTH	= <i>Pertumbuhan Perusahaan</i>
ROA	= <i>Return on Assets</i>
CASH	= <i>Cash Ratio</i>
DER	= <i>Debt to Equity Ratio</i>

SIZE = Firm Size
e = Variabel residual/error

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji koefisien determinasi (R^2) untuk menguji besarnya pengaruh seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, uji signifikansi simultan (*F statistic*) untuk menguji adanya pengaruh signifikan antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, serta uji signifikansi parameter individual (*t statistic*) untuk menguji adanya pengaruh signifikan antara variabel independen secara individual terhadap variabel dependen

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi untuk variabel *Dividend Payout Ratio (DPR)*, *Free Cash Flow (FCF)*, Pertumbuhan Perusahaan (*GROWTH*), *Return on Assets (ROA)*, *Cash Ratio (CASH)*, *Debt to Equity Ratio (DER)* dan *Firm Size (SIZE)* yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, *range* dan standar deviasi (tingkat penyimpangan). Tabel 4.1 menunjukkan hasil uji deskriptif sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPR	39	1.3062	.1514	1.4576	.527686	.2979713
FCF	39	.6105	-.1364	.4741	.086403	.1310880
GROWTH	39	.6611	-.0994	.5617	.115897	.1284935
ROA	39	.5164	.0362	.5526	.145394	.1269615
CASH	39	4.5908	.0323	4.6231	1.033200	1.1508573
DER	39	2.5785	.0761	2.6546	.806795	.6794535
SIZE	39	5.4952	26.6558	32.1510	29.200767	1.5949840

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang terdapat dalam Tabel 4.1 dari 39 observasi yang diamati, variabel *Dividend Payout Ratio (DPR)* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,5277 yang menjelaskan bahwa rata-rata perusahaan membagikan dividen tunai sebanyak 52,77% dari laba bersih yang diestimasikan dapat diperoleh pemegang saham. Variabel *Free Cash Flow (FCF)* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0864, yang dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi observasi dalam penelitian mampu menghasilkan *Free Cash Flow* sebesar 8,64% dari total asetnya. Nilai rata-rata untuk variabel *GROWTH* adalah sebesar 0,1159. Dapat diartikan bahwa secara rata-rata, total aset perusahaan yang menjadi observasi dalam penelitian bertumbuh sebesar 11,59% dari tahun sebelumnya. Rata-rata variabel *Return on Assets* adalah sebesar 0,1454, yang dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini mampu menghasilkan laba bersih sebesar 14,54% dari penggunaan total asetnya. Variabel *Cash Ratio (CASH)* memiliki nilai rata-rata sebesar 1,0332, yang dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini mampu melunasi liabilitas jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki sebanyak 1,03 kali. Dari hasil statistik deskriptif didapatkan nilai rata-rata untuk variabel *DER* adalah sebesar 0,8068 yang dapat diartikan bahwa rata-rata proporsi pendanaan yang dimiliki

oleh perusahaan memiliki total utang sebesar 80,68% dari total ekuitas. Nilai rata-rata untuk variabel *SIZE* adalah sebesar 29,2007. Dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi observasi dalam penelitian memiliki nilai aset sebesar logaritma natural 29,20 atau senilai Rp 16.091.027.786.606.

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.16739177
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.095
	Negative	-.084
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,095 dengan nilai signifikansi sebesar 0,200. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel telah terdistribusi secara normal.

4.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Hasil uji multikolonieritas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Collinearity Statistics		
		B	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.853		
	FCF	1.241	.236	4.246
	GROWTH	-.651	.749	1.334
	ROA	-.063	.272	3.670
	CASH	.067	.618	1.618
	DER	.098	.374	2.673
	SIZE	.041	.859	1.163

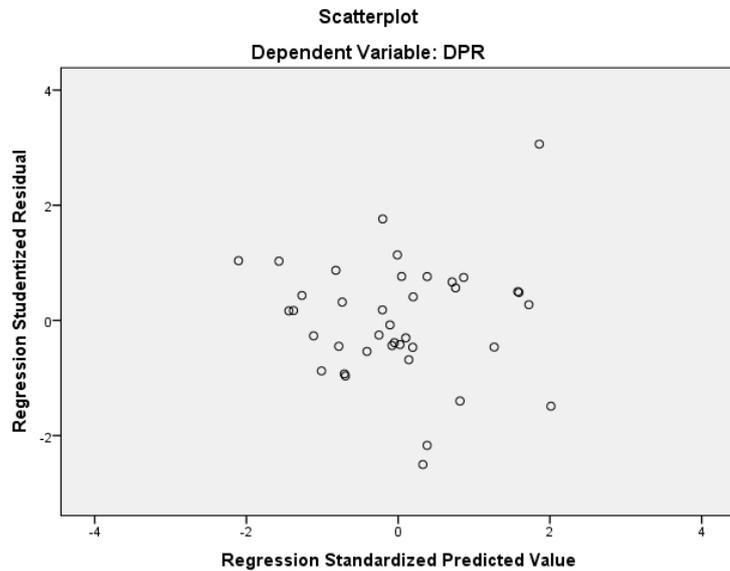
Hasil uji multikolonieritas pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan memiliki nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi yaitu variabel *Free Cash Flow (FCF)*, *Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH)*, *Return on Assets (ROA)*, *Cash Ratio (CASH)*, *Debt to Equity Ratio (DER)* dan *Firm Size (SIZE)*.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, heteroskedastisitas diuji dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Berikut merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas.

Gambar 4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan grafik *scatterplot* pada Gambar 4.1 terlihat bahwa titik-titik pada grafik menyebar secara acak dan tidak terdapat pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Berikut merupakan hasil uji autokorelasi dengan *Runs Test*:

Tabel 4.4

Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.02526
Cases < Test Value	19
Cases >= Test Value	20
Total Cases	39
Number of Runs	18
Z	-.645
Asymp. Sig. (2-tailed)	.519

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi yang ditunjukkan Tabel 4.4, diperoleh nilai tes -0.02526 dengan probabilitas 0.519 . Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa residual random dan tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Uji Signifikansi simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Berikut merupakan hasil dari uji statistik F:

Tabel 4.6
Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.309	6	.385	11.566	.000 ^b
	Residual	1.065	32	.033		
	Total	3.374	38			

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai F sebesar $11,566$ dengan tingkat signifikansi di bawah $0,05$ yaitu $0,000$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa *Free Cash Flow (FCF)*, *Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH)*, *Return on Assets (ROA)*, *Cash Ratio (CASH)*, *Debt to Equity Ratio (DER)* dan *Firm Size (SIZE)* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio (DPR)*. Untuk mengukur signifikansi ketepatan regresi fungsi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan *goodness of fit* yaitu membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Penelitian ini memiliki *degrees of freedom (df)* sebagai berikut, $\alpha = 0,05$, df regresi = 6 , dan df residual = 32 , sehingga didapatkan F tabel sebesar $2,40$. Maka F hitung $>$ F tabel ($11,566 > 2,40$). Dengan demikian fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual sudah tepat atau model *fit* karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel.

4.3. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel. Berikut adalah hasil uji koefisien korelasi:

Tabel 4.5
Hasil Uji Koefisien Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.827 ^a	.684	.625	.1824110

Berdasarkan Tabel 4.5, nilai koefisien korelasi (R) dalam penelitian ini sebesar $0,827$ atau $82,7\%$. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen yang terdiri atas *Free Cash Flow (FCF)*, *Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH)*, *Return on Assets (ROA)*, *Cash Ratio (CASH)*, *Debt to Equity Ratio (DER)* dan *Firm Size (SIZE)* dengan variabel dependen *Dividend Payout Ratio (DPR)* memiliki korelasi yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan nilai koefisien korelasi berada dalam klasifikasi diantara $0,80 - 1,00$.

Koefisien determinasi (R^2) juga digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4.5 nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,625 menunjukkan bahwa variabel *Free Cash Flow (FCF)*, *Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH)*, *Return on Assets (ROA)*, *Cash Ratio (CASH)*, *Debt to Equity Ratio (DER)* dan *Firm Size (SIZE)* dapat menjelaskan variabel *Dividend Payout Ratio (DPR)* sebesar 62,5% dan sisanya sebesar 37,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diujikan dalam penelitian ini. Nilai *standard error of estimate (SEE)* adalah sebesar 0,1824 yang dapat diartikan bahwa semakin kecil nilai *SEE* akan membuat model regresi dalam penelitian ini semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen yaitu *Dividend Payout Ratio (DPR)*.

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji statistik t:

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik t

Model		Coefficients	t	Sig.
1	(Constant)		-1.438	.160
	FCF	.546	2.667	.012
	GROWTH	-.281	-2.446	.020
	ROA	-.027	-.141	.889
	CASH	.259	2.048	.049
	DER	.223	1.373	.179
	SIZE	.222	2.071	.046

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 4.7, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$DPR = 0,546 FCF - 0,281 GROWTH - 0,027 ROA + 0,259 CASH + 0,223 DER + 0,222 SIZE + e$$

Keterangan :

DPR = *Dividend Payout Ratio*

FCF = *Free Cash Flow*

GROWTH = *Pertumbuhan Perusahaan*

ROA = *Return on Assets*

CASH = *Cash Ratio*

DER = *Debt to Equity Ratio*

SIZE = *Firm Size*

Berdasarkan hasil uji statistik t untuk variabel *Free Cash Flow (FCF)*, diperoleh nilai t sebesar 2.667 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012. Variabel *Free Cash Flow* memiliki nilai

koefisien regresi sebesar 0,546 yang dapat diartikan bahwa setiap penambahan satu satuan *Free Cash Flow* dapat meningkatkan *Dividend Payout Ratio* sebesar 0,546. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima yang dapat diartikan bahwa *FCF* berpengaruh signifikan positif terhadap *Dividend Payout Ratio (DPR)*. *Free Cash Flow* menunjukkan jumlah kas hasil operasional perusahaan yang bebas digunakan oleh manajemen setelah pembelanjaan modal (*capital expenditures*) yang dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan kapasitas produksinya. *Free Cash Flow* yang positif berarti terdapat sisa kas yang tersedia dan bebas digunakan oleh manajemen karena kebutuhan investasi perusahaan telah terpenuhi, diantaranya dapat digunakan untuk membagikan dividen tunai kepada para investor. Dengan demikian semakin tinggi *Free Cash Flow*, maka fleksibilitas dan potensi manajemen untuk membagikan dividen tunai semakin tinggi. Ketika dividen tunai yang dibagikan kepada para investor lebih besar daripada laba yang diestimasikan dapat diterima oleh para pemegang saham, maka *Dividend Payout Ratio* juga akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lucyanda dan Lilyana (2012), Adnan (2014), serta Khan *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa *Free Cash Flow* memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap *Dividend Payout Ratio*. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Kusuma, Hartoyo dan Sasongko (2018), Kafata dan Hartono (2018) serta Wijaya, Yamasitha dan Oklahoma (2020), yang menyatakan bahwa *Free Cash Flow* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Berdasarkan hasil uji statistik *t* untuk variabel Pertumbuhan Perusahaan (*GROWTH*), diperoleh nilai *t* sebesar -2.446 dengan nilai signifikansi sebesar 0,020. Variabel Pertumbuhan Perusahaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,281 yang dapat diartikan bahwa setiap penambahan satu satuan Pertumbuhan Perusahaan dapat menyebabkan penurunan *Dividend Payout Ratio* sebesar 0,281. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_{a2} diterima yang dapat diartikan bahwa *GROWTH* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio (DPR)*. Perusahaan yang sedang dalam fase pertumbuhan akan lebih banyak membutuhkan dana untuk ekspansi atau memperluas usahanya dibandingkan dengan perusahaan yang sudah pada tahap *maturity*. Dalam memilih sumber pendanaan, tentunya manajemen akan terlebih dulu memilih pendanaan dengan biaya yang lebih murah, yaitu pendanaan internal. Dengan demikian, laba yang diperoleh perusahaan akan lebih dialokasikan untuk mendanai pertumbuhan perusahaan, daripada dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen tunai. Dengan demikian, semakin tinggi pertumbuhan perusahaan, maka potensi pembagian dividen tunai akan semakin kecil. Jika pembagian dividen tunai lebih kecil dibandingkan dengan laba yang dapat diperoleh investor, maka *Dividend Payout Ratio* akan menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian penelitian Afas, Wardiningsih dan Utami (2017), dan Adnan, Gunawan & Candrasari (2014) yang menyatakan bahwa *Growth* berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *Dividend Payout Ratio*. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Laim, Nangoy dan Murni (2015) serta Pribadi dan Sampurno (2012) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan pertumbuhan total aset perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Berdasarkan hasil uji statistik *t* untuk variabel *Return on Assets (ROA)*, diperoleh nilai *t* sebesar -0,141 dengan nilai signifikansi sebesar 0,889. Variabel *Return on Assets* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,027 yang dapat diartikan bahwa penambahan satu satuan *Return on Assets* dapat menurunkan *Dividend Payout Ratio* sebesar 0,027. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_{a3} ditolak yang dapat diartikan bahwa *Return on Assets* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio (DPR)*. Semakin tinggi nilai *Return On Assets*, seharusnya berarti semakin efisien manajemen perusahaan mengelola aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga potensi perusahaan

membagikan dividen tunai meningkat dan jika pendistribusian dividen tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan laba yang diestimasikan dapat diperoleh investor, maka *Dividend Payout Ratio* akan ikut meningkat. Namun hasil penelitian ini menunjukkan hasil pengaruh yang tidak signifikan antara *Return on Assets* terhadap *Dividend Payout Ratio*. Pada penelitian ini, rata-rata sampel perusahaan memiliki *Return on Assets* hanya sebesar 14,54%, namun memiliki *Dividend Payout Ratio* yang cukup besar yaitu 52,77%, atau secara rata-rata perusahaan membagikan lebih dari setengah laba bersihnya kepada para investor dalam bentuk dividen tunai. Hal ini berarti dalam membuat keputusan pendistribusian dividen, profitabilitas perusahaan bukanlah menjadi pertimbangan utama, namun lebih melihat adanya ketersediaan kas perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil uji signifikansi dari faktor ketersediaan kas, baik dilihat dari *Free Cash Flow* maupun *Cash Ratio*, pada penelitian ini yang menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan kebijakan dividen perusahaan. Hasil penelitian Wijaya, Yamasitha dan Oklahoma (2020), Laim, Nangoy dan Murni (2015) serta Adnan, Gunawan & Candrasari (2014) juga tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara *Return on Assets* terhadap *Dividend Payout Ratio*. Namun hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Widyawati dan Indriani (2019) dan Winarko (2017) yang memperoleh hasil bahwa *Return on Assets* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Berdasarkan hasil uji statistik t untuk variabel *Cash Ratio (CASH)*, diperoleh nilai t sebesar 2,048 dengan nilai signifikansi sebesar 0,049. Variabel *Cash Ratio* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,259 yang dapat diartikan bahwa setiap penambahan satu satuan *Cash Ratio* dapat meningkatkan *Dividend Payout Ratio* sebesar 0,259. Tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t yang positif menunjukkan bahwa H_4 diterima yang dapat diartikan bahwa *Cash Ratio* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap *DPR*. Pembagian dividen tunai tentunya harus memperhatikan ketersediaan kas perusahaan. Manajemen harus memperhitungkan kebutuhan kas yang diperlukan untuk operasional sehari-hari perusahaan, misalnya utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Semakin tinggi *Cash Ratio* perusahaan, artinya semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimilikinya. Jika liabilitas jangka pendek telah dilunasi, maka potensi manajemen dalam membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham juga akan meningkat. Ketika pembagian dividen tunai yang meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan laba yang dapat diperoleh investor, maka *Dividend Payout Ratio* juga akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Susmiandini dan Khoirotunnisa (2017) dan Maura *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa *Cash Ratio* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*. Hasil penelitian Winarko (2017) juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara *Cash Ratio* terhadap *Dividend Payout Ratio* namun dengan arah hubungan yang negatif. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Afas, Wardiningsih dan Utami (2017) yang menyatakan bahwa *Cash Ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Berdasarkan hasil uji statistik t untuk variabel *Debt to Equity Ratio (DER)*, diperoleh nilai t sebesar 1.373 dengan nilai signifikansi sebesar 0,179. Variabel *Debt to Equity Ratio* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,223 yang dapat diartikan bahwa setiap penambahan satu satuan *Debt to Equity Ratio* dapat meningkatkan *Dividend Payout Ratio* sebesar 0,223. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_5 ditolak yang dapat diartikan bahwa *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*. Besarnya utang yang dimiliki perusahaan akan membuat beban bunga yang harus ditanggung perusahaan atas utang tersebut juga semakin besar. Tingginya beban bunga yang harus dibayarkan akan mengurangi kas yang

tersedia pada perusahaan, dan juga sebagai komponen pengurang laba. Semakin rendah laba bersih perusahaan, maka potensi perusahaan dalam membagikan dividen tunai kepada para investor akan semakin rendah. Penurunan potensi pembagian laba yang lebih rendah dibandingkan dengan laba yang diestimasikan dapat diperoleh para investor seharusnya akan membuat *Dividend Payout Ratio* menurun. Namun hasil penelitian ini memperoleh hasil yang berbeda, di mana *Debt to Equity Ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*. Hal ini dikarenakan pada sampel penelitian, rata-rata total liabilitas perusahaan didominasi oleh liabilitas jangka pendek, dengan proporsi utang jangka pendek dan jangka panjang sebesar 75,06% dan 24,94%. Utang jangka pendek biasanya merupakan *non-interest-bearing liabilities*, atau tidak memiliki beban bunga. Rendahnya liabilitas jangka panjang berarti bahwa beban bunga perusahaan juga akan rendah. Hal ini terbukti dari rata-rata beban bunga pada perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini hanya sebesar 1,04% dari total penjualan bersih perusahaan. Dengan demikian, liabilitas perusahaan tidak berefek pada pengurangan laba, dan tidak berefek pula pada potensi pembagian dividen tunai dan *Dividend Payout Ratio* perusahaan. Dari hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1 juga terlihat bahwa rata-rata *Debt to Equity Ratio* adalah sebesar 0,81, hal ini berarti secara rata-rata, sampel perusahaan pada penelitian ini lebih mengandalkan pendanaan yang bersumber dari ekuitas daripada liabilitas. Sehingga *Debt to Equity Ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusuma, Hartoyo dan Sasongko (2018), Widyawati dan Indriani (2019), serta Khan *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Debt to Equity Ratio* terhadap *Dividend Payout Ratio*. Namun hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Winarko (2017) dan Zulkifli, Endri dan Kurniasih (2017) yang menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* memiliki hubungan yang signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio* dengan arah hubungan negatif.

Variabel *Firm Size* (*SIZE*) memperoleh hasil uji statistik t sebesar 2,071 dengan nilai signifikansi sebesar 0,046. Variabel *Firm Size* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,222 yang dapat diartikan bahwa setiap penambahan satu satuan *Firm Size* akan menyebabkan kenaikan *Dividend Payout Ratio* sebesar 0,222. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_{a6} diterima yang dapat diartikan bahwa *SIZE* berpengaruh secara signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio* dengan arah hubungan positif. Pada penelitian ini, *Firm Size* atau ukuran perusahaan diukur dengan total aset perusahaan. Perusahaan menggunakan asetnya untuk kegiatan operasional dan produksi perusahaan, sehingga jika total aset perusahaan semakin besar, maka produktivitas perusahaan akan turut meningkat, yang akan meningkatkan juga pendapatan perusahaan. Pendapatan perusahaan yang meningkat, diiringi dengan efisiensi beban, maka akan meningkatkan laba bersih perusahaan. Laba bersih yang tinggi akan semakin meningkatkan potensi manajemen perusahaan dalam memutuskan pendistribusian dividen tunai. Ketika dividen tunai yang dibagikan lebih besar dari laba yang diestimasikan dapat diperoleh pemegang saham, maka *Dividend Payout Ratio* akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitriati, Chabachib dan Muharam (2018) serta Bostanci, Kadioglu dan Sayilgan (2018) yang memperoleh hasil bahwa *Firm Size* dapat mempengaruhi *Dividend Payout Ratio* secara signifikan dengan arah positif. Namun hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Kusuma, Hartoyo dan Sasongko (2018), Afas, Wardiningsih dan Utami (2017) serta Parsian dan Koloukhi (2014) yang menyatakan *Firm Size* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan, *Free Cash Flow*, pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan peningkatan total aset, profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets*, likuiditas yang diproksikan dengan *Cash Ratio*, solvabilitas yang diproksikan dengan *Debt to Equity*, serta ukuran perusahaan atau *Firm Size* yang diproksikan dengan logaritma natural total aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendistribusian laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai, yang diproksikan dengan *Dividend Payout Ratio*. Sedangkan secara parsial, variabel independen *Free Cash Flow*, *Cash Ratio* dan *Firm Size* menunjukkan hasil yang signifikan dengan arah positif dalam mempengaruhi *Dividend Payout Ratio*, dan variabel independen Pertumbuhan Perusahaan dapat secara signifikan mempengaruhi *Dividend Payout Ratio* dengan arah negatif. Namun variabel *Return on Assets* dan *Debt to Equity Ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio*. Terkait dengan *Bird in the Hand Theory* oleh Lintner (1956), yang menyatakan bahwa investor akan cenderung lebih menyukai pembagian dividen sebagai *return* yang sudah pasti diperoleh dibandingkan dengan *return* dari *capital gain* yang belum pasti, maka para investor maupun calon investor pada perusahaan subsektor barang konsumsi di Indonesia yang mengharapkan *return* dalam bentuk dividen tunai, dapat lebih memperhatikan perusahaan yang memiliki *Free Cash Flow*, *Cash Ratio* dan *Firm Size* yang tinggi, serta perusahaan dengan tingkat Pertumbuhan Perusahaan yang rendah hingga moderat.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 62,5%, atau variabel independen pada penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebanyak 62,5%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini. Sehingga penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya, misalnya umur perusahaan, struktur kepemilikan, *collateralizable assets*, dan sebagainya. Penelitian ini juga hanya mengambil objek perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2017, sehingga tidak dapat digeneralisasi terhadap seluruh perusahaan publik di Indonesia. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek penelitian pada sektor lainnya yang lebih luas, serta meningkatkan jumlah tahun penelitian. Selain itu penelitian berikutnya juga dapat mencoba menggunakan *tools* penelitian lainnya seperti *e-views* untuk mengestimasi data regresi panel.

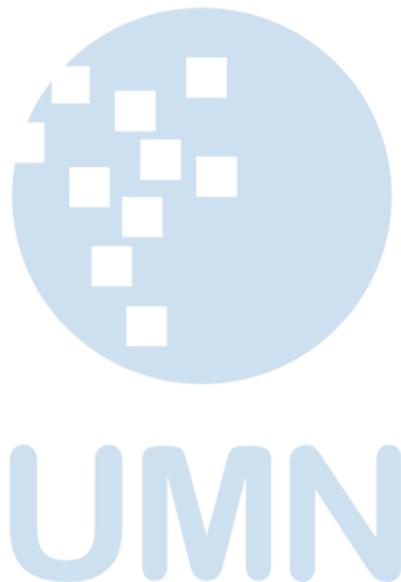
REFERENSI

- Adnan, M., A., Gunawan, B., & Candrasari, R. (2014). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Growth, Dan Free Cash Flow Terhadap Dividend Payout Ratio Perusahaan Dengan Mempertimbangkan Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening*. JAAI Volume 18 No. 2, Desember 2014: 89-100.
- Afas, A., Wardiningsih, S., S., & Utami, S., S. (2017). *Pengaruh Cash Ratio, Return On Assets, Growth, Debt To Equity Ratio, Firm Size, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Dividend Payout Ratio*. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 17 284 No. 2 Juni 2017: 284 – 299.
- Bostanci, F., Kadioglu, E., & Sayilgan, G. (2018). *Determinants of Dividend Payout Decisions: A Dynamic Panel Data Analysis of Turkish Stock Market*. Int. J. Financial Stud. 2018, 6, 93.
- Bulutoding, L., Parmitasari, R. D., & Dahlan, M. A. (2018, Desember 2). *Pengaruh Return on Assets (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap harga saham dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, 4(2).

- Fauziah, F. (2017). *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, dan Nilai Perusahaan Teori dan Kajian Empiris*. Kalimantan Timur: RV Pustaka Horizon.
- Fitri, R. R., Hosen, M. N., & Muhari, S. (2016, April). *Analysis of Factors that Impact Dividend Payout Ratio on Listed Companies at Jakarta Islamic Index*. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 6,2.
- Fitriati, I., R., Chabachib, M., & Muharam, H. (2018). *Analisis Pengaruh Return On Equity, Firm Size, Current Ratio Dan Institutional Ownership Terhadap Dividend Payout Ratio Dengan Debt To Equity Ratio Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vol 11, No 3, 2018, 174-190.
- Ganesh, S., & Suresh, M. (2018). *Dividend Payout Determinants: Indian Companies*. International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 118 No. 18 2018, 1529-1537.
- Ghozali, H. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gitman, L. J. & Zutter C. J. (2015). *Principles of Managerial Finance* (14 ed.). United States: Pearson Education.
- Herawati, F. E. (2017, Oktober). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Investment Opportunity Set Terhadap Dividend Payout Ratio*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(10).
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2018*. Jakarta: Selemba Empat.
- Kadioglu, E., & Yilmaz, E., A. (2017). *Is the free cash flow hypothesis valid in Turkey?*. Borsa Istanbul Review 17-2 (2017) 111 – 116.
- Kafata, A., A., A., & Hartono, U. (2018). *Pengaruh Free Cash Flow, Investment Opportunity Set, Dan Return On Asset Terhadap Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Sektor Mining Yang Terdaftar Di Bei Periode 2011-2015*. Jurnal Ilmu Manajemen Volume 6 Nomor 1.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kazmierska-Jozwiak, B. (2015). *Determinants of Dividend Policy : Evidence From Polish Listed Companies*. Procedia Economics and Finance 23 (2015) 473 – 477.
- Khan, R., & et al. (2017). *Determinants Of Dividend Payout Ratio: A Study Of Kse Manufacturing Firms In Pakistan*. Journal of Business Studies - JBS Vol.13 Issue.1, May 2017, 12-24.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting* (3 ed.). United States: Wiley.
- Kurniawan, E. R., Arifati, R., & Andini, R. (2016, Maret). *Pengaruh Cash Position, Debt Equity Ratio, Return on Asset, Current Ratio, Firm Size, Price Earning Ratio dan Total Asset Turnover Terhadap Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2007-2014*. Journal of Accounting, 2(2).
- Kusuma, P., J., Hartoyo, S., & Sasongko, H. (2018). *Analysis of Factors that Influence DPR of Coal Companies in Indonesia Stock Exchange*. Jurnal Dinamika Manajemen, 9 (2) 2018, 189-197.
- Laim, W., Nangoy, S., C., & Murni, S. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Lq-45 Bursa Efek Indonesia*. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.1129-1140.
- Livoreka, B., & et al. (2014). *Theories on Dividend Policy Empirical Research in Joint Stock Companies in Kosovo*. Procedia Economics and Finance 14 (2014) 387 – 396.

- Lucyanda, J., & Lilyana. (2012). *Pengaruh Free Cash Flow Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Dividend Payout Ratio*. Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 4, No. 2, September 2012 pp. 129-138.
- Maura, A., & et al. (2019). *Pengaruh Cash Ratio, Net Profit Margin (Npm), Dan Firm Size (Fs) Terhadap Dividend Payout Ratio (Dpr) Pada Perusahaan Sektor Infrastructure, Utilities, And Transportation*. Jurnal Ilmiah Socio Secretum. Volume 9 Nomor 1 tahun 2019, (Juni); 14-26.
- Muhammadinah, & Jamil, M. A. (2015). *Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover dan Return on Asset Terhadap Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI*. I-Economic Journal, 1(1).
- Parsian, H., & Koloukhi, A., S. (2014). *A study on the effect of free cash flow and profitability current ratio on dividend payout ratio: Evidence from Tehran Stock Exchange*. Management Science Letters 4 (2014) 63–70.
- Pribadi & Sampurno (2012). *Analisis Pengaruh Cash Position, Firm Size, Growth Opportunity, Ownership, Dan Return On Asset Terhadap Dividend Payout Ratio*. Diponegoro Journal Of Management Volume 1, Nomor 1, 2012, 212-211.
- Ross, S., & et al. (2016). *Fundamentals of Corporate Finance (Asia Global Edition)*. Singapura: McGraw-Hill.
- Sabri, F. H., Deviyanti, D. R., & Kurniawan, I. S. (2017). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Dividend Payout Ratio Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN*. Kinerja, 14(1), 24-30.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2018). *Research Methods for Business* (6 ed.). Wiley.
- Subramanyam, K. R. (2014). *Financial Statement Analysis* (11 ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Susmiandini, D., & Khoirotunnisa. (2017). *Pengaruh Cash Ratio terhadap Dividend Payout Ratio pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di BEI*. Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis Vol. 5 No. 3 2017, 121-130.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2019). *Financial Accounting 3e*. Wiley.
- Widyasari, H. R., & Widyawati, D. (2017, November). *Pengaruh Return on Asset, Debt to Equity Ratio dan Collateral Asset Terhadap Kebijakan Dividen*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(11).
- Widyawati, D., & Indriani, A. (2019). *Determinants of dividend payout ratio: evidence from Indonesian manufacturing companies*. Diponegoro International Journal of Business, Vol. 2, No. 2, 2019, pp. 112-121.
- Wijaya, R., A., Yamasitha, & Oklahoma, Z. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Struktur Kepemilikan, Collateralizable Assets, Free Cashflow Terhadap Dividend Payout Ratio Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Kontrol*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas Volume 22 No 1, Januari 2020, 157-171.
- Winarko, S., P. (2017). *Pengaruh Cash Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On Assets, Dan Tax Rate Terhadap Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri Vol. 2 No. 1, Maret 2017.
- Yasa, K. M., & Wirawati, N. P. (2016, Agustus). *Pengaruh Net Profit Margin, Current Ratio dan Debt to Equity Ratio Terhadap Dividend Payout Ratio*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16(2).
- Yudiana, I. Y., & Yadnyana, I. K. (2016, April). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, Investment Opportunity Set dan Profitabilitas Pada Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 15.1.

Zulkifli, Endri, & Kurniasih, A. (2017). *Determinan Internal Dividend Payout Ratio Perusahaan Farmasi Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 21(2): 238–252, 201



MAMPUKAH BADAN USAHA MILIK DESA MENERAPKAN KEADILAN PROSEDURAL?

Marryella Violetha Patiran¹

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
232016211@student.uksw.edu

Intiyas Utami²

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
intiyas.utami@student.uksw.edu

Diterima 1 Mei 2020

Disetujui 20 Mei 2020

Abstract- The objective of this research to explore the ability of Village-owned enterprise in realizing procedural justice. Village-Owned Enterprises should be able to provide justice for its members, but whether they are able to provide procedural justice to stakeholders, namely administrators and village communities. Research on Village-Owned Enterprises is mostly carried out in terms of governance in general, whereas specifically procedural justice has the potential to be investigated as part of governance implementation. This research was conducted with a qualitative method that traced the facts of procedural justice in the Karya Lestari Manunggal Village Company in Boyolali District. Data in the form of interviews with resource persons, namely the management of the Village Owned Enterprises and community representatives. The results of this study indicate that procedural justice cannot yet be fully realized in the Kalem Village-Owned Enterprises due to limited human resources. Conditions of procedural justice that can be realized in terms of the delivery of information in the Village Development Planning Consultation have been carried out. Procedural justice in village-owned enterprises still needs to be optimized by increasing the capacity of human resources. The Office of Community Empowerment in Boyolali District can provide more intensive training to improve human resources.

Keywords: *Village-Owned Enterprises, Procedural Justice*

1. PENDAHULUAN

Banyaknya penelitian yang dilakukan terhadap organisasi sektor swasta terhadap keadilan prosedural dalam manajemen tata kelola perusahaannya, memberikan ketertarikan untuk melihat penerapan keadilan prosedural dari organisasi sektor publik yaitu BUM Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kondisi keadilan prosedural di BUM Desa Kalem dari segi pengelola BUM Desa dan masyarakat desa. Penelitian dilaksanakan di BUM Desa Kalem karena usaha pengurus operasional BUM Desa yang berupaya untuk melibatkan masyarakat desa dalam berbagai aktivitas maupun kegiatan yang diselenggarakan BUM Desa Kalem. Penelitian menemukan bahwa keadilan prosedural belum sepenuhnya mampu menerapkan keadilan prosedural karena keterbatasan SDM.

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan mengakibatkan ketidakseimbangan pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat terutama di pedesaan. Jumlah desa yang tertinggal ialah sebesar 17.616 dari total 74.957 desa (www.kemendes.go.id). Dalam rangka menanggulangi hal tersebut, pemerintah berupaya dengan mengalokasikan dana desa atas pertimbangan luas wilayah desa, letak geografis desa, angka kemiskinan serta jumlah penduduk desa tersebut (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017). Pengelolaan dana desa kemudian akan dikelola dan diatur sendiri oleh desa yang dituju.

Pengelolaan dana desa harus dapat mengarah pada praktik tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban atas anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Konsep tata kelola perusahaan yang baik memiliki beberapa komponen yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan keputusan sehingga konsep ini dapat diterapkan oleh desa. Nahrudin (2014) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Arifuddin *et al.* (2017) mengungkapkan bahwa pemerintah yang baik harus mampu mengelola keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kedua penelitian tersebut memberikan hasil bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah diterapkan dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dan salah satu desa di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.

Nugrahaningsih *et al.* (2016); Sugiarti dan Yudianto (2017) mengungkapkan bahwa posisi desa sebagai fokus utama pembangunan memberikan suatu keharusan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dengan prinsip akuntabilitas. Kedua penelitian tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai misalnya penyediaan fasilitas teknologi informasi. Penggunaan dana desa yang optimal diharapkan dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi wilayah pedesaan. Optimalisasi penggunaan dana desa salah satunya dapat dilakukan dengan pengembangan badan usaha milik desa (BUM Desa) sebagai upaya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat desa.

Pendirian BUM Desa ditujukan bagi pengembangan potensi masyarakat berupa pengetahuan dan kreativitas yang dimiliki (www.berdesa.com). Dalam pengelolaan BUM Desa terdapat beberapa pihak yang ikut serta dalam penyertaan modal. Pasal 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa “Modal BUM Desa terdiri atas: a. penyertaan modal Desa; dan b. penyertaan modal masyarakat Desa” (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015:7). Hal ini berarti bahwa tidak hanya pemerintah saja yang berkontribusi dalam menyertakan modal bagi BUM Desa tetapi juga ada masyarakat desa yang turut serta dalam penyertaan modal tersebut. Oleh sebab itu, tidak boleh terdapat pemberian hak-hak yang istimewa yang dapat memunculkan intervensi berlebihan dari pihak tertentu. Intervensi dari pemerintah merupakan salah satu faktor penghambat bagi desa dalam mengeksplorasi potensi yang dimiliki. BUM Desa merupakan solusi yang tepat bagi upaya pengembangan perekonomian desa karena BUM Desa dibentuk untuk tidak mengalami intervensi dari berbagai pihak.

Di sisi lain, BUM Desa sebagai lembaga ekonomi seharusnya memiliki tata kelola yang baik karena BUM Desa juga beroperasi dalam rangka kepentingan publik. Artati dan Utami

(2020) menyatakan bahwa BUM Desa Bareng Nyawiji memiliki kemampuan dan kemauan untuk membuat laporan keuangan yang akuntabel tetapi ketidakdisiplinan pengelola BUM Desa dan faktor budaya Jawa menjadi penghambat akuntabilitas BUM Desa Bareng Nyawiji. Wulandari dan Utami (2020) menyebutkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban di BUM Desa Kalem dianggap tidak optimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUM Desa Kalem. Tantri dan Utami (2019) menemukan bahwa transparansi dan responsibilitas di BUM Desa Bersama Utama belum optimal karena adanya keterbatasan akses bagi masyarakat untuk melihat laporan keuangan BUM Desa dan adanya kelemahan dalam tahap penatausahaan.

Tata kelola organisasi yang tepat akan mendukung pengelolaan BUM Desa yang adil sehingga memberikan kepuasan bagi masyarakat desa. Pengelolaan organisasi yang adil dapat meningkatkan kinerja manajerial melalui penerapan keputusan-keputusan yang mewakili individu-individu yang berkepentingan (Syah, 2013). Pada BUM Desa, hal ini berarti penerapan keadilan menyebabkan masyarakat desa sebagai pihak yang berkepentingan dapat secara aktif berpartisipasi dalam pengelolaan BUM Desa. Partisipasi masyarakat desa merupakan hal yang penting bagi BUM Desa karena BUM Desa hadir untuk menguatkan instrumen kesejahteraan masyarakat dengan cara meminimalisir tingkat pengangguran di wilayah pedesaan (Budiono, 2015). Berkaitan dengan penerapan keadilan di BUM Desa, Cropanzano *et al.* (2011) membagi keadilan dalam organisasi menjadi tiga bagian yaitu keadilan distributif yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya, keadilan prosedural yang berhubungan dengan keadilan dalam pembuatan keputusan, serta keadilan interaktif yang mengacu pada hubungan antar pribadi dalam organisasi. Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan bahwa partisipasi dan kontribusi masyarakat desa merupakan hal yang penting dalam pengelolaan BUM Desa, maka BUM Desa sangat perlu untuk menerapkan keadilan prosedural dalam tata kelola organisasinya.

Josef (2017) menyatakan bahwa karyawan dapat bertindak kontraproduktif pada organisasi jika diperlakukan secara tidak adil dalam penerapan prosedur organisasi. Maspaitella *et al.* (2018) menyatakan bahwa keadilan dalam bentuk penerapan aturan yang tegas akan sejalan dengan rasa puas karyawan dalam bekerja. Clarke *et al.* (2013) mengungkapkan bahwa terdapat unsur ketidakadilan yang dirasakan karyawan terutama pada komponen keadilan dalam pemberian informasi yang memadai dan penilaian berdasarkan bukti. Ketiga penelitian tersebut memberikan penjelasan bahwa keadilan prosedural yang diterapkan dengan cara penerapan peraturan secara tegas, penilaian kinerja berdasarkan bukti, pemberian informasi yang memadai, serta diperlakukan adil oleh pimpinan organisasi akan berdampak positif pada kinerja dan sikap karyawan.

Irawan dan Sudarma (2016) menerangkan bahwa penerapan keadilan prosedural pada karyawan akan memberikan dampak positif bagi perusahaan karena hal tersebut memberikan rasa puas dalam bekerja sehingga menimbulkan komitmen afektif dalam diri karyawan. Bohle dan Alonso (2016) menemukan bahwa penerapan keadilan prosedural dapat menghilangkan rasa tidak aman ketika bekerja dan memberikan dampak yang baik pada perilaku karyawan. Hasil dari kedua penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan keadilan prosedural akan memberikan dampak yang baik bagi kelangsungan organisasi karena karyawan memberikan pengaruh yang positif melalui perilaku dan komitmennya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap peserta *Mental Health Court* (MHC), ditemukan bahwa penerapan keadilan prosedural dilakukan dengan cara melibatkan peserta MHC dalam pengambilan keputusan meski tidak semua pembuatan keputusan melibatkan peserta MHC (Canada dan Watson, 2013). Goodman-Delahunty *et al.* (2014) menyatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada praktisi berpengalaman yang

bekerja pada salah satu dari lima negara Asia Pasifik, keadilan prosedural diterapkan untuk mendapatkan informasi yang andal dan tujuan pekerjaan. Simcock (2016) menemukan bahwa keadilan prosedural dalam komunitas proyek yang diteliti diterapkan melalui pengambilan keputusan yang melibatkan pemangku kepentingan.

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Arifuddin *et al.* (2017); Nahrudin (2014); Nugrahaningsih *et al.* (2016); Sugiarti dan Yudianto (2017) merupakan riset yang membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang mengarah pada penerapan asas praktik tata kelola yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Artati dan Utami (2020); Tantri dan Utami (2019); Wulandari dan Utami (2020) adalah penelitian tentang penerapan tata kelola BUM Desa. Sedangkan riset yang dilakukan oleh Bohle dan Alonso (2016); Canada dan Watson (2013); Clarke *et al.* (2013); Cropanzano *et al.* (2011); Goodman-Delahunty *et al.* (2014); Irawan dan Sudarma (2016); Josef (2017); Maspaitella *et al.* (2018); Simcock (2016) merupakan penelitian yang menjelaskan bahwa penerapan keadilan prosedural dalam organisasi sektor swasta akan memberikan dampak yang positif pada respon dan perilaku karyawan. Keadilan prosedural juga diterapkan melalui keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam pembuatan keputusan. Riset-riset tersebut memberikan celah bagi penelitian ini untuk membahas penerapan keadilan prosedural di unit usaha desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Hal ini dikarenakan pengungkapan yang dilakukan terkait tindak keadilan prosedural telah banyak dilakukan pada organisasi sektor swasta. Sedangkan pada organisasi sektor publik yaitu BUM Desa, keadilan prosedural juga dapat diterapkan karena relevan dengan BUM Desa yang merupakan organisasi milik masyarakat desa. Dalam hal ini keadilan prosedural merupakan bagian dari proses penerapan keadilan dalam organisasi yang mengarah pada prinsip praktik tata kelola yang baik.

Desa Kemas, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali merupakan salah satu desa yang telah mendirikan BUM Desa pada tahun 2016 yang aktivitas operasional utamanya adalah pengelolaan tempat wisata. BUM Desa tersebut diberi nama Karya Lestari Manunggal (Kalem). Tempat wisata yang dikelola BUM Desa Kalem salah satunya ialah wisata edukasi yaitu belajar menanam padi, membuat jamu tradisional, membuat kerupuk dari kangkung, pergi ke tempat peternakan sapi dan masih banyak lagi. Selain itu, BUM Desa Kalem juga menyediakan wisata alam dan wisata kuliner dengan berbagai sarana yaitu kolam renang, pendopo, dan gazebo yang dikelilingi oleh tanaman hijau. Upaya pengelola BUM Desa Kalem dalam mengembangkan BUM Desa memberikan ketertarikan untuk meneliti penerapan keadilan prosedural di Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal. Hal ini dikarenakan upaya pengelola dapat mencerminkan usahanya dalam melibatkan peran aktif masyarakat desa yang sesuai dengan konsep keadilan prosedural dalam menerapkan prosedur yang tidak bias dan mengutamakan pihak-pihak yang berkepentingan.

1.2. Rumusan Masalah

BUM Desa merupakan badan usaha yang didirikan dalam rangka mengoptimalkan potensi wilayah pedesaan. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat desa sangat diperlukan guna mencapai tujuan berdirinya BUM Desa yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Tata kelola yang baik akan membantu BUM Desa dalam mencapai tujuannya. Keadilan prosedural merupakan salah satu unsur dari kesetaraan dan kewajaran dalam tata kelola yang harus diterapkan BUM Desa. Penerapan keadilan prosedural pada BUM Desa akan menjelaskan upaya pengurus operasional BUM Desa untuk meningkatkan peran aktif masyarakat desa dalam pengelolaan BUM Desa. Melalui penerapan keadilan prosedural juga akan menunjukkan respon masyarakat desa atas upaya yang dilakukan pengurus operasional BUM Desa. Terdapat tiga komponen keadilan prosedural di antaranya pemberitahuan yang memadai, penyampaian yang adil, dan penilaian berdasarkan bukti.

1.3. Manfaat Penelitian

Selanjutnya, kontribusi dalam penelitian ini ialah bagi pengelola BUM Desa beserta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan yang berkaitan dengan BUM Desa sehingga kebijakan yang ditetapkan mampu berdampak pada keterlibatan masyarakat desa. Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini ialah menambah wawasan dalam konsep keadilan prosedural dari segi organisasi sektor publik yaitu BUM Desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan usaha milik desa merupakan sebuah unit usaha yang dibangun dan didirikan oleh pemerintah desa yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa (Ramadana *et al.*, 2013). BUM Desa dibentuk berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa (Farokhah dan Sapoeira, 2018). Pendirian badan usaha milik desa merupakan langkah utama dalam menciptakan kemandirian perekonomian desa serta salah satu upaya pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan yang terjadi di wilayah pedesaan (Hayyuna *et al.*, 2014; Kasila dan Kolopaking, 2018). Selanjutnya, pembangunan BUM Desa dilakukan atas gagasan pemikiran masyarakat desa serta bentuk penyertaan modal dapat berasal dari masyarakat desa, pemerintah desa, bantuan pemerintah kabupaten, maupun dengan melakukan peminjaman dana ke pemerintah desa atau pihak lainnya (Shaffitri *et al.*, 2015). Dalam melaksanakan kegiatan operasional, BUM Desa harus dapat memberikan pelayanan yang tidak berat sebelah dan selalu dapat mempertahankan kualitas dari produk ataupun jasa yang dijual (Iskamto *et al.*, 2018).

BUM Desa memiliki peran sebagai instrumen dalam menguatkan otonomi desa dan instrumen kesejahteraan masyarakat. Instrumen otonomi desa berarti bahwa BUM Desa membantu mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan instrumen kesejahteraan masyarakat berarti bahwa BUM Desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan organisasinya sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi (Budiono, 2015). BUM Desa juga sangat berguna bagi pemanfaatan produk lokal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan karena masyarakat desa memiliki sumber penghasilan tambahan dan kepastian harga dapat terjamin (Suryana *et al.*, 2015). Hal ini berarti bahwa BUM Desa merupakan unit usaha yang dibangun dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah pedesaan dengan melibatkan peran aktif masyarakat desa melalui pemanfaatan produk lokal.

Sehubungan dengan pengertian, tujuan, dan manfaat dari BUM Desa, pembentukan BUM Desa yang bermula dari musyawarah desa memberikan susunan kepengurusan di dalam organisasi tersebut. Pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa "Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari: a. Penasihat; b. Pelaksana operasional; dan c. Pengawas". Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa "BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan". Hal ini berarti bahwa dalam susunan kepengurusan tersebut, BUM Desa dapat membawahi setiap unit-unit usaha yang beroperasi (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015:5-8).

2.2 Keadilan Prosedural dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa

Tata kelola perusahaan yang baik adalah rancangan dalam organisasi yang berguna untuk menaikkan nilai perusahaan melalui pengawasan kinerja dan menjaga akuntabilitas manajemen yang berdasarkan pada peraturan (Pahlawan *et al.*, 2018). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan dasar dalam pengelolaan suatu usaha dan bertujuan agar dapat mendorong pengelolaan organisasi yang profesional, transparan, akuntabilitas, adil, serta dapat dipercaya dan bertanggung jawab (Septiawan, 2018). Negrut *et al.* (2010) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan konsep yang memperhitungkan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan, kebutuhan, dan permintaan mereka serta bertujuan untuk kepentingan umum.

Sejalan dengan pengertian tata kelola perusahaan yang baik, BUM Desa sebagai organisasi sektor publik juga memiliki tata kelola dalam organisasinya. Tata kelola BUM Desa merupakan seperangkat peraturan yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Tata kelola tersebut dirancang dengan tujuan agar BUM Desa mampu bekerja secara profesional serta mampu mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggaran yang telah direalisasikan. Pelaksanaan tata kelola pada BUM Desa harus dapat mengarah pada prinsip praktik tata kelola yang baik. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan jaminan terhadap pelaksanaan prinsip praktik tata kelola yang baik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tertib, setara, dan taat pada peraturan perundang-undangan (Prasojo *et al.*, 2014).

Perlakuan yang setara (*fairness*) menjelaskan bahwa para pengelola usaha harus dapat memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara (Agoes dan Ardana, 2014). Perlakuan yang adil pada pemangku kepentingan dapat dikategorikan sebagai keadilan prosedural yaitu bentuk penerapan proses yang konsisten, beretika, bebas dari bias, akurat, dan representatif dari pemangku kepentingan yang relevan. Keadilan prosedural merupakan bagian dari penerapan keadilan dalam organisasi (Cropanzano *et al.*, 2011).

Dalam perusahaan, model keadilan prosedural dengan pendekatan dalam penilaian kinerja memiliki tiga unsur utama (Folger *et al.*, 1992). Pertama, pemberitahuan yang memadai (*adequate notice*) yang menerangkan bahwa sebelum tujuan dan standar ditetapkan maka hal tersebut perlu untuk diterbitkan, didistribusikan secara luas, dan dijelaskan. Dalam hal ini karyawan diberi kesempatan untuk memberi masukan ke dalam proses perumusan tujuan dan standar atau setidaknya berkesempatan untuk mempertanyakan proses penetapan dan cara penerapan standar beserta tujuan tersebut. Kedua, penyampaian yang adil (*a fair hearing*) menjelaskan bahwa karyawan memiliki sarana untuk menunjukkan sudut pandang mereka sendiri tentang kinerja mereka. Karyawan diberi kesempatan untuk menjelaskan interpretasi mereka sendiri dan mengajukan argumen yang mendukung interpretasi tersebut. Ketiga, penilaian berdasarkan bukti (*judgement based on the evidence*) menerangkan bahwa data yang dibutuhkan untuk penilaian kinerja harus dikumpulkan dan keputusan harus didasarkan pada bukti. Tujuannya ialah agar penilai dapat melakukan penilaian secara konsisten, tanpa tekanan eksternal, korupsi, atau prasangka pribadi.

Mengacu pada model keadilan prosedural yang telah disebutkan, BUM Desa sebagai organisasi sektor publik juga dapat menerapkan model keadilan prosedural dengan komponen yang sama di antaranya: (1) pemberitahuan yang memadai (*adequate notice*) menerangkan bahwa hal-hal terkait unit usaha yang dijalankan BUM Desa harus dijelaskan kepada masyarakat desa oleh pengelola BUM Desa sehingga masyarakat paham dan dapat terlibat secara aktif dalam unit-unit usaha yang beroperasi. Komponen ini juga menjelaskan bahwa masyarakat desa memiliki kesempatan untuk bertanya terkait unit yang dijalankan oleh BUM Desa; (2) penyampaian yang adil (*a fair hearing*) menjelaskan bahwa masyarakat desa memiliki

kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dalam pembuatan keputusan BUM Desa terkait kegiatan operasionalnya. Kesempatan dalam mengemukakan pendapat dapat disampaikan secara langsung melalui rapat maupun diskusi yang diadakan oleh BUM Desa. (3) penilaian berdasarkan bukti (*judgement based on the evidence*) menerangkan bahwa masyarakat desa memiliki kesempatan untuk memberikan kritik dan saran bagi BUM Desa sebagai bahan evaluasi bagi BUM Desa. Pemberian kritik dan saran dapat disampaikan secara langsung dalam rapat evaluasi yang diadakan oleh BUM Desa.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Sumber Data, Subjek, dan Fokus Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), notulensi serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUM Desa. Penelitian berlokasi di BUM Desa Karya Lestari Manunggal Desa Kemasan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Agustus 2019 hingga bulan Januari 2020. Narasumber dipilih berdasarkan kajian yang menyatakan bahwa badan usaha milik desa merupakan sebuah unit usaha yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa (Ramadana *et al.*, 2013). Oleh karena itu, narasumber yang dipilih untuk meneliti keadilan prosedural di BUM Desa ialah masyarakat desa serta pengurus BUM Desa di antaranya komisariss dan pengurus harian BUM Desa Kalem. Fokus pada penelitian ini ialah: (1) pemberitahuan yang memadai yaitu pemahaman yang diberikan terkait unit usaha yang dikelola BUM Desa sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengelolaan unit usaha; (2) penyampaian yang adil yakni peluang dalam berpendapat yang dimiliki masyarakat desa dalam proses pembuatan arah kebijakan BUM Desa; (3) penilaian berdasarkan bukti yaitu kesempatan masyarakat desa dalam memberikan kritik dan saran terkait kinerja BUM Desa.

3.2. Metode Penelitian dan Tahapan Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif memberikan gambaran tentang suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa dan realita secara luas dan mendalam sehingga diperoleh suatu pemahaman baru sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan kondisi keadilan prosedural pada BUM Desa (Raco, 2010). Validitas dan reliabilitas dilakukan dengan mengkonfirmasi jawaban dari satu sumber data ke sumber data lainnya. Tahapan analisis data di antaranya: (1) mereduksi data yaitu meringkas data wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian; (2) membandingkan kesesuaian data antara data wawancara, hasil pengamatan serta data sekunder yang diperoleh; (3) menyajikan data yaitu proses menampilkan data yang telah dibandingkan sehingga data tersebut terorganisir dan mudah untuk dipahami; (4) menganalisis data merupakan proses mencari makna dari data yang telah disajikan dengan cara menyesuaikan kejadian yang ada di lapangan dengan teori yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya; dan (5) kesimpulan merupakan proses menentukan hasil penelitian setelah dilakukan analisis data.

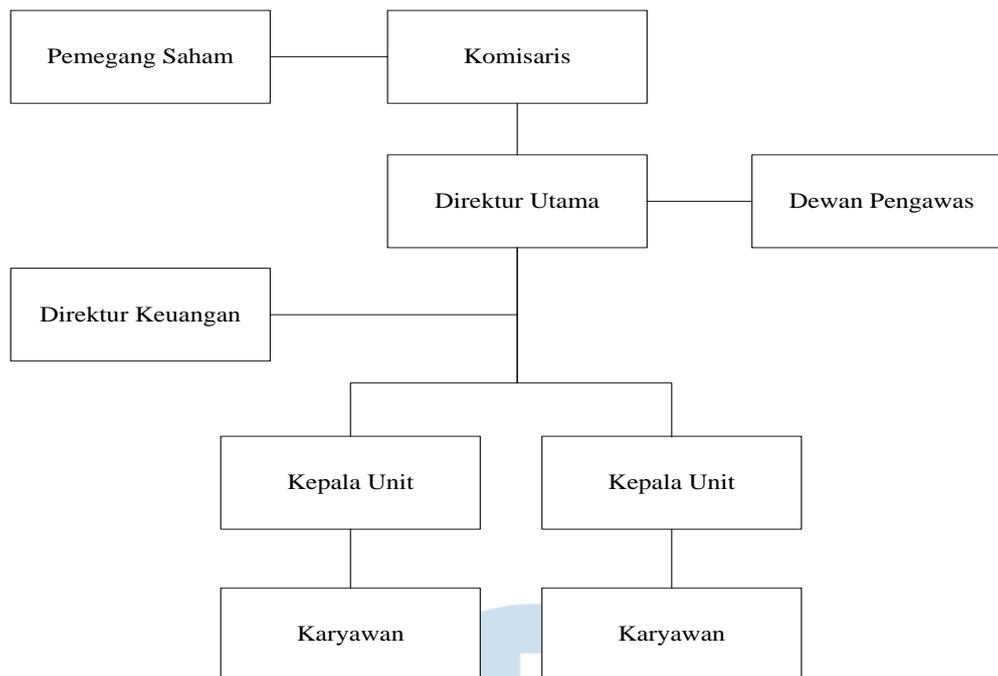
4. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

4.1. Deskripsi Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal

Desa Kemas tempat berdirinya Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal (BUM Desa Kalem) merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Desa ini terdiri atas 20 RT dan 4 RW. Luas wilayah Desa Kemas yaitu sebesar 125.7825 Ha dengan jumlah penduduk 3.213 jiwa dan 716 kepala keluarga. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Kemas ialah sebagai petani serta sisanya bekerja sebagai pedagang dan pegawai negeri.

BUM Desa Kalem didirikan sejak bulan Juni tahun 2016 yang terletak di Komplek Balai Desa Kemas, Balong RT.04/1. Pendirian BUM Desa Kalem diperkuat dengan payung hukum yaitu Peraturan Desa No. 13 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal. Pembentukan BUM Desa Kalem ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja desa dengan membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha ekonomi produktif. BUM Desa tersebut memiliki dua sumber penyertaan modal yaitu dari pemerintah dan masyarakat desa. Modal dari pemerintah yaitu berupa sejumlah uang yang diperoleh melalui APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sedangkan modal dari masyarakat diperoleh dari penjualan saham BUM Desa. Selain itu, BUM Desa Kalem menjalankan kegiatan operasionalnya dengan beberapa unit usaha di antaranya unit wisata (Dewa Emas), unit olahan ikan (Minamukti), unit air bersih (Pamsimas), dan unit pengolahan sampah (Sabamas). Namun pada tahun 2019, unit olahan ikan (Minamukti) tidak beroperasi secara penuh. Unit usaha tersebut hanya beroperasi jika ada kegiatan *outbond* dalam pembuatan nugget ikan.

Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang dijalankan oleh BUM Desa Kalem diperkuat oleh pembentukan struktur organisasi yang jelas sehingga pembagian porsi dari setiap pemangku kepentingan menjadi jelas dan tidak tumpang tindih. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan susunan kepengurusan organisasi BUM Desa yang terdiri atas penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Dalam peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa BUM Desa merupakan induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015). Berikut adalah gambar susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal:



Gambar 1 Susunan Kepengurusan BUM Desa Karya Lestari Manunggal

Di sisi lain, kegiatan operasional BUM Desa Kalem juga didasari oleh visi yaitu menjadi wadah pengembangan potensi desa untuk menuju perekonomian desa yang mandiri dan berkesinambungan serta misi di antaranya: (1) mengoptimalkan potensi desa dengan kearifan lokal Desa Kemas; (2) meningkatkan peran masyarakat desa dalam membangun perekonomian Desa Kemas; (3) menjalin dan meningkatkan kemitraan di bidang usaha wisata dan bidang usaha lainnya, baik kemitraan jasa ataupun permodalan.

4.2. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal

Pengelolaan unit-unit usaha dibawah naungan BUM Desa Kalem menganut prinsip tata kelola perusahaan yang baik di antaranya transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kesetaraan dan kewajaran. Transparansi dilakukan BUM Desa Kalem dengan cara melakukan koordinasi dengan komisaris dan pengawas sebelum melakukan pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan agar adanya keterbukaan atas kegiatan yang dilaksanakan BUM Desa Kalem. Transparansi dilaksanakan melalui pembuatan website dan juga fanpage BUM Desa Kalem sehingga masyarakat dapat mengetahui kegiatan yang akan, sedang, ataupun dilakukan oleh BUM Desa Kalem. Kemudian, prinsip kemandirian dilakukan melalui tiga prinsip kerja BUM Desa Kalem yaitu mempertinggi kompetensi BUM Desa, memperbanyak kolaborasi melalui penawaran kerja sama, dan memperkecil kompetisi. Selanjutnya, akuntabilitas menggambarkan bahwa BUM Desa Kalem dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya harus menjalin koordinasi dengan komisaris BUM Desa Kalem serta melaporkan arus kas atau kegiatan secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus. Di sisi lain, terdapat prinsip pertanggungjawaban yang menjelaskan bahwa pengelolaan BUM Desa Kalem harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, prinsip kesetaraan dan kewajaran menggambarkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUM Desa Kalem memperlakukan para pemangku

kepentingan secara setara dan wajar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlakuan tersebut dikategorikan sebagai konsep keadilan dalam organisasi yaitu keadilan prosedural.

4.3. Keadilan Prosedural di Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal

Komponen 1: Pemberitahuan yang Memadai (*Adequate Notice*)

Pada BUM Desa, pemberitahuan yang memadai menjelaskan tentang upaya BUM Desa dalam menyampaikan berbagai informasi secara lengkap mengenai prosedur pelaksanaan setiap unit usaha yang dikelola serta masalah-masalah yang dihadapi BUM Desa kepada masyarakat desa. Komponen ini tidak terlepas dari agenda tanya jawab antara pengurus harian BUM Desa dengan masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar BUM Desa dapat melibatkan peran aktif masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat desa tentang BUM Desa merupakan hal yang sangat penting. Sosialisasi dan studi banding ke desa lainnya merupakan cara yang ditempuh BUM Desa Kalem dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga perkembangan unit usaha yang dikelola BUM Desa Kalem dapat mengalami peningkatan. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh BUM Desa Kalem melibatkan perwakilan masyarakat di antaranya ketua RW Desa Kemas dan PAGERMAS (Paguyuban Ketua RT se-Desa Kemas) serta pengurus BUM Desa Kalem di antaranya pengawas, komisaris, serta pengurus harian BUM Desa. Sosialisasi tersebut biasanya dilaksanakan di balai desa Kemas. Kemudian, agar informasi dari sosialisasi tersebut dapat tersampaikan ke seluruh masyarakat desa maka selanjutnya akan diadakan pertemuan berupa rapat oleh setiap RT. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak R selaku Direktur Keuangan BUM Desa Kalem bahwa:

“Sosialisasi diadakan untuk menggerakkan unit usaha supaya maksimal. Untuk sosialisasi sendiri, kami mengundang perwakilan masyarakat dari RT dan RW. Untuk sampai ke masyarakat desa, kita lewatnya PAGERMAS. PAGERMAS kan RT-RT itu, jadi nanti penyampaiannya melalui rapat yang diadakan RT.”

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Bapak S selaku komisaris BUM Desa Kalem, beliau menyatakan:

“Pengenal unit usaha dilakukan melalui sosialisasi yang utamanya diberikan kepada perwakilan masyarakat desa. Kemudian dari sosialisasi tersebut akan dilanjutkan kepada masyarakat desa melalui pertemuan di setiap RT. Jadi setiap RT akan menyampaikan jadwal pertemuan kemudian kami akan datang ke sana untuk mengikuti pertemuan tersebut.”

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Ibu P sebagai Direktur Utama BUM Desa Kalem:

“Untuk menjelaskan unit-unit usaha yang ada di BUM Desa, dilaksanakan juga sosialisasi ke RT-RT. Kami mengunjungi setiap RT mengikuti jadwal rapat yang dibuat oleh masing-masing RT.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Mm selaku ketua RT 03, RW 04 Desa Kemas bahwa:

“Setelah selesai mengikuti sosialisasi yang diadakan BUM Desa, kami langsung menentukan jadwal dan membuat undangan rapat dengan masyarakat desa untuk menyampaikan materi sosialisasi.”

Sosialisasi yang dilaksanakan tidak hanya menjelaskan prosedur pelaksanaan yang dijalankan tiap unit usaha tetapi juga menjelaskan kebutuhan BUM Desa Kalem atas tenaga kerja untuk mengelola dan menjalankan unit usaha, hal ini sesuai dengan yang diutarakan Ibu P selaku Direktur Utama BUM Desa Kalem bahwa:

“Saat sosialisasi kami juga menyampaikan jika kami membutuhkan tenaga kerja dalam pengelolaan unit usaha. Kami berupaya dengan melakukan penawaran kerja sama

dengan masyarakat dari UKM-UKM yang ada. Untuk sekarang UKM-UKM yang terlibat itu seperti penitipan makanan kemudian ada yang sering kita peseni kue untuk kegiatan rumah makan atau jika ada musdes. Kemudian ada juga UKM yang kita gunakan fasilitas dan tenaganya untuk paket outbond misalnya fasilitas pertanian untuk kegiatan bajak sawah serta tenaga kerja untuk edukasi pembuatan kerupuk kangkung dan pembuatan jamu. Selain itu, kami juga menyampaikan kebutuhan untuk tenaga kerja di unit usaha misalnya pelayan untuk rumah makan. Intinya seluruh informasi terkait kebutuhan tenaga kerja kami sampaikan di sosialisasi-sosialisasi.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Mm selaku ketua RT 03, RW 04 terDesa Kemas, beliau mengatakan:

“Dalam sosialisasi yang disampaikan yaitu proses jalannya unit usaha hingga penawaran kerja sama untuk UKM-UKM yang ada di desa.”

Sosialisasi juga tidak terlepas dari agenda tanya-jawab antara masyarakat desa dengan pengurus harian BUM Desa Kalem. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu P sebagai Direktur Utama BUM Desa Kalem:

“Masyarakat tentu diberi kesempatan untuk bertanya agar masyarakat jelas dengan materi sosialisasi.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak S selaku komisaris BUM Desa Kalem yang menyatakan:

“Jelas masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya dalam sosialisasi yang diadakan agar masyarakat paham betul dengan materi yang disajikan.”

Di sisi lain, studi banding juga dilaksanakan oleh BUM Desa Kalem untuk dapat meningkatkan pemahaman pengurus unit usaha beserta pengurus harian BUM Desa dalam mengelola unit-unit usaha yang dijalankan BUM Desa Kalem. Desa yang dituju BUM Desa Kalem dalam rangka pelaksanaan studi banding merupakan desa yang memiliki BUM Desa yang pengelolaan unit usahanya lebih berkembang. Mengacu pada sosialisasi SABAMAS yang dilaksanakan pada 28 Agustus 2019, BUM Desa Kalem merencanakan studi banding ke BUM Desa Amarta, Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta yang telah direalisasikan pada 16 September 2019. Tujuan studi banding tersebut ialah untuk mempelajari siklus pengelolaan sampah di BUM Desa tersebut. Studi banding dilakukan agar dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan unit usaha yang dikelola BUM Desa Kalem.

Meskipun sosialisasi dan studi banding sudah dilaksanakan, tetapi BUM Desa Kalem masih memiliki kelemahan dari segi ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Rendahnya minat masyarakat untuk terlibat dalam mengembangkan BUM Desa Kalem merupakan salah satu faktor penghambat perkembangan BUM Desa Kalem. Keterlibatan masyarakat yang dimaksud ialah partisipasi masyarakat desa untuk ikut serta dalam berbagai peluang kerja yang disediakan BUM Desa Kalem. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ibu P sebagai Direktur Utama BUM Desa Kalem:

“Masyarakat desa tidak terlalu berminat untuk terlibat di BUM Desa. Jadi dalam pelaksanaan operasi unit-unit usaha, kami juga menggunakan tenaga dari luar desa Kemas. Seharusnya BUM Desa Kalem ini dijalankan oleh masyarakat desa sendiri, tetapi jika kita terus mengharapkan keterlibatan langsung oleh masyarakat desa maka BUM Desa akan susah untuk berkembang.”

Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Mr selaku masyarakat yang menjalankan UKM Kerupuk Sayur, beliau mengatakan:

“Sebenarnya kekurangan SDM di BUM Desa itu karena minat masyarakat untuk bekerja kurang. Jadi tidak semua masyarakat desa terlibat aktif dalam pelaksanaan operasional BUM Desa maupun unit-unit usahanya.”

Pemberitahuan yang secara memadai mengenai BUM Desa hingga ke unit-unit usahanya memberikan memberikan manfaat penting bagi tingkat keterlibatan masyarakat desa. Di BUM Desa Kalem, penyampaian informasi yang memadai diupayakan melalui sosialisasi dan pelaksanaan studi banding ke BUM Desa lain yang lebih berkembang. Pelaksanaan sosialisasi oleh BUM Desa Kalem dilakukan sebelum dan saat unit-unit usaha sudah dijalankan. Dalam sosialisasi, juga terdapat sesi tanya-jawab yang bertujuan agar masyarakat paham mengenai materi sosialisasi yang sudah disampaikan. Hal ini sesuai dengan model keadilan prosedural yang dikemukakan oleh Folger *et al.* (1992) bahwa pemberitahuan yang memadai merupakan model keadilan yang ditempuh dengan menerbitkan, mendistribusikan, serta menjelaskan tujuan dan standar secara memadai sebelum ditetapkan.

Selain itu, penyampaian informasi yang memadai oleh BUM Desa Kalem melalui sosialisasi bermanfaat agar perekonomian desa Kemas dapat terus berkembang. Perkembangan perekonomian desa diupayakan BUM Desa Kalem dengan menawarkan kerja sama dengan UKM-UKM yang ada di desa Kemas. BUM Desa Kalem juga menyediakan lapangan pekerjaan untuk mengelola unit-unit usaha yang ada di BUM Desa Kalem. Penawaran kerja sama dan penyediaan lapangan kerja diinformasikan secara detail kepada masyarakat desa melalui sosialisasi yang diadakan BUM Desa Kalem. Kondisi ini sesuai dengan pendapat oleh Budiono, (2015); Hayyuna *et al.* (2014); Kasila dan Kolopaking, (2018); Suryana *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa BUM Desa berperan untuk menciptakan kemandirian perekonomian desa, mengentaskan kemiskinan yang terjadi di wilayah pedesaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk lokal yang diproduksi oleh masyarakat desa. Meskipun demikian, peran BUM Desa tidak dapat dilaksanakan dengan baik jika masyarakat desa tidak terlibat aktif. Kondisi inilah yang tercermin di BUM Desa Kalem. Hal tersebut dikarenakan kurangnya minat masyarakat desa Kemas untuk bekerja sama dengan BUM Desa Kalem. Jadi meskipun BUM Desa Kalem berupaya keras dalam memperkenalkan unit-unit usahanya hingga menawarkan kerja sama, tetapi jika tidak ada timbal balik dari masyarakat maka BUM Desa Kalem tidak dapat mengalami perkembangan. Oleh sebab itu, BUM Desa Kalem belum mampu menerapkan model keadilan prosedural berdasarkan komponen pemberitahuan yang memadai karena komponen ini membutuhkan hubungan timbal balik antara BUM Desa dengan masyarakat desa.

Komponen 2: Penyampaian yang Adil (A Fair Hearing)

Penyampaian yang adil menjelaskan tentang kesempatan yang diperoleh masyarakat desa untuk mengemukakan pendapatnya terkait potensi desa dalam pembuatan arah kebijakan BUM Desa. Arah kebijakan yang dimaksud merupakan rumusan perencanaan yang dibuat untuk menjalankan unit-unit usaha yang dikelola BUM Desa. Pembuatan arah kebijakan di BUM Desa Kalem dilakukan dalam rapat pengurus yang terdiri atas pengawas, komisaris, dan pengurus harian BUM Desa Kalem. Pelaksanaan rapat pengurus biasanya dilakukan di kantor BUM Desa Kalem. Dalam proses pembuatan kebijakan BUM Desa, masyarakat desa Kemas tidak dilibatkan secara langsung. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Bapak R selaku Direktur Keuangan BUM Desa Kalem:

“Pembuatan arah kebijakan biasanya dilakukan oleh pengurus BUM Desa saja yang arahan utamanya dari komisaris BUM Desa yaitu Bapak Kepala Desa.”

Pernyataan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan dari pengurus harian, pengurus unit usaha, komisaris, dan pengawas BUM Desa Kalem yang tercantum dalam

Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal Pasal 10, Pasal 17, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 36. Tugas yang dimaksud merupakan tugas pengurus BUM Desa Kalem dalam merumuskan kebijaksanaan umum BUM Desa Kalem (Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal, 2016b).

Walaupun demikian, masyarakat desa tetap terlibat dalam proses pembuatan arah kebijakan BUM Desa Kalem tetapi secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan sebelum diadakan rapat pengurus BUM Desa, telah dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam musyawarah tersebut, perwakilan masyarakat desa yaitu ketua RW, PAGERMAS, pemegang saham BUM Desa, serta perwakilan setiap UKM diberi kesempatan untuk menyampaikan ide-ide ataupun saran dalam rangka mendukung kemajuan desa. BUM Desa Kalem dalam hal ini berperan sebagai sarana dalam mendukung kemajuan desa sehingga ide ataupun saran yang disampaikan sejalan dengan pembuatan arah kebijakan BUM Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Bapak R selaku Direktur Keuangan BUM Desa Kalem:

“Masyarakat dilibatkan mba dalam pembuatan arah kebijakan BUM Desa Kalem tetapi tidak dalam forum BUM Desa melainkan dalam forum musrenbangdes. Dalam musrenbangdes masyarakat diminta gagasan apapun untuk kemajuan desa, misalnya pengembangan sarana prasarana, pengembangan ukm, pengembangan potensi desa, dan lain-lain. Dari gagasan-gagasan tersebut, kami kemudian merancang arah kebijakan BUM Desa yang dapat ditempuh.”

Keterlibatan masyarakat desa untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses pembuatan arah kebijakan BUM Desa merupakan kunci dari komponen penyampaian yang adil. Meskipun masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam rapat pengurus BUM Desa Kalem, tetapi masyarakat tetap dilibatkan dalam penetapan arah kebijakan BUM Desa Kalem melalui masukan berupa saran-saran yang disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Folger *et al.* (1992) yang mengungkapkan bahwa dalam model keadilan prosedural untuk komponen penyampaian yang adil, karyawan diberi kesempatan untuk menjelaskan sudut pandang mereka sendiri dan mengajukan argumen yang mendukung interpretasi tersebut. Oleh karena itu, BUM Desa Kalem mampu menerapkan model keadilan prosedural berdasarkan penyampaian yang adil. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaan BUM Desa Kalem khususnya dalam menetapkan arah kebijakan BUM Desa, masyarakat dilibatkan secara aktif sehingga arah kebijakan yang ditetapkan menjadi sesuai dengan potensi dan keterampilan masyarakat.

Komponen 3: Penilaian Berdasarkan Bukti (*Judgement Based on The Evidence*)

Penilaian berdasarkan bukti menerangkan tentang peluang masyarakat desa dalam menyampaikan kritik dan saran mengenai kinerja BUM Desa selama periode berjalan. Komponen ini bertujuan agar BUM Desa mampu meningkatkan kualitas kinerjanya pada periode selanjutnya. Di BUM Desa Kalem, komponen ini dilaksanakan melalui musyawarah desa pada awal tahun. Musyawarah desa tersebut dilaksanakan di balai Desa Kemasan. Pihak-pihak yang diundang hadir di antaranya pengurus BUM Desa, ketua RW, PAGERMAS, pemegang saham, dan perwakilan setiap UKM. Dalam musyawarah desa, laporan pertanggungjawaban disajikan dan disampaikan oleh pengurus harian BUM Desa Kalem yang didampingi oleh komisaris dan pengawas BUM Desa Kalem. Laporan pertanggungjawaban tersebut berisikan arah kebijakan yang sudah ditempuh, laba usaha, dan bagi hasil pemegang saham periode sebelumnya diikuti dengan penyampaian program kerja periode baru dan rencana-rencana pengembangan BUM Desa. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Bapak R selaku Direktur Keuangan BUM Desa Kalem:

“Penyusunan laporan keuangan BUM Desa dilakukan oleh direktur keuangan BUM Desa dengan menggabungkan laporan-laporan keuangan dari tiap unit usaha. Sedangkan pembuatan laporan pencapaian arah kebijakan itu tanggung jawab dari saya dan Ibu P selaku Direktur Utama BUM Desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut akan dibuat saat akhir periode yaitu pada saat akhir tahun. Pada awal tahun akan diadakan musyawarah desa yang ditujukan untuk memaparkan laporan keuangan, hasil pencapaian BUM Desa, dan perencanaan ke depannya.”

Peraturan yang tertera dalam Anggaran dasar Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Karya Lestari Manunggal) Pasal 17c menyebutkan bahwa musyawarah desa merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan yang memiliki kewenangan dalam memilih dan/atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus (Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal, 2016a). Peraturan ini memberikan gambaran bahwa adanya kesempatan yang diberikan bagi perwakilan masyarakat yang hadir untuk memberikan kritik dan saran terkait laporan pertanggungjawaban BUM Desa Kalem untuk didiskusikan secara bersama. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Ibu P selaku Direktur Utama BUM Desa Kalem, beliau menyatakan:

“Iya, setelah penyampaian laporan BUM Desa Kalem selesai, perwakilan masyarakat yang hadir diberi kesempatan untuk memberikan kritik dan saran.”

Bapak S sebagai pemegang saham BUM Desa Kalem juga mengaku bahwa:

“Setelah pemaparan laporan pertanggungjawaban BUM Desa Kalem dilaksanakan, diberikan kesempatan bagi tokoh masyarakat yang hadir untuk memberikan masukan.”

Pernyataan-pernyataan diatas diperkuat oleh hasil observasi musyawarah desa yang dilaksanakan pada 25 Januari 2020. Musyawarah desa yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri oleh ketua RW, PAGERMAS, para pemegang saham, dan perwakilan setiap UKM. Dalam musyawarah desa tersebut dipaparkan laporan mengenai BUM Desa Kalem dari arah kebijakan yang ditempuh hingga perencanaan BUM Desa pada tahun 2020 oleh Bapak R selaku Direktur Keuangan BUM Desa Kalem. Setelah pemaparan laporan BUM Desa selesai, diberikan kesempatan bagi perwakilan masyarakat yang hadir untuk memberikan kritik, saran, maupun pertanyaan kepada pengurus harian BUM Desa Kalem. Pada kesempatan tersebut, salah satu perwakilan masyarakat yang berpartisipasi dalam agenda tersebut ialah Bapak S selaku pemegang saham BUM Desa Kalem, beliau memberikan kritik dan saran terkait keterlibatan BUM Desa dalam berbagai kegiatan Desa Kemasan. Kritik dan saran tersebut kemudian direspon dengan baik oleh pengurus harian BUM Desa Kalem.

Penilaian berdasarkan bukti berarti bahwa masyarakat desa memiliki peluang untuk menyampaikan pendapatnya berdasarkan pengalaman terhadap kinerja BUM Desa. Pendapat yang disampaikan dapat berupa kritik dan saran. Tujuan dari pemberian kritik dan saran ialah sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas BUM Desa karena melalui hal tersebut, BUM Desa dapat menemukan kelebihan maupun kekurangan yang harus dikembangkan maupun diperbaiki. Di BUM Desa Kalem, sudah diterapkan agenda untuk menerima kritik dan saran dalam setiap pelaksanaan musyawarah desa. Hal ini menggambarkan perlakuan yang adil karena masyarakat desa diberikan hak untuk memberikan masukan-masukkan untuk kemajuan BUM Desa. Kondisi ini sesuai dengan pendapat dari Agoes dan Ardana, (2014); Cropanzano *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa perlakuan yang setara berarti para pengelola usaha dapat memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara yang bebas dari bias dan representatif dari pemangku kepentingan yang relevan.

Kritik dan saran yang diberikan merupakan bagian dari penilaian masyarakat terhadap kinerja BUM Desa Kalem selama periode berjalan. Selain kritik dan saran, pertanyaan juga

dapat diajukan masyarakat desa kepada pengurus harian mengenai laporan keuangan yang telah dipaparkan. Melalui kritik, saran, dan pertanyaan inilah, musyawarah desa dapat memutuskan penerimaan atau penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus BUM Desa Kalem. Hal ini sudah sesuai dengan model keadilan yang diutarakan oleh Folger *et al.* (1992) bahwa penilaian berdasarkan bukti (*judgement based on the evidence*) menerangkan bahwa data yang dibutuhkan untuk penilaian kinerja harus dikumpulkan dan keputusan harus didasarkan pada bukti.

Selain itu, kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengungkapkan kritik dan saran memberikan gambaran bahwa pengelolaan BUM Desa Kalem tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa dan pengurus harian BUM Desa tetapi juga melibatkan masyarakat desa Kemas. Kondisi ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Iskanto *et al.* (2018); Ramadana *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa pengelolaan BUM Desa dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa serta harus dapat mempertahankan kualitas dari produk maupun jasa yang disediakan. Oleh karena itu, BUM Desa Kalem sudah mampu dalam menerapkan keadilan prosedural berdasarkan komponen penilaian berdasarkan bukti. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan masyarakat melalui penyampaian kritik, saran, maupun pertanyaan kepada pengurus harian BUM Desa Kalem mengenai pertanggungjawaban kinerja BUM Desa selama periode berjalan sehingga kualitas BUM Desa Kalem dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian yang diperoleh, masih terdapat komponen keadilan prosedural yang belum mampu dilaksanakan Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal, Desa Kemas, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Komponen pertama yaitu pemberitahuan yang memadai merupakan komponen yang belum dapat terealisasi karena keterbatasan sumber daya manusia yang memadai sehingga sosialisasi dan studi banding yang dilaksanakan menjadi kurang berdampak pada masyarakat desa Kemas. Kemudian dua komponen terakhir yaitu penyampaian yang adil lalu penilaian berdasarkan bukti merupakan komponen yang sudah mampu direalisasikan BUM Desa Kalem. Hal ini dikarenakan adanya ketersediaan kesempatan bagi masyarakat desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa maupun Musyawarah Desa sehingga dalam upaya peningkatan kualitas BUM Desa Kalem, pengurus BUM Desa tidak bekerja sendiri melainkan juga melibatkan masyarakat Desa Kemas.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini ialah peneliti tidak dapat mengikuti dan mendapatkan notulensi Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa karena adanya kendala pada waktu dan akses yang diberikan. Hal ini menyebabkan pembahasan komponen penyampaian yang adil hanya didasarkan pada kegiatan wawancara

5.3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk menyelidiki keadilan organisasi lainnya yaitu keadilan distributif dan keadilan interaktif pada BUM Desa. Selain itu, saran bagi Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal ialah sebaiknya pelatihan untuk masyarakat Desa Kemas perlu untuk dilakukan. Sosialisasi dan studi banding juga seharusnya tidak sebatas penjelasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan unit usaha yang dikelola BUM Desa melainkan juga ada penyampaian secara berulang mengenai manfaat BUM Desa serta dampaknya secara riil bagi masyarakat jika masyarakat terlibat aktif dan kualitas BUM Desa meningkat. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar dapat

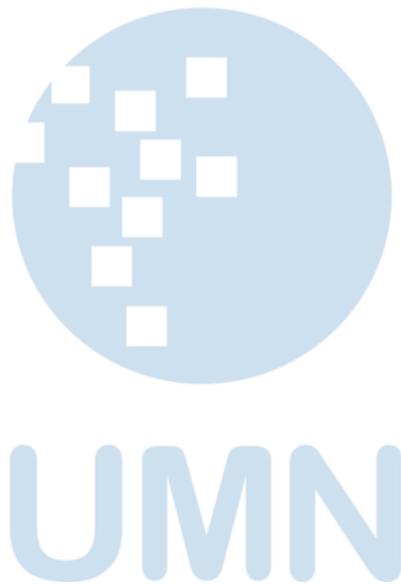
mengawasi proses pelaksanaan dan pembuatan arah kebijakan BUM Desa Kalem khususnya pada kegiatan sosialisasi.

REFERENSI

- Agoes, S., dan Ardana, I. C. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya* (Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Arifuddin, M., Safaruddin, dan Falziah. (2017). Persepsi Pengelola Keuangan Desa dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa Di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2, 23–38.
- Artati, A. K., dan Utami, I. (2020). Can and will village-owned enterprises provide the financial statement accountability? *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4), 647–650.
- Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal. Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Karya Lestari Manunggal) (2016). Indonesia.
- Badan Usaha Milik Desa Karya Lestari Manunggal. Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Karya Lestari Manunggal (Kalem)” (2016). Indonesia.
- Berdesa. (2017). Membangun Peran BUM Desa Sebagai Pengentas Ketidakberdayaan Ekonomi Warga. Retrieved June 6, 2019, from <http://www.berdesa.com/membangun-peran-bumdesa-pengentas-ketidakberdayaan-ekonomi-warga/>
- Bohle, S. A. L., dan Alonso, A. R. M. (2016). The Effect of Procedural Fairness and Supervisor Support in The Relationship Between Job Insecurity and Organizational Citizenship Behavior. *Review Of Business Management*, 19(65), 337–357. <https://doi.org/10.7819/rbgn.v0i0.3023>
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125.
- Canada, K. E., dan Watson, A. C. (2013). “Cause Everybody Likes to Be Treated Good”: Perceptions of Procedural Justice Among Mental Health Court Participants. *American Behavioral Scientist*, 57(2), 209–230. <https://doi.org/10.1177/0002764212465415>
- Clarke, C., Harcourt, M., dan Flynn, M. (2013). Clinical Governance, Performance Appraisal and Interactional and Procedural Fairness at a New Zealand Public Hospital. *Journal of Business Ethics*, 117(3), 667–678. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1550-9>
- Cropanzano, R., Bowen, D. E., dan Gilliland, S. W. (2011). The Management of Organizational Justice. *Academy of Management Perspectives*, 21(4), 34–48. <https://doi.org/10.5465/amp.2007.27895338>
- Farokhah, L., dan Sapetra, Y. A. (2018). Perancangan Aplikasi “Village Entrepreneurship” untuk Meningkatkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 1073–1082.
- Folger, R., Konovsky, M., dan Cropanzano, R. (1992). A Due Process for Performance Appraisal. *Research in Organizational Behaviour*, 14, 129–177.
- Goodman-Delahunty, J., O’Brien, K., dan Gumbert-Jourjon, T. (2014). Police Professionalism in Interviews with High Value Detainees: Cross-Cultural Endorsement of Procedural Justice. *The Journal of the Institute of Justice and International Studies*, 1–18.
- Hayyuna, R., Pratiwi, R. N., dan Mindarti, L. I. (2014). Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1–5.
- Irawan, L., dan Sudarma, K. (2016). Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural pada Komitmen Afektif melalui Kepuasan Kerja. *Management Analysis Journal*, 5(2), 149–155.
- Iskamto, D., Risman, dan Alwifari, A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Eko Dan Bisnis (Riau Economics and Business Reviewe)*, 9(3), 186–194.
- Josef, E. S. (2017). Pengaruh Dimensi Keadilan Organisasional terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif Karyawan (Studi pada Divisi Atk-Mart PT. Gading Murni Surabaya). *Jurnal Ilmu Manajemen*,

- 5(1), 1–9.
- Kasila, M., dan Kolopaking, L. M. (2018). Partisipasi Pemuda Desa dalam Perkembangan Usaha BUMDes “Tirta Mandiri” (Studi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 43–58. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.43-58>
- Kementerian Desa, P. D. T., dan Indonesia, D. T. R. I. (2019). Pusat Data Desa Indonesia. Retrieved June 6, 2019, from <https://pddi.kemendesa.go.id/>
- Maspaitella, B. J., Tri. A. Y., Siswanto, Santoso, H., dan Bakhtiar, A. (2018). Pengaruh Keadilan Organisasional Terhadap Kepuasan Kerja dan Dampaknya terhadap Komitmen dan Intensi Keluar Di PT Indonesia Power UBP Semarang. *Seminar Nasional IENACO*, 498–507.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Pub. L. No. 4, 7 (2015). Indonesia.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta.
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 193–201.
- Negrut, V., Costache, M. P., Maftai, J., Coman, V. L., Matei, D., dan Negrut, A. (2010). The Aspects of Good Governance in the Context of Globalization. In *Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium* (Vol. 21, pp. 1259–1261).
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, F., dan Winarna, J. (2016). Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 37–45. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.190>
- Pahlawan, D., Purnomo, H., dan Murniati, W. (2018). Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2014-2016). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 68–77.
- Prasojo, E., Ridwan, I., Kurniawan, T., dan Karyana, A. (2014). *Materi Pokok Pemerintahan Daerah* (Kedua). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., dan Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Septiawan, B. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Good Corporate Governance (Survey Pada 3 BUMN yang Berkantor Pusat di Kota Bandung). *Seminar Nasional I Universitas Pamulang*, 1–9.
- Shaffitri, L. R., Syaukat, Y., dan Ekayani, M. (2015). Peranan BUMDes dalam Pengelolaan Limbah Cair Tahu dan Pemanfaatan Biogas. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan*, 2(2), 136–143. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v2i2.10984>
- Simcock, N. (2016). Procedural Justice and The Implementation of Community Wind Energy Projects: A Case Study from South Yorkshire, UK. *Land Use Policy*, 59, 467–477. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.08.034>
- Sugiarti, E., dan Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan. In *Proceedings Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice* (pp. 580–590).
- Suryana, I. M., Setiyono, T. J., dan Murdoyuwono, C. S. (2015). Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). *Jurnal Bakti Saraswati*, 4(2), 138–144.
- Syah, D. H. (2013). Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kinerja Manajerial Pada Inna Dharma Deli. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 19.
- Tantri, M. D., dan Utami, I. (2019). Pengelolaan Dana BUMDes Bersama “Utama” : Kajian Aspek Transparansi dan Responsibilitas, *XIII*(1), 1–17.
- Wulandari, N., dan Utami, I. (2020). Eksplorasi Mekanisme Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik

Desa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24167/jemap.v3i1.2483>



PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, UKURAN DAN KOMPLEKSITAS PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT REPORT LAG

Elfina Astrella Sambuaga¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

elfina_sambuaga@yahoo.co.id

Olivia Putri Santoso²

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Bunda Mulia, Indonesia

olivia.putri@mic.co.id

Diterima 1 Mei 2020

Disetujui 2 Juni 2020

Abstract- The purpose of this study to examine how agency theory plays a role in determining the factors that affect audit report lag. The difference in outcomes on factors affecting audit report lag in Indonesia and in Malaysia can be due to differences in corporate culture, economic environment, and existing regulations. The test is empirically focused on corporate governance, profitability, firm size and complexity for audit report lag both in Indonesia and Malay. The test uses multiple linear regression method with purposive sampling technique at 308 companies listed on Indonesia Stock Exchange and 361 companies at Bursa Malaysia for the period of 2015. Test results show that profitability called profit or loss of company is the main reason company to immediately publish its financial statement, thus reducing the occurrence of audit report lag. While other factors show different results in both countries. Especially for capital market authorities in Indonesia, it is necessary to consider efforts to improve the timeliness of financial reporting in Indonesia in order to improve the quality of the capital market in order to compete with other developing countries in the ASEAN region.

Keywords: *agency theory, audit report lag, corporate governance*

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Adanya integrasi pasar modal ASEAN berupa penawaran saham lintas negara Asia Tenggara merupakan salah satu bentuk implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN di bidang pasar modal. Dari 10 negara ASEAN, hanya 3 negara yang telah sepakat untuk bergabung dalam program *cross border offering* produk investasi, yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ketidakikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan tersebut dikarenakan belum sinergisnya peraturan pasar modal yang ada serta pasar modal Indonesia yang masih tertinggal, baik dari sisi emiten maupun investornya, dibandingkan negara-negara tersebut (Koran Sindo, 2016).

Penawaran saham lintas negara ASEAN memungkinkan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia maupun sebaliknya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melihat kesiapan pasar modal Indonesia yaitu meninjau kebijakan yang ada terkait pasar modal maupun sistem pelaporan keuangan perusahaan publik, karena laporan

keuangan yang berkualitas dan disampaikan secara tepat waktu dapat menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan investasi.

Emiten yang tercatat di pasar modal wajib mempublikasikan laporan keuangan auditannya dimana setiap negara memiliki regulasi tersendiri mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan. Di Indonesia, peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan diatur dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-346/BL/2011 lampiran X.K.2 yang menyatakan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai laporan auditan kepada BAPEPAM paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan. Sedangkan untuk negara lain seperti Malaysia, peraturan mengenai perusahaan yang tercatat di pasar modal, dapat dilihat di *Bursa Malaysia Listing Requirement* dimana untuk perusahaan yang tercatat di Bursa Malaysia wajib menerbitkan laporan tahunan beserta laporan auditan minimal 4 (empat) bulan di akhir tahun fiskal.

Perbedaan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan publik tersebut tidak mengurangi esensi dasar bahwa laporan keuangan harus disampaikan secara tepat waktu agar tidak kehilangan relevansinya, karena salah satu tujuan kualitatif dasar yang harus dimiliki laporan keuangan menurut APB *Statement No. 4* adalah ketepatan waktu atau *timeliness* (Harahap, 2012). Pada tahun 2016, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara (*suspend*) perdagangan saham 18 emiten karena terlambat dalam menyampaikan laporan tahunannya (CNN Indonesia, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan publik masih menjadi sasaran perbaikan otoritas pasar modal Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Knechel dan Payne (2001) membagi tiga komponen dalam *audit report lag*, di antaranya adalah *scheduling lag*, *fieldwork lag*, dan *reporting lag*. *Scheduling lag* adalah selisih waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan dengan dimulainya pekerjaan lapangan auditor. *Fieldwork lag* adalah selisih waktu antara dimulai dan berakhirnya pekerjaan lapangan auditor. *Reporting lag* merupakan selisih waktu antara tanggal laporan auditor dengan waktu penyelesaian pekerjaan lapangan. *Scheduling lag* menunjukkan bahwa jangka waktu *audit report lag* dipengaruhi oleh manajemen. Sedangkan *fieldwork lag* dan *reporting lag* menunjukkan peran auditor yang bertanggung jawab dalam melakukan proses pekerjaan lapangan hingga pembuat laporan audit, yang menyebabkan adanya *audit report lag*.

Penelitian sebelumnya tentang *audit report lag* yang dilakukan oleh Aristika, dkk. (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan serta laba atau rugi perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Haryani dan Wiratmaja (2014) menemukan bahwa komite audit dan kepemilikan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Serta, Ariyani dan Budiarta (2014) menemukan adanya pengaruh antara *audit report lag* dengan ukuran perusahaan dan kompleksitas operasi.

Menurut *agency theory*, keberadaan anggota dewan dan komite audit merupakan salah satu alat pengawasan (*monitoring*) untuk mengurangi adanya *agency problem*, dimana mekanisme pengawasan salah satunya mengacu pada praktik *corporate governance* (Apadore dan Noor, 2013). Berdasarkan teori keagenan tersebutlah yang kemudian mendasari berkembangnya berbagai pemikiran mengenai *Good Corporate Governance* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku (Ramdhaningsih dan Utama, 2013).

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengacu penelitian sebelumnya yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* pada perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia dari tahun 2009 hingga 2010. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, laba/rugi perusahaan dan *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *audit report lag* di Indonesia dan Malaysia. Namun, faktor-faktor tersebut berbeda pada kedua negara, dimana *audit report lag* di Indonesia dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan *debt to equity ratio*. Sedangkan *audit report lag* di Malaysia hanya dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* di Indonesia dan Malaysia dengan melakukan beberapa pengembangan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2016) yang meneliti bagaimana *agency theory* berperan dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag*. Variabel independen dalam penelitian tersebut terdiri dari *board size*, *corporate size*, *audit firm status*, *company complexity*, *existence of audit committee*, *CEO duality*, *ownership dispersion*, *ownership concentration*.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan konsep keagenan sebagai kontrak yang terjadi antara *principal* (investor) dan *agent* (manajer). Hubungan keagenan terjadi saat *principal* menyewa *agent* untuk memberikan kontribusinya demi kepentingan mereka, dimana hal tersebut melibatkan pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan kepada *agent* yang menyebabkan *agent* memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan dibandingkan *principal*.

Adanya ketimpangan informasi antara *principal* dan *agent* menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan keagenan, diantaranya asimetri informasi (Wardhani dan Raharja, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa tidak selamanya manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan, melainkan adanya konflik kepentingan dimana mereka bertindak demi kepentingan mereka sendiri (Ramdhaningsih dan Utama, 2013).

Berdasarkan teori keagenan tersebutlah yang kemudian mendasari berkembangnya berbagai pemikiran mengenai *Good Corporate Governance* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku (Ramdhaningsih dan Utama, 2013).

2.2. *Good Corporate Governance*

The Indonesia Corporate Governance Manual mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem atau struktur dalam perusahaan yang menaungi hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk memastikan terjaminnya pembagian hak serta kewajiban manajemen maupun pemegang saham untuk meningkatkan *shareholder value* dalam jangka panjang.

Bursa Malaysia menekankan pentingnya peran *good corporate governance* dalam perusahaan untuk menjamin terpenuhinya ketepatan waktu pelaporan keuangan (Hashim dan Rahman, 2011).

2.3. Audit Report Lag

Audit report lag merupakan jangka waktu yang diukur menggunakan jumlah hari, dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit independen (Ashton, *et al.*, 1987).

Menurut Dyer dan Mchugh (1975) dalam Widhiasiari dan Budiarta (2016), terdapat 3 kriteria dalam melihat ketepatan waktu pelaporan keuangan, yakni:

1. *Preliminary lag* adalah rentan waktu yang dihitung dengan jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* yang diterima di bursa.
2. *Auditor's report lag* adalah rentan waktu yang dihitung dengan jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal auditor menandatangani laporan hasil audit.
3. *Total lag* adalah jumlah hari dari tanggal selesai laporan keuangan sampai tanggal publikasi di bursa.

Knechel dan Payne (2001) dalam Widhiasiari dan Budiarta (2016) membagi tiga komponen *audit report lag*, dimana:

1. *Scheduling lag* adalah selisih waktu antara akhir tahun fiskal atau tanggal neraca perusahaan hingga dimulainya pekerjaan lapangan oleh auditor.
2. *Fieldwork lag* adalah selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan auditor hingga saat penyelesaiannya.
3. *Reporting lag* adalah selisih waktu antara penyelesaian pekerjaan lapangan auditor hingga terbitnya laporan audit.

Jadi, berdasarkan kriteria di atas, *scheduling lag* menunjukkan bahwa jangka waktu *audit report lag* yang dipengaruhi oleh manajemen, sedangkan *fieldwork lag* dan *reporting lag* menjadi tanggung jawab auditor yang melakukan pekerjaan lapangan sekaligus menerbitkan laporan audit.

Di Indonesia, peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan diatur dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-346/BL/2011 lampiran X.K.2 yang menyatakan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai laporan audit kepada BAPEPAM paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Sedangkan untuk Malaysia, peraturan mengenai perusahaan yang tercatat di pasar modal, dapat dilihat di *Bursa Malaysia Listing Requirement Chapter 9.23* yang mewajibkan perusahaan yang tercatat di Bursa Malaysia wajib menerbitkan laporan tahunan beserta laporan audit paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun fiskal.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Board Size Terhadap Audit Report Lag

Dewan direksi memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan dalam suatu organisasi (Bezemer, *et al.*, 2014). Menurut Plessis, *et al* (2012) pemisahan antara *ownership* dan *control* dalam teori keagenan dapat menyebabkan *agency problem*, dimana untuk mengurangi masalah tersebut, dibentuklah suatu dewan (*board*) sebagai alat monitoring.

Dalam sistem tata kelola perusahaan, terdapat dua sistem dewan, yaitu *one-tier* dan *two-tier board*. Dalam *one-tier system*, dewan direksi terdiri dari satu badan tunggal yang beranggotakan direktur non-eksekutif yang bertugas memegang peran pengawasan dan direktur eksekutif yang memegang kendali atas manajemen perusahaan. Sedangkan dalam *two-tier system*, dewan dalam perusahaan terdiri dari dewan direksi (*board of directors*) yang bertanggung jawab dalam manajemen perusahaan dan dewan komisaris (*board of commissioner*) yang bertanggung jawab dalam pengawasan perusahaan (Plessis *et al*, 2012).

Agency theory mengusulkan bahwa seharusnya ada batas maksimal dalam jumlah keanggotaan suatu dewan dimana *board size* yang besar dapat menimbulkan masalah dalam komunikasi dan koordinasinya (Hassan 2016). Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hassan (2016) di Palestina serta Wardhani dan Raharja (2013) di Indonesia bahwa jumlah anggota dewan yang semakin besar akan memperpanjang *audit report lag*.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Alfraih (2016) pada perusahaan terdaftar di Kuwait menemukan bahwa *board size* justru berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* dan mengimplikasikan bahwa *board size* yang lebih besar dan beragam dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga jangka waktu terbitnya laporan audit akan lebih pendek. Sejalan dengan *agency theory* yang dijelaskan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : *Board size* akan meningkatkan *audit report lag* pada perusahaan di Indonesia.

H₇ : *Board size* akan meningkatkan *audit report lag* pada perusahaan di Malaysia.

2.4.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag*

Menurut Hashim dan Rahman (2011), adanya komite audit dalam organisasi berperan penting untuk meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Menurut Peraturan BAPEPAM No. IX.I.5 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menjelaskan bahwa komite audit sekurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak lain dari luar Emiten atau perusahaan publik. Di Malaysia, aturan mengenai komite audit diatur dalam *Bursa Malaysia Listing Requirement Chapter 13.5*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hassan (2016) dan Puasa, *et al.* (2014) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* dan menyatakan bahwa efektivitas komite audit akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga mengurangi *audit report lag*. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Apadore dan Noor (2013), Ayushabrina dan Rahardjo (2014), serta Haryani dan Wiratmaja (2014). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani dan Raharja (2013) serta Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Maka hipotesis yang diajukan:

H₂ : Jumlah komite audit akan mengurangi *audit report lag* pada perusahaan di Indonesia.

H₈ : Jumlah komite audit akan mengurangi *audit report lag* pada perusahaan di Malaysia.

2.4.3. Pengaruh *Ownership Concentration* Terhadap *Audit Report Lag*

Perusahaan dengan kepemilikan saham menyebar diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas dibandingkan perusahaan dengan kepemilikan saham terkonsentrasi yang cenderung menyajikan pengungkapan (*disclosure*) yang buruk (Hassan, 2016). Hal tersebut dikarenakan *major shareholders* cenderung memiliki akses langsung terhadap informasi internal perusahaan. Sehingga perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi, cenderung lebih lama dalam mempublikasikan laporan keuangannya (Ashton *et al.* 1987 dalam Apadore dan Noor, 2013).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hassan (2016) menemukan bahwa *ownership concentration* memiliki arah hubungan yang positif namun tidak signifikan terhadap *audit report lag*, sedangkan Apadore dan Noor (2013) menemukan bahwa *ownership concentration* berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Adanya *ownership concentration* akan meningkatkan *audit report lag* pada perusahaan di Indonesia.

H₉: Adanya *ownership concentration* akan meningkatkan *audit report lag* pada perusahaan di Malaysia.

2.4.4. Pengaruh Laba atau Rugi Tahun Berjalan Terhadap *Audit Report Lag*

APB *Statement* mendefinisikan laba (rugi) sebagai kelebihan (defisit) penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Pengukuran laba tidak hanya penting untuk menentukan kinerja perusahaan, tetapi juga penting sebagai informasi bagi pembagian laba dan penentuan kebijakan investasi. Perusahaan yang mengalami laba akan cenderung lebih cepat dalam mempublikasikan laporan keuangannya karena hal tersebut dianggap sebagai *good news* bagi para *shareholders* maupun investor (Indriyani dan Supriyati, 2012). Laba perusahaan dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang baik (Ayushabrina dan Rahardjo, 2014).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shukeri dan Islam (2012), Aristika, dkk. (2016) menemukan bahwa laba atau rugi tahun berjalan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, yang artinya perusahaan yang mengalami laba akan cenderung mempublikasikan laporan keuangannya lebih cepat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayushabrina dan Rahardjo (2014) serta Indriyani dan Supriyati (2012) menemukan bahwa laba atau rugi tahun berjalan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Laba tahun berjalan akan mengurangi *audit report lag* pada perusahaan di Indonesia.

H₁₀: Laba tahun berjalan akan mengurangi *audit report lag* pada perusahaan di Malaysia

2.4.5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Report Lag*

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset, total penjualan, jumlah tenaga kerja atau karyawan. Ukuran perusahaan yang digunakan dapat dilihat dan dihitung dari *natural log* total asetnya. Menurut Sari dan Gozhali (2014), perusahaan yang lebih besar cenderung lebih cepat menyelesaikan laporan keuangan auditnya karena mereka memiliki kepentingan yang menuntut mereka untuk segera menerbitkan laporan keuangannya, sehingga ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Hassan (2016), Alfraih (2016), Ayushabrina dan Rahardjo (2014), serta Ariyani dan Budiarta (2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Sedangkan Haryani dan Wiratmaja (2014) dan Wardhani dan Raharja (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Maka hipotesis yang diajukan:

H₅: Ukuran perusahaan akan mengurangi *audit report lag* pada perusahaan di Indonesia.

H₁₁: Ukuran perusahaan akan mengurangi *audit report lag* pada perusahaan di Malaysia.

2.4.6. Pengaruh Kompleksitas Perusahaan Terhadap *Audit Report Lag*

Menurut Ashton, *et al.* (1987), perusahaan dengan kompleksitas operasi yang lebih tinggi cenderung mempublikasikan laporan keuangan mereka lebih lama karena auditor eksternal membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengaudit laporan keuangannya.

Pengukuran kompleksitas perusahaan dapat dilihat dengan dua cara yaitu kompleksitas operasi yang dapat dihitung menggunakan jumlah entitas (Hassan, 2016). Kompleksitas organisasi atau operasi merupakan akibat dari pembentukan departemen dan pembagian pekerjaan yang memiliki fokus terhadap jumlah unit yang berbeda (Ariyani dan Budiarta, 2014).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariyani dan Budiarta (2014), berargumen bahwa perusahaan yang lebih kompleks operasinya akan cenderung menghasilkan *audit report lag* yang lebih panjang. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2016) menemukan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hal tersebut dapat dikarenakan perusahaan dengan kompleksitas operasi yang lebih tinggi biasanya memiliki sistem pelaporan yang lebih baik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Alfraih (2016) serta Wardhani dan Raharja (2013) menemukan bahwa kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₆: Adanya kompleksitas perusahaan akan meningkatkan *audit report lag* pada perusahaan di Indonesia.

H₁₂: Adanya kompleksitas perusahaan akan meningkatkan *audit report lag* pada perusahaan di Malaysia.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan perusahaan *non-financial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia tahun 2015. Indonesia dan Malaysia dipilih karena keduanya merupakan negara berkembang di ASEAN namun terdapat perbedaan, salah satunya dari segi *performance* pasar modalnya. Indonesia masih cukup tertinggal dibandingkan dengan Malaysia dan hal tersebut mungkin dapat disebabkan oleh perbedaan pada regulasi maupun sistem tata kelolanya. Selain itu, alasan pengecualian perusahaan *non-financial* adalah karena sektor ini memiliki struktur keuangan dan persyaratan serta kebijakan pelaporan keuangannya pun berbeda dengan sektor lain.

Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan data *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu yang telah disesuaikan. Sesuai dengan kriteria pemilihan sampel, maka diperoleh 308 perusahaan yang berasal dari Bursa Efek Indonesia, dan 361 perusahaan dari Bursa Malaysia. Terdapat tujuh variabel dalam penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dependen dan enam variabel independen yang dijelaskan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Indikator
<i>Audit Report Lag</i> (ARL)	selisih waktu antara tanggal tutup buku perusahaan dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor independen yang diukur menggunakan jumlah hari (Hassan, 2016).
Jumlah anggota dewan (BSIZE)	Jumlah anggota dewan yang ada dalam suatu perusahaan
Komite audit (AUDCOM)	Jumlah anggota komite audit yang ada dalam suatu perusahaan (Apadore dan Noor, 2013).
<i>Ownership Concentration</i> (OWNCON)	Konsentrasi kepemilikan yang diukur berdasarkan jumlah <i>shareholders</i> yang memiliki saham biasa sebesar 5% atau lebih (Hassan, 2016).
Laba atau rugi tahun berjalan (PROFIT)	Laba atau rugi perusahaan pada tahun berjalan yang diprosikan dengan <i>dummy</i> . Bernilai 1 jika perusahaan mengalami laba, dan 0 jika perusahaan mengalami rugi (Ayushabrina dan Rahardjo, 2014)
Ukuran Perusahaan (SIZE)	Ukuran perusahaan yang diukur dengan <i>logaritma natural</i> total aset (Indriyani dan Supriyati, 2012).
Kompleksitas Perusahaan (COMPLX)	Kompleksitas perusahaan yang diukur dengan <i>square root</i> jumlah anak perusahaan (<i>subsidiary</i>) (Wardhani dan Raharja, 2013).

3.2. Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ARL = \beta_0 + \beta_1 BSIZE + \beta_2 AUDCOM + \beta_3 OWNCON + \beta_4 PROFIT + \beta_5 SIZE + \beta_6 COMPLX + \varepsilon$$

Dimana:

- ARL: selisih waktu antara tanggal tutup buku perusahaan dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor independen (*audit report lag*) yang diukur menggunakan jumlah hari.
- BSIZE: Jumlah anggota dewan, yaitu jumlah dewan yang ada pada perusahaan
- AUDCOM: Komite audit, yaitu jumlah komite audit yang ada pada perusahaan
- OWNCON: *Ownership concentration*, yaitu konsentrasi kepemilikan yang diukur berdasarkan jumlah *shareholders* yang memiliki 5% atau lebih saham biasa
- PROFIT: Laba atau Rugi Tahun Berjalan, yang diproksikan dengan *dummy*, dimana “1” jika perusahaan mengalami laba, dan “0” jika perusahaan mengalami rugi
- SIZE: Ukuran perusahaan, yang diproksikan dengan *logaritma natural* total aset
- COMPLX: Kompleksitas perusahaan, yang diproksikan dengan menghitung *square root* jumlah *subsidiary*
- e: error

4. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

4.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai objek data yang diteliti, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Statistik Deskriptif (Indonesia)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ARL	308	29	138	79,62	15,588
BSIZE	308	4	28	8,99	3,372
AUDCOM	308	2	5	3,07	,377
OWNCON	308	1	7	2,60	1,492
SIZE	308	23,06030	33,13405	28,3753428	1,67859587
COMPLX	308	,0000	21,0238	2,557906	2,3230836
N	308				

Tabel 5.2
Statistik Deskriptif (Malaysia)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ARL	361	34	120	91,17	17,915
BSIZE	361	4	12	7,32	1,643
AUDCOM	361	3	5	3,27	,520
OWNCON	361	1	7	2,71	1,241
SIZE	361	17,00571	24,75073	20,1955061	1,51573732
COMPLX	361	,0000	13,2665	3,925477	2,1821355
N	361				

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi Laba atau Rugi (Indonesia)

Variabel	Kategori	Indonesia		Malaysia	
		Frequency	Percent	Frequency	Percent
PROFIT	Rugi	88	28,6	85	23,5
	Laba	220	71,4	276	76,5
	Total	308	100,0	361	100,0

Tabel 5.1 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif untuk 308 sampel penelitian di Indonesia tahun 2015. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata *audit report lag* di Indonesia adalah sebesar 80 hari dengan nilai minimal 29 hari dan maksimal 138 hari. Terdapat 17 perusahaan yang memiliki *audit report lag* melampaui batas waktu penyampaian yang telah ditetapkan, sedangkan sisanya sebanyak 291 perusahaan masih memenuhi ketentuan yang ada. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa meskipun masih ada perusahaan yang melewati batas penyampaian laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM yaitu akhir bulan ketiga setelah tanggal tutup buku, rata-rata perusahaan sampel di Indonesia telah memenuhi ketentuan tersebut.

Sebagai perbandingan, rata-rata *audit report lag* di Indonesia cenderung lebih panjang dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hassan (2016) di Palestina, dimana rata-rata *audit report lag* di negara tersebut hanya 62 hari dengan minimal *audit report lag* 17 hari dan maksimal 96 hari.

Selanjutnya, jumlah anggota dewan di Indonesia beranggotakan paling sedikit 4 orang dan paling banyak 28 orang dengan rata-rata 9 orang. Jumlah anggota komite audit di Indonesia bervariasi antara 2 hingga 5 orang anggota dengan rata-rata 3 orang anggota komite audit. Sebanyak 8 perusahaan hanya memiliki 2 orang anggota komite audit, sedangkan sisanya 300 perusahaan memiliki 3 orang anggota atau lebih. Hal tersebut berarti rata-rata jumlah anggota komite audit pada perusahaan sampel penelitian telah memenuhi kriteria jumlah minimal anggota komite audit yaitu 3 anggota, meskipun masih ada 8 perusahaan yang hanya memiliki 2 anggota komite audit dan belum memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan oleh BAPEPAM.

Selain itu, untuk variabel *ownership concentration*, jumlah pemegang saham yang memiliki 5% saham atau lebih bervariasi antara 1 hingga 7 *shareholders* dengan rata-rata 2,6 *shareholders*. Ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan *natural log* total aset memiliki nilai minimal 23,0603 dan nilai maksimal 33,13405 dengan rata-rata sebesar 28,3753428. Dan kompleksitas perusahaan yang diukur dengan menghitung *square root* jumlah anak perusahaan memiliki nilai minimal 0 dan nilai maksimal 21,0238 dan nilai rata-rata 2,557906. Sebanyak 262 perusahaan memiliki anak perusahaan sedangkan sisanya 46 perusahaan tidak memiliki anak perusahaan.

Tabel 5.2 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif untuk 361 perusahaan sampel di Malaysia tahun 2015. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata *audit report lag* di Malaysia adalah sebesar 91 hari dengan nilai minimal 34 hari dan maksimal 120 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun rata-rata *audit report lag* di Malaysia lebih panjang dibandingkan dengan di Indonesia (91 hari di Malaysia dan 80 hari di Indonesia), maksimal *audit report lag* pada perusahaan sampel di Malaysia adalah 120 hari, yang berarti tidak ada perusahaan sampel di Malaysia yang melampaui batas penyampaian laporan keuangan yang ditetapkan *Bursa Malaysia Listing Requirement* yaitu akhir bulan keempat setelah tanggal tutup buku perusahaan atau 120 hari.

Selanjutnya, jumlah anggota dewan di Malaysia beranggotakan paling sedikit 4 orang dan paling banyak 12 orang dengan rata-rata 9 orang. Jumlah anggota komite audit di Malaysia

bervariasi antara 3 hingga 5 orang anggota dengan rata-rata 3 orang anggota komite audit. Hal itu berarti seluruh perusahaan sampel telah memenuhi kriteria minimal jumlah anggota komite audit yang ditetapkan *Bursa Malaysia Listing Requirement* yaitu 3 orang anggota.

Untuk variabel *ownership concentration*, jumlah pemegang saham yang memiliki 5% saham atau lebih bervariasi antara 1 hingga 7 *shareholders* dengan rata-rata 2,71 *shareholders*. Ukuran perusahaan yang diukur berdasarkan *natural log* total aset memiliki nilai minimal 17,00571 dan nilai maksimal 24,75073 dengan rata-rata sebesar 20,1955061. Dan kompleksitas perusahaan yang diukur dengan menghitung *square root* jumlah anak perusahaan memiliki nilai minimal 0 dan nilai maksimal 13,2665 dan nilai rata-rata 3,925477. Sebanyak 7 perusahaan tidak memiliki anak perusahaan, sedangkan sisanya 354 perusahaan memiliki anak perusahaan.

Tabel 5.3 menunjukkan statistik deskriptif untuk variabel laba atau rugi tahun berjalan yang diproses dengan *dummy*. Dapat dilihat bahwa dari 308 perusahaan sampel di Indonesia tahun 2015, 88 perusahaan atau sekitar 28,6% perusahaan mengalami rugi dan sisanya 220 perusahaan atau sekitar 71,4% perusahaan mengalami laba. Sedangkan, dari 361 perusahaan sampel di Malaysia tahun 2015, sebanyak 85 perusahaan atau sekitar 23,5% perusahaan mengalami rugi dan sisanya 276 perusahaan atau sekitar 76,5% perusahaan mengalami laba. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2015 dianggap cukup baik, jika dilihat dari laba atau rugi yang dialami perusahaan.

4.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5.4
Summary Hasil Regresi Kelompok Sampel di Indonesia

$ARL_{INA} = 103,882 - 1,030BSIZE - 0,812AUDCOM + 1,257OWNCON - 8,322PROFIT - 0,366SIZE + 0,210COMPLX$					
Dependent Variable = <i>Audit Report Lag</i>					
<i>Independent Variable</i>	<i>Expected sign</i>	<i>Coefficients</i>	<i>t-stat</i>	<i>p-value (1 tailed)</i>	<i>VIF</i>
Constant		103,882	5,358	0,000	
BSIZE	(+)	-1,030	-3,171	0,001*	1,770
AUDCOM	(-)	-0,812	-0,347	0,384	1,144
OWNCON	(+)	1,257	2,237	0,013*	1,038
PROFIT	(-)	-8,322	-4,497	0,000*	1,035
SIZE	(-)	-0,366	-0,497	0,309	2,253
COMPLX	(+)	0,210	0,495	0,315	1,433
<i>F-Test</i>		0,000			
<i>Adjusted R²</i>		0,144			
N		308			

*signifikan pada level $\alpha = 5\%$ (one-tailed)

Sumber : Hasil olahan Penulis

5. PEMBAHASAN HIPOTESIS

5.1. Pengaruh *Board Size* Terhadap *Audit Report Lag* di Indonesia

Jumlah anggota dewan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi ($Sig > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa *board size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag* di Indonesia, sehingga H_1 yang menyatakan *board size* akan meningkatkan *audit report lag* di Indonesia ditolak, karena berbeda dengan dugaan awal bahwa *board size* pada perusahaan dapat menyebabkan masalah koordinasi dan kurang efektifnya kinerja dewan yang ada sehingga akan memperpanjang *audit report lag*, hasil penelitian justru menunjukkan bahwa semakin banyak *board size* justru akan mengurangi *audit report lag*.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alfraih (2016) yang menemukan adanya hubungan negatif dan signifikan antara *board size* dengan *audit report lag*. Tetapi, penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2016) dan Wardhani dan Raharja (2013) yang menemukan bahwa *board size* berpengaruh positif dengan *audit report lag*. Hal tersebut mungkin disebabkan karena semakin banyak *board size* dengan latar belakang keahlian yang beragam, justru dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat memperpendek *audit report lag*. Selain itu, *board size* yang lebih maksimal mampu berkontribusi lebih dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta ketepatan waktunya.

5.2. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag* di Indonesia

Komite audit memiliki tingkat signifikansi 0,384 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag* di Indonesia, sehingga H_2 yang menyatakan jumlah komite audit akan mengurangi *audit report lag* di Indonesia ditolak.

Hal tersebut dikarenakan hasil penelitian tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara komite audit dengan *audit report lag*. Hal ini mungkin disebabkan karena penelitian ini hanya mengukur efektivitas komite audit berdasarkan jumlah anggotanya dan tidak menggunakan pengukuran lain seperti independensi, kualifikasi, maupun jumlah pertemuan komite audit yang dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk dapat mengurangi *audit report lag* perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardhani dan Raharja (2013) serta Angruningrum dan Wirakusuma (2013) yang menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2016) dan Puasa, *et al.*, (2014) yang menemukan bahwa jumlah serta efektivitas komite audit dapat mengurangi *audit report lag*.

5.3. Pengaruh *Ownership Concentration* Terhadap *Audit Report Lag* di Indonesia

Ownership concentration memiliki tingkat signifikansi 0,013 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa *ownership concentration* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *audit report lag* di Indonesia, sehingga H_3 yang menyatakan adanya konsentrasi kepemilikan akan meningkatkan *audit report lag* di Indonesia tidak ditolak. Hal tersebut dikarenakan *major shareholders* cenderung memiliki akses langsung terhadap informasi internal perusahaan, serta perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi, cenderung memiliki kualitas pelaporan serta pengungkapan yang rendah sehingga akan meningkatkan *audit report lag*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Apadore dan Noor (2013) yang menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara komite audit dan *audit report lag* yang menyatakan banyaknya jumlah pemegang saham *blockholder* dapat mengakibatkan semakin banyaknya intervensi dalam pelaporan keuangannya dan meningkatkan *audit report lag*.

5.4. Pengaruh Laba Tahun Berjalan Terhadap *Audit Report Lag* di Indonesia

Laba tahun berjalan memiliki tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{sig} > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa laba atau rugi tahun berjalan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag* di Indonesia, sehingga H_4 yang menyatakan bahwa laba tahun berjalan akan mengurangi *audit report lag* di Indonesia tidak ditolak. Hal tersebut dikarenakan laba mencerminkan kinerja perusahaan yang baik dan dianggap sebagai *good news* bagi manajemen maupun investor, sehingga perusahaan akan cenderung sesegera mungkin mempublikasikan laporan keuangannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aristika dkk., (2016) serta Shukeri dan Islam (2012) yang menemukan bahwa laba tahun berjalan akan mengurangi *audit report lag*, yang berarti perusahaan yang mengalami laba, akan cenderung mempublikasikan laporan keuangannya lebih cepat. Selain itu, hasil penelitian ini tidak memberikan bukti yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ayushabrina dan Raharjo (2014) serta Indriyani dan Supriyati (2012) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara laba tahun berjalan dengan *audit report lag*, baik di Indonesia maupun Malaysia.

5.5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Report Lag* di Indonesia

Ukuran perusahaan memiliki tingkat signifikansi 0,309 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$) maka dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag* di Indonesia, sehingga H_5 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan akan mengurangi *audit report lag* di Indonesia ditolak.

Hal tersebut karena hasil penelitian tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan *audit report lag*. Hal ini mungkin disebabkan karena perusahaan yang besar belum tentu memiliki pengendalian internal yang lebih baik dibanding perusahaan yang lebih kecil dan auditor independen melaksanakan kewajiban profesionalnya tanpa dipengaruhi besarnya perusahaan yang diaudit.

Anggapan bahwa ukuran perusahaan akan mengurangi *audit report lag* muncul berdasarkan pandangan bahwa ukuran perusahaan yang besar cenderung memiliki kepentingan untuk menerbitkan laporan keuangannya lebih cepat dan biasanya memiliki pengendalian internal yang lebih baik sehingga akan memperpendek *audit report lag* dimana hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hassan (2016), Alfraih (2016), Ayushabrina dan Rahardjo (2014), serta Ariyani dan Budiarta (2014) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Tetapi anggapan tersebut tidak didukung oleh bukti empiris pada sampel penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mungkin saja memberikan pengaruh terhadap *audit report lag* tetapi tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haryani dan Wiratmaja (2014) dan Wardhani dan Raharja (2013) yang tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan *audit report lag*.

5.6. Pengaruh Kompleksitas Perusahaan Terhadap *Audit Report Lag* di Indonesia

Kompleksitas perusahaan memiliki tingkat signifikansi 0,315 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$) maka dapat dilihat bahwa kompleksitas perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag* di Indonesia, sehingga H_6 yang menyatakan adanya kompleksitas perusahaan akan meningkatkan *audit report lag* di Indonesia ditolak, karena hasil penelitian tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kompleksitas perusahaan dengan *audit report lag*.

Hal ini mungkin disebabkan karena auditor independen melaksanakan kewajiban profesionalnya tanpa dipengaruhi kompleksitas operasi yang ada pada perusahaan yang diaudit. Potensi *audit report lag* yang lebih panjang, didasari oleh anggapan bahwa perusahaan dengan kompleksitas operasi yang tinggi maupun anak perusahaan yang lebih banyak akan cenderung menyelesaikan auditnya lebih lama, seperti pada hasil penelitian oleh Ariyani dan Budiarta (2014) yang menemukan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Namun, hal tersebut tidak ditemukan pada sampel perusahaan di Indonesia yang mengindikasikan bahwa meskipun mungkin saja kompleksitas perusahaan dapat mempengaruhi *audit report lag*, tetapi tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara keduanya. Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Alfraih (2016) serta Wardhani dan Raharja (2013) yang menemukan kompleksitas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*.

Tabel 4.16
Summary Hasil Regresi Kelompok Sampel di Malaysia

ARL_{MY} = 225,999 + 1,357BSIZE – 7,447AUDCOM – 0,636OWNCON – 4,464PROFIT – 6,236SIZE + 2,721COMPLX					
Dependent Variable = Audit Report Lag					
<i>Independent Variable</i>	<i>Expected sign</i>	<i>Coefficients</i>	<i>t-stat</i>	<i>p-value (1 tailed)</i>	<i>VIF</i>
Constant		225,999	17,144	0,000	
BSIZE	(+)	1,357	2,353	0,009*	1,334
AUDCOM	(-)	-7,447	-4,422	0,000*	1,139
OWNCON	(+)	-0,636	-0,953	0,171	1,017
PROFIT	(-)	-4,464	-2,238	0,013*	1,066
SIZE	(-)	-6,236	-8,413	0,000*	1,874
COMPLX	(+)	2,721	5,763	0,000*	1,576
<i>F-Test</i>		0,000			
<i>Adjusted R²</i>		0,244			
N		361			

*signifikan pada level $\alpha = 5\%$ (one-tailed)

Sumber : Hasil olahan Peneliti

5.7. Pengaruh Board Size Terhadap Audit Report Lag di Malaysia

Board size memiliki tingkat signifikansi 0,009 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa *board size* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *audit report lag*, sehingga H_7 yang menyatakan bahwa *board size* akan meningkatkan *audit report lag* di Malaysia tidak ditolak. Hal tersebut dikarenakan jumlah anggota dewan yang besar, justru dapat menyebabkan masalah koordinasi dan berkurangnya efektivitas kinerja anggota dewan yang akan meningkatkan *audit report lag*.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alfraih (2016) yang menyatakan bahwa ukuran dewan yang lebih banyak cenderung memiliki *audit report lag* lebih pendek. Tetapi, penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hassan (2016) serta Wardhani dan Raharja (2013) yang menemukan bahwa *board size* berpengaruh positif dengan *audit report lag* di Palestina. Hal ini juga sejalan dengan *agency theory* yang menyebutkan bahwa *board size* yang terlalu besar dapat menyebabkan timbulnya masalah koordinasi (Hassan 2016).

5.8. Pengaruh Komite Audit Terhadap Audit Report Lag di Malaysia

Komite audit memiliki tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$) maka dapat dilihat bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag*, sehingga H_8 yang menyatakan komite audit akan mengurangi *audit report lag* di Malaysia tidak ditolak. Hal tersebut dikarenakan efektivitas komite audit akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga mengurangi *audit report lag*.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hassan (2016), Puasa, *et al.* (2014), Ayushabrina dan Rahardjo (2014), Haryani dan Wiratmaja (2014), serta Apadore dan Noor (2013) yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan sehingga dapat mengurangi *audit report lag*. Tetapi penelitian ini tidak didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardhani dan Raharja (2013) serta Angruningrum dan Wirakusuma (2013) yang menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

5.9. Pengaruh *Ownership Concentration* Terhadap *Audit Report Lag* di Malaysia

Ownership concentration memiliki tingkat signifikansi 0,171 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa *ownership concentration* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag* di Malaysia sehingga H_9 yang menyatakan adanya konsentrasi kepemilikan akan meningkatkan *audit report lag* di Malaysia ditolak, karena hasil penelitian tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan atas pengaruh *ownership concentration* terhadap *audit report lag*.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hassan (2016) yang menemukan bahwa *ownership concentration* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Hal itu mungkin dikarenakan kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada perusahaan di Malaysia tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan maupun pengungkapannya, sehingga tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*.

5.10. Pengaruh Laba Tahun Berjalan Terhadap *Audit Report Lag* di Malaysia

Laba atau rugi tahun berjalan memiliki tingkat signifikansi 0,013 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa laba atau rugi tahun berjalan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag* di Malaysia, sehingga H_{10} yang menyatakan bahwa laba tahun berjalan akan mengurangi *audit report lag* di Malaysia tidak ditolak. Hal tersebut dikarenakan laba mencerminkan kinerja perusahaan yang baik dan dianggap sebagai *good news* bagi manajemen maupun investor, sehingga perusahaan cenderung sesegera mungkin mempublikasikan laporan keuangannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aristika dkk., (2016) serta Shukeri dan Islam (2012) yang menemukan bahwa laba tahun berjalan akan mengurangi *audit report lag*, yang berarti perusahaan yang mengalami laba, akan cenderung mempublikasikan laporan keuangannya lebih cepat. Tetapi, hasil penelitian ini tidak memberikan bukti yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ayushabrina dan Raharjo (2014) serta Indriyani dan Supriyati (2012) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara laba tahun berjalan dengan *audit report lag*.

5.11. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Report Lag* di Malaysia

Ukuran perusahaan memiliki tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *audit report lag* di Malaysia, sehingga H_{11} yang menyatakan ukuran perusahaan akan mengurangi *audit report lag* di Malaysia tidak ditolak. Hal tersebut dikarenakan ukuran perusahaan yang besar cenderung memiliki kepentingan untuk menerbitkan laporan keuangannya lebih cepat dan biasanya memiliki pengendalian internal yang lebih baik sehingga akan memperpendek *audit report lag*.

Hasil penelitian ini mendukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hassan (2016), Alfraih (2016), Ayushabrina dan Rahardjo (2014), serta Ariyani dan Budiarta (2014) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Tetapi tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haryani dan Wiratmaja (2014) serta Wardhani dan Raharja (2013) yang tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan *audit report lag*.

5.12. Pengaruh Kompleksitas Perusahaan Terhadap *Audit Report Lag* di Malaysia

Kompleksitas perusahaan memiliki tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa kompleksitas perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *audit report lag* di Malaysia, sehingga H_{12} yang menyatakan adanya kompleksitas perusahaan akan meningkatkan *audit report lag* di Malaysia

tidak ditolak. Hal tersebut karena perusahaan dengan kompleksitas operasi yang tinggi maupun anak perusahaan yang lebih banyak akan cenderung menyelesaikan auditnya lebih lama.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariyani dan Budiarta (2014), yang menemukan bahwa perusahaan yang lebih kompleks operasinya akan cenderung menghasilkan *audit report lag* yang lebih panjang. Tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alfraih (2016) serta Wardhani dan Raharja (2013) yang tidak menemukan adanya hubungan signifikan antara kompleksitas operasi dengan *audit report lag* serta penelitian yang dilakukan Hassan (2016) yang menemukan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia tahun 2015. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan enam variabel independen, diantaranya jumlah anggota dewan, komite audit, *ownership concentration*, laba atau rugi tahun berjalan, ukuran perusahaan dan kompleksitas perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah anggota dewan akan mengurangi *audit report lag* di Indonesia tetapi akan meningkatkan *audit report lag* di Malaysia. Di Indonesia, jumlah anggota dewan yang lebih banyak dengan latar belakang yang keahlian beragam diperlukan untuk mengurangi *audit report lag*, namun pada sampel penelitian di Malaysia, hal tersebut justru dapat menyebabkan masalah koordinasi yang akan meningkatkan *audit report lag*.
2. Komite audit akan mengurangi *audit report lag* di Malaysia tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag* di Indonesia. Hal itu terlihat dari signifikansi variabel komite audit pada sampel penelitian di Malaysia yang menunjukkan bahwa efektivitas komite audit akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga mengurangi *audit report lag*, namun pada sampel penelitian di Indonesia, efektivitas komite audit tidak menunjukkan adanya kontribusi yang signifikan untuk mengurangi *audit report lag*.
3. Adanya konsentrasi kepemilikan akan meningkatkan *audit report lag* di Indonesia, tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag* di Malaysia. Hal itu terlihat dari signifikansi variabel *ownership concentration* pada sampel penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi cenderung memiliki kualitas pelaporan serta pengungkapan yang rendah sehingga akan meningkatkan *audit report lag*, sedangkan pada sampel penelitian di Malaysia, konsentrasi kepemilikan tidak menunjukkan adanya kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan *audit report lag*.
4. Laba tahun berjalan akan meningkatkan *audit report lag* di Indonesia dan Malaysia. Hal tersebut dapat dilihat dari signifikansi variabel laba atau rugi tahun berjalan pada kedua kelompok sampel penelitian di Indonesia dan Malaysia yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami laba cenderung akan mempublikasikan laporan keuangannya lebih cepat.
5. Ukuran perusahaan akan mengurangi *audit report lag* di Malaysia, tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag* di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari signifikansi variabel ukuran perusahaan pada sampel penelitian di Malaysia yang menunjukkan ukuran perusahaan yang besar cenderung memiliki kepentingan untuk

- menerbitkan laporan keuangannya lebih cepat dan biasanya memiliki pengendalian internal yang lebih baik sehingga akan memperpendek *audit report lag*, sedangkan pada sampel penelitian di Indonesia, besar kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi *audit report lag*.
6. Adanya kompleksitas perusahaan akan meningkatkan *audit report lag* di Malaysia, tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag* di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari signifikansi variabel kompleksitas perusahaan pada sampel penelitian di Malaysia yang menunjukkan perusahaan dengan kompleksitas operasi yang tinggi maupun anak perusahaan yang lebih banyak akan cenderung menyelesaikan auditnya lebih lama, sedangkan pada sampel penelitian di Indonesia, kompleksitas perusahaan tidak mempengaruhi *audit report lag*.
 7. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menemukan bahwa *audit report lag* di Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda, dimana perbedaan tersebut dapat disebabkan karena adanya perbedaan budaya perusahaan, lingkungan ekonomi, maupun regulasi yang ada pada kedua negara.

REFERENSI

- Alfraih, M. M. 2016. *Corporate Governance Mechanism and Audit Delay in a Joint Audit Regulation*. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 24 Iss 3 pp. 292 – 316
- Angruningrum, S. & W. Made Gede. (2013). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit Terhadap *Audit Delay*. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Vol 5.2.
- Apadore, K. & N. M. Mohd. (2013). *Determinants of Audit Report Lag and Corporate Governance in Malaysia*. *International Journal of Business and Management*. Vol. 8, No. 15; 2013. E-ISSN: 1833-8119.
- Aristika, M. N., T. Rina & H. C. Dewi. (2016). Pengaruh Opini Audit, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Laba Rugi Terhadap *Audit Report Lag*. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. ISSN: 2460-0784.
- Ariyani, N. N. T. D. & B. I Ketut. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi Perusahaan dan Reputasi KAP Terhadap *Audit Report Lag* Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Vol 8.2.
- Ashton, R., Wilingham, J., & Elliot, R. (1987). *An Empirical Analysis of Audit Delay*. *Journal of Accounting Research*, Vol. 25, No. 2, 275-292
- Ayushabrina, F. dan R. S. Nur. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan terhadap *Audit Report Lag*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis*. Universitas Diponegoro. Vol 3, No. 2, 2014, pp. 1-12
- BAPEPAM-LK. (2011) [Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011](http://www.ojk.go.id). Diakses pada 15 November 2016, dari <http://www.ojk.go.id>.
- BAPEPAM-LK. (2012). [Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012](http://www.ojk.go.id). Diakses pada 15 November 2016, dari <http://www.ojk.go.id>.
- Bezemer, P. J, Peji, S., de Krujis, L., & M. Gregory F. (2014). *How Two-tier Board Can Be More Effective*. *Corporate Governance : The International Journal of Business in Society*, 14(1), pp. 15-31.
- Bursa Malaysia. *Bursa Malaysia Listing Requirement*. Diakses pada 11 Maret 2017, dari <http://www.bursamalaysia.com>.

- CNN Indonesia. (2016). Telat Sampaikan Lapkeu, BEI Suspensi 18 Perusahaan. Diakses melalui http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2016063014504_5-92-142141/telat-sampaikan-lapkeu-bei-suspensi-saham-18-perusahaan, pada tanggal 10 November 2016 pukul 22:17 WIB.
- Harahap, S. S. (2012). *Teori Akuntansi: Edisi Revisi 2011*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Haryani, J. & W. I Dewa Nyoman. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Penerapan *International Financial Reporting Standards* dan Kepemilikan Publik pada *Audit Delay*. Universitas Udayana. Vol 6.1.
- Hashim, U. J. B. & Rahman, R. B. A. (2011). *Audit Report Lag and the Effectiveness of Audit Committee Among Malaysian Listed Companies*. *International Bulletin of Business Administration*, ISSN: 1451-243X
- Hassan, Y. M. (2016). *Determinants of Audit Report Lag: Evidence from Palestine*. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, Vol. 6 No. 1, pp. 13-32. DOI: 10.1108/JAEE-05-2013-0024
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriyani, R. E. & Supriyati. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Report Lag* Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia. *The Indonesian Accounting Review*, Volume 2 No. 2, July 2012, pp 185-202.
- International Finance Corporation Advisory Services in Indonesia*. (2014). *The Indonesia Corporate Governance Manual*. Jakarta: International Finance Corporation Indonesia.
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). *Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. Vol 3 (1976) p305-360.
- Koran Sindo .(2016). BEI Siapkan Integrasi Pasar Modal ASEAN. Diakses melalui http://koran-sindo.com/page/news/2016-01-05/2/3/BEI_Siapkan_Integrasi_Pasar_Modal_ASEAN, pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 23:00 WIB.
- Plessis, J.J.D., Grobfeld, B., Lutterman, C., Saenger, I., Sandrock, O., Casper, M. (2012). *German Corporate Governance in International and European Context*. German: Springer.
- Puasa, S., Salleh, M. F. Md, & Ahmad, A. (2014). *Audit Committee and Timeliness of Financial Reporting: Malaysian Public Listed Company*. *Middle-East Journal of Scientific Research*. ISSN: 1990-9233.
- Ramdhaningsih, A. & Utama, I. M. K. (2013). Pengaruh Indikator *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas Pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Universitas Udayana. Vol 3.2, 2013.
- Sari, R. R. & Ghozali, I. (2014). Faktor-faktor Pengaruh *Audit Report Lag* (Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis*. Universitas Diponegoro. Vol 3, No. 2, 2012, pp. 1.
- Shukeri, S. & Islam, Md. A. (2012). *The Determinants of Audit Timeliness : Evidence from Malaysia*. *Journal of Applied Sciences Research*. Vol 8(7). ISSN: 1819-544X.
- Wardhani, A. P. & Raharja, S. (2013). Analisis Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Audit Report Lag*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis*, Universitas Diponegoro. Vol 2, No. 3, 2013, p. 1.
- Widhiarsari, N. M. S. & Budiarta, I. K. (2016), Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, dan Pergantian Auditor Terhadap *Audit Report Lag*. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Vol 15.1. 2016.

EARNING PERSISTENCE ON FIRM TAX DIFFERENCES AND FAMILY OWNERSHIP

Synthia Madyakusumawati¹

Unika Atma Jaya

synthia.madya@atmajaya.ac.id

Hyashinta Dyah P²

Unika Atma Jaya

hyasshinta.dyah@atmajaya.ac.id

Diterima 24 April 2020

Disetujui 2 Juni 2020

Abstract- Prior research find evidence consistent with the hypothesis that future earnings influenced by difference between accounting and fiscal earnings (book tax differences). Many investors forming expectations of future earnings information derived from the difference between fiscal and commercial earnings, there were some investors would satisfied to see small differences between fiscal and commercial earnings, otherwise have the opposite view. This study aim to investigate how book-tax difference and family ownership play a role in the persistence of earnings. The authors using a sample 692 firm years of Indonesian listed companies within 2011-2016, they estimate cross-sectional regressions of the proxy for book-tax differences and family ownership on earning persistence. The study found that current pre-tax earnings can predict future earnings and also firm years with large book-tax difference have less earnings persistence than firm years with small book tax difference. Further, this study found no evidence that family ownership have significant role in persistence of earnings.

Keywords: Earning Persistence, Future earnings, Pre-tax earnings, Book tax difference, Family Ownership.

1. INTRODUCTION

All of us will agree that earnings is the most popular from the whole financial report. Earnings always be favourite term to be discuss for everyone, even they are not economist. This condition is consistent with signalling theory, where the company will give signal (earnings) to the stakeholder in order to achieve their goals. As a signal, earnings should have several qualitative characteristics, which mentioned in Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2017. Accounting earnings is used to reflect fundamental performance. It is important to aligned accounting measures with the objects they reflect (Steen, 2016). We could identify companies which likely to show increasing or decreasing future earnings by studying the components of their current earnings. Quality of earnings is defined as relevant information level that a firm can provide financial statement users in their decision-making (Dechow, Ge, & Schrand, 2010). High quality of earnings represents the reliability and relevance of the accounting information. Earnings called relevance when it has predictive value, which is when it persistence.

We investigate the role of book-tax differences and family ownership in indicating the persistence of earnings. Financial accounting texts claims the difference between pre-tax book income and taxable income can provide information about current earnings. The underlying

reason is less discretion allowed in calculation of taxable income. Potential cost and benefit from small differences between fiscal and accounting earnings have been debated in Indonesia. Proponents suggest that small book-tax difference will simultaneously reduce aggressive financial reporting thereby improving earnings quality and increasing tax compliance (Atwood, Drake, & Myers, 2010). Opponents argue that the information required by financial statement users is different from that required by tax authorities, there for small book tax differences will lower earnings quality whereas vice versa large book tax differences will enhance quality of earning (Hanlon, Laplante, & Shevlin, 2005; Hanlon, Maydew, & Shevlin, 2008).

According to (Jensen, 2000), ownership structure is significant in determining firms' objectives, shareholders wealth and the disciplined of manager. Both managers and shareholders should have a single objective of maximizing firm value. The family controlled firm or family ownership is the most common form of business organization in the world, and even more popular in Indonesia and other Asia countries. The study of The Jakarta Consulting Group (Hariyanto & Juniarti, 2014) found that 85% Indonesian company's are family controlled.

Whether the family firm is an effective business models remains an issue of ambiguity. Some studies argue that family ownership is associated with lower abnormal accruals, greater earnings informativeness and less persistence of transitory loss components in earnings (Wang, 2006). Higher family ownership will result in lowering earning persistence. The company with family ownership in group firms, was both associated with lower earnings quality (Tessema, Kim, & Dandu, 2018). On the other hand, some studies found that family ownership will reduce agency problem, resulting efficient earnings management and increasing earnings persistence (Siregar & Utama, 2008)

Our result indicate that for firm-years with large book-tax difference have less persistence for one-year-ahead earnings than firm years with small book tax difference. This consistent for the large positive and the negative one. This evidence is consistent with the proponent's conjecture that large book-tax differences will resulting lower earnings persistence. In the other hand, my result could not found evidence that family ownership has impact in persistence of earnings. This result indicate that the persistence of earnings will not differ between company owned by family or not.

The remainder of this paper is organized as follow. Section 2 discusses prior literature review and develops our hypotheses. Section 3 describes our research design and sample selection. Section 4 describes descriptive statistics, and test result. Section 5 concludes the paper.

2. LITERATURE REVIEW

2.1. Book-Tax Differences

Book-Tax Differences defined as discrepancy between accounting earnings and fiscal earnings. Management calculates corporate income tax for two purposes each year, the first is for financial reporting purposes under SAK and the second is in accordance with the Direktorat Jendral Pajak to determine corporate income tax liabilities. For most corporations, taxable income is calculate based on accrual basis rather than cash basis. The difference method in calculating income tax expense will result in difference number of tax expense. Differences between accounting income and taxable income can be large. Some differences, known as permanent differences and the others known as temporary difference. (Hanlon, Krishna, & Mill, 2012) stated that these differences give incentives applying to accounting and fiscal earnings have the effect of making each of these earnings measures incrementally informative relative

to the other, and they present evidence that fiscal earnings is informative even after controlling for accounting income. There are three types of book-tax differences. First, differences in the timing of accrual recognition between book and taxable income which called temporary differences (e.g., bad debt reserve, warranty reserve, depreciation, etc.). Temporary differences present information about the quality of pre-tax accounting accruals. Second, permanent book-tax differences, e.g interest revenue, tax penalties, final accounting revenue. Permanent differences denote as pre-tax book and fiscal earnings that never reverse. Permanent differences are not often suspected to be indicators of earnings quality in terms of accruals manipulation due to they are not related to the timing of accrual recognition. The third are book-tax differences that do not affect earnings before tax, but influence income tax expense account and, thus, only after-tax earnings. Examples include tax accruals such as the contingency reserve and the valuation allowance (Hanlon, Krishna, & Mill, 2012)

Following (Hanlon, Laplante, & Shevlin, 2005) exclude permanent difference in this study, because permanent differences are difficult to measure. So, I do not examine the relation between permanent differences and earning persistence.

Differences between accounting income and taxable income can be also small. Small book tax differences simultaneously provides incentives for managers to reduce tax avoidance and to report accounting earnings less aggressively, which will result in improved earnings quality (Desai, 2005; Whitaker, 2006). Higher quality of earnings indicating higher persistence of earnings.

Furthermore the opponents argue that small book tax differences will result in lower quality (or less informative) accounting earnings (Hanlon, Maydew, & Shevlin, 2008; Hanlon, Laplante, & Shevlin, 2005). They argue that the information required by taxing authorities differs from that required by investor. The tax system is designed to meet the government's goals of increasing revenue. In contrast, accounting earnings provides information about firm performance and is intended to reduce information asymmetries between management and shareholders. Thus, the accounting system is designed to allow managers flexibility in conveying information to the market (Hanlon, Laplante, & Shevlin, 2005). As a result of these different goals, opponents argue that small book tax differences will reduce the quality of information available to investors and other financial statement users.

2.2. Family Ownership

Families and business company control a high percentage corporations in developed countries. Some of the company relate with one or more other families. This information implies that, in most cases, there are majority shareholder who do the control over the strategic decisions the firm and bear the consequences. Family ownership play an important role in large firms in Indonesia, regarding the relationship between concentrated family ownership and control on the one hand and firm performance on the other hand. Family ownership structure plays an important role on earnings persistence.

Based on agency theory (Jensen, 2000), agency problem arise from separation between de facto ownership and control between corporate insiders (e.g. controlling shareholders) and outsiders (e.g. minority shareholders). Family ownership, how ever represent controlling share holders, while minority share holder represent others (de Sousa & Galdi, 2016), controlling or concentration might have a negative effect on performance (earning persistence) if majority shareholders take advantage of the opportunity to expropriate minority shareholders. On the other hand, regarding about dimension of family control characteristics, family involvement may have a positive effect on performance if the firm's governance institutions. Contradictory many research found that family firms under perform non family firms, however recent studies

in Asia conclude a doubt on this conclusion, and even state the active involvement of the family in management responsibilities is positive for the firm (Majluf, 2008)

Studies found that 85% of Indonesian company is characterized by family business, where most firms have concentrated ownership structures. Therefore, Indonesia company are family controlled. Actually this condition will reduce agency problem type 1 (problem between principal and agent), because there will more engagement between principal and their agent (Astuti, Rahman, & Sudarno, 2015). Besides, this family ownership will more concerned with the company's going concern due to they have it (Segura & Formigoni, 2014). Since this principal is more concerned, so they will more controlled the agent too (Ibrahim & Samad, 2011). So the agent will prepare the efficient earnings management which will increasing the earnings quality (Siregar & Utama, 2008). Actually this condition is support the stewardship theory, where the agent will act as a steward. As a steward, agent will place higher value on cooperation and trustworthy.

Consistent with prior research in this country, this study also stand in the stewardship theory. This study assume that the earnings management in family ownership will efficient so increasing the earning quality

2.3. Earning Quality

Earnings quality is conditional on the decision relevance of the information. The Quality of reported earnings number depends on how informativeness the earning present financial performance (de Sousa & Galdi, 2016). Studies examining earnings quality in both, book-tax differences and family ownership related, provide mixed evidence. (Hanlon, Laplante, & Shevlin, 2005) found that firm-years with large book-tax difference have earnings that are less persistent than firm-years with small one. This means that large book-tax difference will reduce earnings quality. This study was opposite with (Atwood, Drake, & Myers, 2010) (Hanlon, Maydew, & Shevlin, 2008) where they found that increased in book-tax conformity may reduce earnings quality. It means that large book-tax difference may increase the earnings quality.

Meanwhile, studies related with family ownership and earnings quality also still have no consistent result. Several studies found that higher family ownership will decreasing earnings (Wang, 2006) (Tessema, Kim, & Dandu, 2018). But Siregar & Utama (2008) found that higher family ownership will increasing earnings quality.

In our country, SAK has mentioned four qualitative characteristics of financial report, that are: relevance, reliable, comparability, and understandable. In this study, we will discuss more about relevance. Information called relevance if the quality or state of being closely connected or appropriate. In the context of financial report, it would relevance if the financial information could effected the user's decision by evaluating prior event, or predicting future, and also correcting prior evaluation.

There are several requirements related to relevance: 1) feedback value; 2) predictive value; 3) timeliness; and 4) complete. In this study, we will focus on predictive value. Financial information will ha predictive value if they could help user in order to predict future by using prior and current information. So, the financial information should be persistence.

One of the most popular information in the financial report is earnings. Earnings also used widely by company as a signal to their stakeholder that management performed great or not. Higher earnings usually indicate higher management performances. Since earnings commonly used by stakeholder to make decision, so earnings should be persistence.

2.4. Hypotheses

We suggest an increasing of book-tax difference will reduce the earnings persistence. The more differences between accounting income and taxable income indicating that the management perform more tax aggressiveness where lead to decreasing earnings quality. Decreasing quality of earnings indicating lower persistence of earnings. So, the first hypothesis is Large Positive Book-Tax Difference or Large Negative Book-Tax Difference have lower earnings persistence than Small Book-Tax Difference.

Meanwhile, the family ownership expected will lower the agency problem, produce more engagement with the management and more control, where lead to increasing earning quality. Increasing earning quality indicating higher persistence of earnings. So, the next hypothesis is higher family ownership will generate higher earning persistence.

3. RESEARCH METHODS

We start with a sample of firm year 2011-2016 from Indonesia Stock Exchange data. Our sample consists of 1037 observation (200 firms), exclude financial services industries. To be included in the final sample, the observation must not have missing variables uses in the regression, a reported financial reporting loss, a negative current tax expense. The reason for these screens is that tax losses can be carried forward and thus become deferred tax assets, changes in which can obscure the effects of “true” book tax difference in the deferred tax expense account. Our final sample consist of 692 observation (174 firms). We partition this sample into three subsamples : LPBTD (Large Positive Book Tax Difference -129 firm years), LNBTD (Large Negative Book tax difference - 98 firm years), and SBTD (small book tax difference - 465 firm years).

3.1. Research Design

Prior studies examining book tax differences in the properties of accounting earnings generally do not control for the effect of family ownership structure, (Majluf, 2008; Ibrahim & Samad, 2011). First, we estimate earning persistence by regression to prove the pre-tax book income current year (PTBI_t) can predict future earnings (PTBI_{t+1}). Second, we examining whether small book tax differences have higher persistence of future earnings. We estimate whether the persistence of future earnings is lower for firm years with large negative or large positive book tax differences relative to firm years with small book tax differences

3.1.1. Earnings Persistence

Test of earnings persistence can be measured by regression pre tax book income current year to pre tax book income one year ahead. We estimate the persistence of pre tax earnings using the following equation :

$$PTBI_{t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 PTBI_t + \varepsilon_{t+1} \quad (1)$$

Where PTBI is pre tax book income, as in (Hanlon, Laplante, & Shevlin, 2005), we scale all variable by average total assets to allow for cross sectional comparability.

We use the first equation to reveal the prove of persistence of earnings, that is the pre-tax book income current year (PTBI_t) can predict future earnings (PTBI_{t+1}). Persistence of earnings proved by a significant value below p-Value 0.05, therefore PTBI_{t+1} is considered as a reflection of current earnings, accordingly PTBI_{t+1} can be used as a predictor for the second equation.

3.1.2. The persistence of future earnings is lower for firm years with large negative or large positive book tax differences relative to firm years with small book tax differences

We have known there were two point of views about the scale of book tax differences. Some of them agree that small book tax difference overviewed persistence of future earnings, while the other refused this views.

To test whether firm years with large negative (positive) book tax difference have lower earnings persistence, we estimate equation (2)

$$PTBI_{t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 LNBTD_t + \alpha_2 LPBTD_t + \alpha_3 PTBI_t + \alpha_4 PTBI_t \times LNBTD_t + \alpha_5 PTBI_t \times LPBTD_t + \alpha_6 FAM_t \times PTBI_t + \varepsilon_{t+1} \tag{2}$$

In equation (2):

PTBI_{t+1} : Pre-tax earnings next year

LNBTD (large negative book tax difference) : is an indicator variable equal to 1 for firm years with scaled temporary book tax differences in the lowest quintile of firms in each year, and 0 otherwise

LPBTD (large positive book tax difference) : is an indicator variable equal to 1 for firm years with scaled temporary book tax differences in the highest quintile of firms in each year, and 0 otherwise

PTBI_t : Pre-tax earnings current year

FAM_t : Family ownership structure

If firm years having large negative (positive) book tax differences have lower earnings persistence than firm years with small book tax differences, then $\alpha_4 < 0$ ($\alpha_5 < 0$), consistent with hypotheses 2

If family ownership structure with current earnings have impact in predicting future earnings, then α_6 will have significant p-value ($< 0,05$), consistent with hypotheses 3

4. RESULT AND DISCUSSION

4.1. Statistic descriptive

in million Rupiah	<i>Fam (% Family Ownership)</i>	<i>LNBTDr</i>	<i>LPBTDr</i>	<i>PTBI (t) (in thousand Rp)</i>	<i>PTBI (t+1)</i>
Mean	45	0,186	0,142	282.506,339	302.245,764
Median	57	-	-	68.990,748	77.390,431
Mode	-	-	-	269.216,864	203.109,149
Standard Deviation	35	0,390	0,349	1.335.542,756	1.382.611,199
Range	100	1,000	1,000	27.214.192,894	28.637.276,742
Minimum	-	-	-	-65.192,894	-24.276,742
Maximum	100	1,000	1,000	27.149.000,000	28.613.000,000
Count	692	692,000	692,000	692,000	692,000

Statistic descriptive (continued)

in million Rupiah	<i>PTBI_X_FAM</i>	<i>PTBI_X_LN</i>	<i>PTBI_X_LP</i>
Mean	10.792.370,031	76.431,766	102.983,334
Median	1.584.674,524	-	-
Mode	-	-	-
Standard Deviation	63.445.564,653	772.183,315	1.086.218,340
Range	1.578.810.135,098	17.076.639,894	27.149.000,000
Minimum	-5.251.287,598	-65.192,894	-
Maximum	1.573.558.847,500	17.011.447,000	27.149.000,000
Count	692,000	692,000	692,000

The highest percentage for family ownership structure is 100% (BALI 2012, BALI 2013, AGII 2012, AGII 2013, IMPC 2013, WTON 2013) whereas the minimum is 0%. On Average, the observation have 45% family ownership structure in their equity. This number provides a general overview about ownership structure in Indonesia where the average of the company's ownership structure is owned by families.

As mentioned above we partition this sample into three sub samples: LPBTD (129 firm years), LNBTDr (98 firm years), and small book tax difference (465 firm years). Maximum of PTBI is 27.149 trillion (TLKM 2013) and the minimum of PTBI is -65.192 mio (NIKL 2015)

4.2. Results from tests of earnings persistence and the association between earnings

Table 2. Test of first hypotheses

Dependent Variable: PTBI_T1

Method: Least Squares

Date: 01/15/19 Time: 20:39

Sample: 1 692

Included observations: 692

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10029.28	2160.479	4.642157	0.0000
PTBI_T0	1.034406	0.001584	653.1350	0.0000
R-squared	0.998385	Mean dependent var		302253.2
Adjusted R-squared	0.998383	S.D. dependent var		1382610.
S.E. of regression	55601.28	Akaike info criterion		24.69269
Sum squared resid	2.13E+12	Schwarz criterion		24.70581
Log likelihood	-8541.669	Hannan-Quinn criter.		24.69776
F-statistic	426585.3	Durbin-Watson stat		1.750981
Prob(F-statistic)	0.000000			

Table 2 presents the result from hypotheses 1. We use the first equation to reveal the prove of persistence of earnings, that is the pre-tax book income current year (PTBI t) can predict future earnings (PTBI_{t+1}). p-value in table 2 indicates that firm years in our sample have consistent results with previous findings in (Hanlon, Laplante, & Shevlin, 2005; Subekti, Wijayanti, & Rahmawati, 2008; Eka & Dwi, 2010).

Table 3 presents the result from hypotheses 2, it reveals that firm years with large book tax difference have lower persistence in pre-tax earnings than firm years with small book tax differences. Firm years with large negative and large positive book tax differences have significantly less persistence of earnings than firm years with small book tax differences that is α_4 -0.093 α_5 -0.032, two tailed p-values of 0,00001 consistent with the alternate hypotheses stated in H2, while α_6 family ownership have no significance influence to earning persistence. Our sample also have consistent results with previous findings in (Hanlon, Laplante, & Shevlin, 2005) (Hanlon, Maydew, & Shevlin, An unintended consequence of book-tax conformity: a loss of earnings informativeness, 2008) (Eka & Dwi, 2010)

Table 3 Test of second hypotheses

Dependent Variable: PTBI_T1

Method: Least Squares

Date: 01/15/19 Time: 20:45

Sample: 1 692

Included observations: 692

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3848.791	2411.226	1.596197	0.1109
PTBI_T0	1.085696	0.007351	147.6970	0.0000
LNBTD	5054.770	3909.204	1.293043	0.1964
LPBTD	2887.864	5187.627	0.556683	0.5779
FAM	20.59441	40.06756	0.513992	0.6074
PTBI_X_LN	-0.092269	0.007779	-11.86167	0.0000
PTBI_X_LP	-0.032230	0.007379	-4.368007	0.0000
PTBI_X_FAM	-0.001760	0.004410	-0.399199	0.6899
R-squared	0.999241	Mean dependent var	302253.2	
Adjusted R-squared	0.999233	S.D. dependent var	1382610.	
S.E. of regression	38288.37	Akaike info criterion	23.95517	
Sum squared resid	1.00E+12	Schwarz criterion	24.00765	
Log likelihood	-8280.490	Hannan-Quinn criter.	23.97547	
F-statistic	128622.2	Durbin-Watson stat	1.856501	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Table 4 (Robustness Test : exclude family ownership variable)

Dependent Variable: PTBI_T1

Method: Least Squares

Date: 01/27/19 Time: 13:53

Sample: 1 692

Included observations: 692

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4794.102	1601.238	2.993998	0.0029
PTBI_T0	1.085009	0.007285	148.9352	0.0000
LNBTD	5062.617	3869.503	1.308338	0.1912
LPBTD	2385.841	5081.504	0.469515	0.6389
PTBI_X_LN	-0.092732	0.007386	-12.55591	0.0000
PTBI_X_LP	-0.031601	0.007301	-4.328256	0.0000
R-squared	0.999240	Mean dependent var	302253.2	
Adjusted R-squared	0.999235	S.D. dependent var	1382610.	

S.E. of regression	38242.01	Akaike info criterion	23.94989
Sum squared resid	1.00E+12	Schwarz criterion	23.98925
Log likelihood	-8280.662	Hannan-Quinn criter.	23.96511
F-statistic	180507.8	Durbin-Watson stat	1.856727
Prob(F-statistic)	0.000000		

Table 4, We exclude family ownership variable to control test whether the large book tax difference still have lower persistence in pre-tax earnings than firm years with small book tax differences. The results consistent with table 3, that is firm years with large negative and large positive book tax differences have significantly less persistence earnings than firm-years with small book tax differences that is $\alpha_4 -0.093$ $\alpha_5 -0.032$, two tailed p-values of 0,00001 consistent with the alternate hypotheses stated in H2.

5. CONCLUSION

The objective of our research is to examine the role of temporary book-tax differences in indicating the persistence of earnings.

We find evidence that firm years with large positive book tax difference have lower earning persistence than firm year with small book tax difference. This result is consistent with common notion that when book income is far in excess of taxable income, earnings have lower quality.

We also find evidence that firm years with large negative book tax difference have lower earning persistence than firm years with small book tax difference. Large negative book-tax differences are associated with accruals that have lower persistence for future earnings. This lower earnings persistence also robust after we exclude family ownership variable in the equation.

We include family ownership structure to examine whether book tax difference moderating with family ownership structure will lower persistence of future earnings. The result indicate family ownership structure moderating with book tax difference have no relation with future earnings.

There are several limitation to this research. First the limited sample size and time period impede generalizing the results to other sample and period of times. Second, the limitation of family ownership structure measurement, future research need to lookup the effect of controlling share holder and entrenchment effects of real family ownership.

REFERENCES

- Abiot Tessema, Moo Sung Kim, Jagadish Dandu. (August 2018). The impact of ownership structure on earnings quality: the case of South Korea. *International Journal of Disclosure and Governance*, 15(3), 129–141.
- Michelle Hanlon., Maydew, E., Shevlin, T. (2008). An unintended consequence of book-tax conformity: a loss of earnings informativeness. *Journal of Accounting & Economics*, 46, 294–311.
- Abdelghany, K. E. (2005). Measuring the quality of earnings. *Managerial Auditing Journal*, 9(2005), 1001-1015.
- Abdelghany, K. E. (2005). Measuring the quality of earnings. *Managerial Auditing Journal*, 20 No. 9, pp 1001-1015.
- Apri Dwi Astuti., Abdul Rahman., Sudarno Sudarno. (2015). Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Kinerja Perusahaan dengan Agency Cost Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), 98-108.
- Dechow, P., Ge, W., & Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. *Journal of Accounting and Economics* 50(2), 344-401. doi:10.1016/j.jacceco.2010.09.001.
- Desai, M. (2005). The degradation of reported corporate profits. *The Journal of Economic Perspectives*, 19, 171-193.
- Djamaluddin Subekti., Handayani Tri Wijayanti., Rahmawati Rahmawati. (2008). Analisis Perbedaan Antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba, Aktual, dan Aliran Kas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *The Indonesia Journal of Accounting Research*, 11(1).
- Erivelto Fioresi de Sousa., Fernando Caio Galdi. (2016). The Relationship Between Equity Ownership concentration and Earnings Quality Evidence From Brazil. *Revista de Administracao*, 51, 331-343.
- Haslindar Ibrahim., Fazilah Abdul Samad. (February 2011). Corporate Governance Mechanisms and Performance of Public-Listed Family-Ownership in Malaysia. *International Journal of Economics and Finance*, 3(1), 105-115.
- Jensen, M. (2000). A Theory of the Firm: Governance, Residual Claims, and Organizational Forms. *Harvard University Press Cambridge*.
- Lidia Hariyanto., Juniarti. (2014). Pengaruh Family Control, Firm Risk, Firm Size Dan Firm Age Terhadap Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan Pada Sektor. *BUSINESS ACCOUNTING REVIEW*, VOL. 2, No. 1, 141-150.
- Majluf, F. S. (2008). Does family ownership shape performance outcomes? *Journal of Business Research*, 61, 609-614.
- Michelle Hanlon, Gopal V. Krishnan, and Lillian F. Mill. (Spring 2012). Audit Fees and Book-Tax Differences. *Journal of the American Taxation Association (JATA) Vol. 34, No. 1*, 55–86.
- Michelle Hanlon, Laplante, S.K., Shevlin, T. (2005). Evidence on the possible information loss of conforming book income and taxable income. *Journal of Law and Economics*, 48, 407–442.
- Persada Aulia Eka., Martani Dwi. (2010). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Book Tax Gap Dan Pengaruhnya Terhadap Persistensi Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 205-221.

Segura, L. C., & Formigoni, H. (2014). Influence of Control and Family Management in the Indebtedness of Brazilian Open Business: a Quantitative Study. *Brazillian Business Review*, 11(6), 50.

Segura, L. C., & Formigoni, H. (2014). Influence of Control and Family Management in the Indebtedness of Brazilian Open Business: a Quantitative Study. *Brazillian Business Review*, 11(6)(50.).

Steen, H. (2016). Organizational Performance And Earnings Quality: A Quantitative Examination Of The Impact Of Organizational Performance On Earnings Quality. *A Dissertation Presented in Partial Fulfillment. Capella University. ProQuest 10130057.*

Sylvia Veronica Siregar., Sidharta Utama. (2008). Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size, and corporate-governance practices: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting*, 43(1), 1-27.

T.J. Atwood, Michael S. Drake, Linda A. Myers. (2010). Book-tax conformity, earnings persistence and the association between earnings and future cash flows. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 111–125.

Wang, D. (June 2006). Founding Family Ownership and Earnings Quality. *Journal of Accounting Research*, 44(3), 619-656.

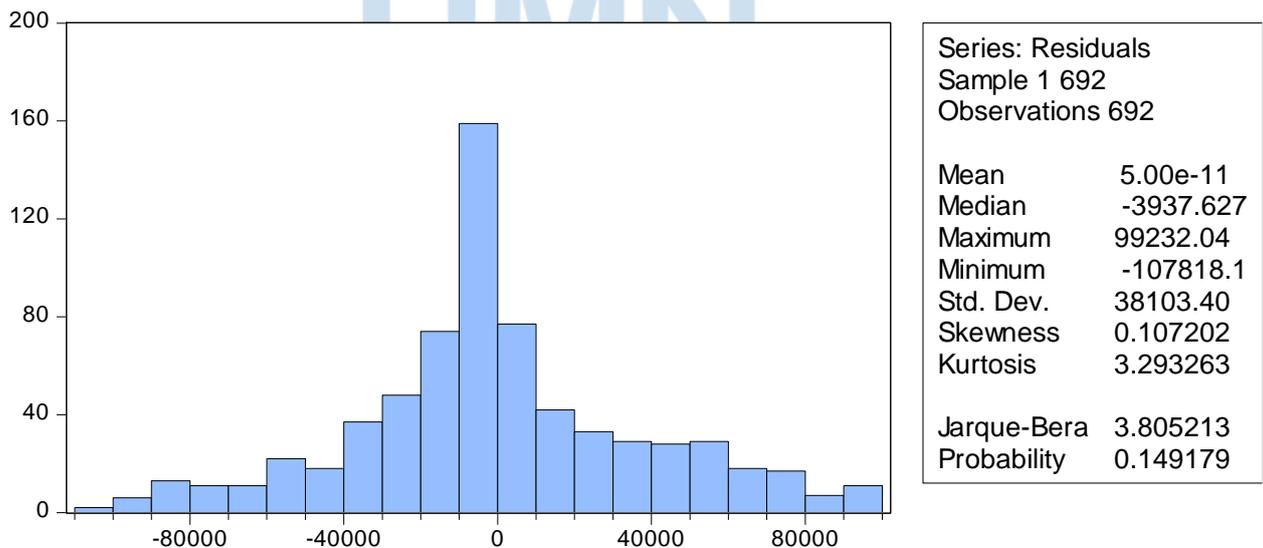
Whitaker, C. (2006). *How to build a bridge: eliminating the book-tax gap*. *The Tax Lawyer* 59.

Whitaker, C. (2006). *How to build a bridge: eliminating the book-tax gap*. *The Tax Lawyer*, 59.

Appendix

a. Normality Test

View > Residual Diagnostics > Histogram – Normality Test



b. Multicollinearity Test

Variance Inflation Factors
 Date: 01/27/19 Time: 13:32
 Sample: 1 692
 Included observations: 692

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2563962.	1.434150	NA
PTBI_T0	5.31E-05	303.6521	297.5147
LNBTD	14973054	1.231629	1.050509
LPBTD	25821681	1.301959	1.184597
PTBI_X_LN	5.45E-05	37.78460	37.67177
PTBI_X_LP	5.33E-05	266.9670	263.4233

c. Heteroskedasticity Test

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	16.12240	Prob. F(8,683)	0.0000
Obs*R-squared	109.9210	Prob. Chi-Square(8)	0.0000
Scaled explained SS	123.8628	Prob. Chi-Square(8)	0.0000

Prob. Chi-Square (yang kedua) = 0.0000 < 0.05 → ada heteroskedastisitas

d. Autocorrelation Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.875388	Prob. F(2,684)	0.1541
Obs*R-squared	3.773950	Prob. Chi-Square(2)	0.1515

e. Linearity Test

Ramsey RESET Test
 Equation: MODEL_2_NO_FAM
 Specification: PTBI_T1 C PTBI_T0 LNBTD LPBTD PTBI_X_LN PTBI_X_LP
 Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3

	Value	df	Probability
F-statistic	0.683165	(2, 684)	0.5054
Likelihood ratio	1.380932	2	0.5013

TRANSAKSI AFILIASI DAN *CAPITAL INTENSITY* MEMPENGARUHI EMITEN DALAM MENGHINDARI PAJAK

Memed Sueb

FEB Universitas Padjadjaran, Bandung

Memed.sueb@fe.unpad.ac.id

Diterima 9 Juni 2020

Disetujui 19 Juni 2020

Abstract- Target of tax for several last year show increase positive as need of fund on State Budget. But on the other hand of emiten which listing in stock exchange Indonesia always comply to efisiensi of tax as tax planning. That is way by this research expected to find solution about what was variable effect to emiten comply tax efisiensi. Target of population were emiten which stock exchange for 3 year periode 2015 until 2017. Purposive sampling was choose to find out research data. The research selected 54 emiten as sample for representative of emitens. Tax avoidance was measured by proxy effective tax rates; affiliated transaction was measured by liabilities transaction affiliated. Hyphotesis was examined by multiple regression dan decision that: 1) Transaction affiliated affect emiten Industry manufacturing sector listed in Indonesia Stock Exchange during period in 2015-2017 for comply tax avoidance. Emitens have indication often make transaction with group (affiliated) for tax avoidance; 2) Capital intensity not affect emiten manufacturing sector listed in Indonesia Stock Exchange during period in 2015-2017 for comply tax avoidance. Emitens listed in Bursa Efek Indonesia higest invested on fixed asset not objective for tax avoidance but to support operating activity inclined rise.

Keywords: *Affiliated Transaction, Capital Intensity, Tax Avoidance,*

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan jalannya pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit, oleh karenanya pemerintah harus mencari berbagai sumber pendanaan. Salah satu penerimaan Negara diantaranya adalah pajak, sebagai salah satu produk politik yang diatur dengan undang-undang. Ini yang menjadi ciri khas dalam pemungutan pajak yang harus diatur berdasarkan undang-undang disertai dengan ketentuan turunannya sampai kepada Surat Edaran Dirjen Pajak. Hal tersebut sesuai dengan teori di dalam azas pemungutan yang menegaskan bahwa pemungutan pajak tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan memungut melainkan harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Pajak sebagai hasil kompromi antara pemerintah dengan rakyatnya yang diwakili oleh anggota DPR mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan. Artinya jika RUU yang diajukan oleh pihak eksekutif ke pihak legislatif lalu RUU tersebut disetujui dan menjadi Undang-undang maka semestinya para wajib pajak harus dapat melaksanakan UU Pajak tersebut karena sudah menyetujuinya.

Sampai saat ini pajak masih punya peran penting dalam penerimaan Negara. Oleh karena itu ketika para calon presiden berkampanye di depan masyarakat menjanjikan akan

memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Ucapan ini tidak hanya berlaku untuk Negara tertentu tapi berlaku untuk semua Negara agar rakyatnya tertarik terhadap calon presiden tersebut. Namun demikian untuk mencapai Negara yang makmur sejahtera berkeadilan bukan hal yang mudah tapi diperlukan kerja keras dan tidak sedikit menguras pengorbanan. Agar tercapai semua cita-cita untuk mensejahterakan rakyat perlu adanya penerimaan Negara yang memadai yaitu dari pajak yang sampai saat ini masih menjadi tumpuan penerimaan Negara. Hal tersebut senada dengan pendapat yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya (Cahyadi Putra & Merkusiwati, 2016) yang mengatakan bahwa negara dapat maju berkembang dalam mensejahterakan rakyat demi masa depannya sebagai cermin kemampuan Negara dalam mengelola penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak.

Target pajak dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang positif sejalan kebutuhan dana yang ada dalam APBN. Menteri Keuangan yang paling bertanggungjawab dalam pencapaian penerimaan pajak yang harus kerja keras memutar otak bagaimana caranya agar target pajak setiap tahun tercapai. Ketercapaian penerimaan pajak menunjukkan bahwa anggaran yang sudah disajikan dalam APBN harus dapat dipenuhi. Menteri keuangan dalam jumpa pers mengenai penerimaan pajak tahun 2017 dicapai 91% dari target APBN perubahan tahun 2017. Capaian tersebut termasuk paling tinggi dibandingkan dengan target tahun sebelumnya pada tahun 2015; 2016; masing-masing 83,3% dan 83,5 Informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tersebut memberikan gambaran bahwa penerimaan pajak sangat penting dalam rangka memenuhi pencapaian APBN.

Berdasarkan pengalaman empiris dalam beberapa tahun terakhir ini peranan penerimaan perpajakan sangat dominan untuk menyelamatkan APBN (Hutagaol, 2006). Oleh karena itu penerimaan pajak (*tax revenue management*) merupakan suatu keharusan agar kontribusi pada APBN dapat berlangsung secara terus menerus (*the sustainability of tax revenues contributin on the State Budget*). Uraian tersebut di atas mendorong penulis mengadakan penelitian untuk mengetahui praktik para emiten dalam menghindari pajak. Ketika pemerintah sedang gencar meningkatkan penerimaan pajak, pada saat yang sama perusahaan (emiten) selalu berusaha melakukan pembayaran pajak secara efisien baik secara legal maupun ilegal.

Salah satu cara para emiten sebagai bentuk perlawanan aktif dalam menghadapi pajak yaitu secara terus menerus berupaya menghindari pembayaran pajak yang tidak semestinya. Upaya tersebut dianggap sudah biasa dilakukan oleh para pengusaha (wajib pajak) diantaranya untuk menghindari dalam memenuhi beban pajaknya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan (Hanlon & Heitzman, 2010) yang menyatakan bahwa belum ada definisi yang disepakati oleh semua pihak mengenai cara para wajib pajak dalam menghindari kewajiban pajak yang tidak semestinya, untuk itu definisi cara menghindari pajak masih berbeda-beda (*different things to different people*). Hal senada disampaikan pula oleh (Dyreng et al., 2008b) memberikan definisi lebih luas mengenai yang dimaksud dengan menghindari pajak, yaitu sebagai bentuk upaya dalam mengurangi kewajiban pajaknya oleh para pengusaha sepanjang dianggap legal. Goh et al., (2016) memberikan pendapatnya yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pengusaha untuk menghindari kewajibannya membayar pajak dapat membantu *cash flow* perusahaan.

Menghindari kewajiban untuk membayar beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pada dasarnya adalah suatu usaha dalam mengurangi kewajiban pajaknya semaksimal

mungkin yang bertujuan agar tidak mengganggu *cash flow* perusahaan pada batas koridor yang diperbolehkan ketentuan yang ada dalam suatu Negara berupa undang-undang. Dampak yang terjadi akibat dari tindakan perusahaan yang melakukan menghindari pajak akan mengurangi penerimaan Negara. Freire-Serén & Martí (2013) berpendapat menghindari pajak oleh para pengusaha akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Bentuk lain cara menghindari pembayaran pajak walaupun sudah keluar dari koridor yang diperbolehkan secara undang-undang perpajakan yaitu disebut *tax evasion*. Menurut Hutagaol (2006), Gunadi (2007) dan Zain (2007) fenomena di Indonesia para wajib pajak melakukan penghindaran pajak disebabkan oleh beberapa alasan: 1) ada peluang akibat belum diatur dalam undang-undang perpajakan; 2) perbuatannya akan diketahui relatif kecil; 3) manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding dengan risikonya; 4) sanksi perpajakan tidak terlalu berat; 5) adanya perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap wajib pajak; 6) adanya diskriminasi dalam pemberian sanksi hukum.

Cara meminimalkan kewajiban pajak agar pajak yang dibayar efisien dan cara ini sudah termasuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pajak. Praktek seperti ini dianggap ilegal dan sangat berisiko untuk siapapun yang menjalankan *tax evasion* ini dapat dikenakan sanksi pidana pajak. Oleh karena itu aparat pemerintah dalam hal ini petugas pajak tidak dapat bertindak untuk memberikan sanksi kepada para pengusaha yang mengurangi kewajibannya selama tidak ada peraturan yang dilanggar. Penelitian pajak termasuk topik yang selalu hangat dan menarik untuk diteliti, karena persoalan pajak akan terus menerus muncul sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Bahkan berkembangnya pajak baik yang menyangkut objek maupun objek pajak dikarenakan oleh adanya kasus yang muncul di masyarakat.

Penelitian ini termasuk *explanatory research* yaitu untuk menguji variabel X dan Y hipotesis testing dipilih sebagai cara untuk mengkaji mengenai transaksi terafiliasi dan meningkatnya jumlah investasi dalam aktiva tetap pada para emiten. Adapun obyek yang diteliti merupakan para emiten yang menjual sahamnya di pasar bursa dalam hal ini adalah Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan selama tiga periode pengamatan yang dimulai sejak tahun 2015 s/d 2017. Adapun luaran dari kajian ini adalah untuk mencari jawaban mengenai apakah transaksi afiliasi dan *capital intensity* mempengaruhi para emiten (perusahaan) dalam menghindari pajak. Untuk itu diharapkan hasilnya dapat memberikan masukan kepada para emiten agar dalam praktek menghindari pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan; pembuat kebijakan fiskal didalam menghadapi perilaku para emiten dalam praktik penghindaran pajak. Disamping itu semoga bermanfaat juga bagi para pemerhati pajak dalam melakukan kajian di masa yang akan datang guna penyempurnaan dan pengkayaan keilmuan bidang pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen yaitu para emiten yang diindikasikan mempunyai transaksi afiliasi dan memiliki intensitas aset yang besar; sedangkan variabel independen peneliti sebelumnya adalah laba, hutang, ukuran perusahaan, akses politik, struktur kepemilikan, karakter eksekutif, dan intensitas aset.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Teori Agensi

Penelitian ini didasarkan pada teori agensi yang sudah dikembangkan oleh Ross (1973); lalu para pendukung berikutnya (Jensen & Meckling, 1976; Fama & Jensen, 1983),

yang mengatakan bahwa terdapat hubungan antara pemilik dengan pengelola, para pengelola berupaya perusahaan memperoleh laba agar aset para investor bertambah sebagai bentuk tanggungjawab atas pendelegasian yang diberikan oleh pemilik sebagai investor. Topik pajak sampai saat ini termasuk bahan kajian yang banyak peminat peneliti untuk menelitinya. Peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian Gupta & Newberry, (1997); Dyreng et al., (2008a); Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias (2012); dan Himmah & Sedianingsih (2018). Banyak peminat untuk meneliti pajak dikarenakan pajak sangat populer dan termasuk bidang yang banyak diperhatikan masyarakat, karena paling bersentuhan langsung dengan kehidupan berupa harta dan penghasilan. Oleh karena itu para peneliti sebelumnya sudah banyak yang meneliti mengenai pajak, khususnya mengenai cara menghindari pembayaran pajak. Namun demikian menurut para ahli bahwa mengenai praktik transaksi afiliasi dan *capital intensity* banyak dilaksanakan oleh perusahaan besar dalam rangka perencanaan pajak.

Para wajib pajak selalu berusaha agar kewajiban pajaknya berkurang atau seefisien mungkin yaitu dengan cara penghematan pajak (*tax saving*). Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Zain (2007) yang mengatakan bahwa penghematan merupakan strategi oleh para pengusaha dalam memperkecil kewajiban pajaknya untuk yang diluar lingkup pemajakan, maksudnya adalah menghindari pembayaran beban pajak suatu usaha hampir sama seperti penghematan pajak cuma dengan cara mencari celah kelemahan di dalam peraturan pajak yang berlaku. Lebih lanjut Faisal (2016) berpendapat bahwa menghindari pajak dengan skema transaksi yang bertujuan untuk meminimalisasi kewajiban pajak dengan mengeksploitasi kecurang sempurnaan undang-undang perpajakan dengan tanpa melanggar hukum. Sehingga aparat direktorat jenderal pajak tidak dapat melakukan tindakan apapun.

Pada prinsipnya cara menghindari pajak sepanjang tidak menyalahi peraturan yang berlaku di Indonesia masih dapat ditolelir, karena termasuk strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dan sebagai bentuk dalam perlawanan aktif. *Effective tax rates* sering digunakan untuk mengukur penelitian mengenai para wajib pajak yang berusaha menghindari kewajiban membayar pajak. Frank et al., (2009) berpendapat bahwa *Effective tax rates* adalah sebagai gambaran adanya perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi (komersial). Selanjutnya, Hanlon & Heitzman (2010) berdasarkan hasil penelitiannya berpendapat bahwa untuk menghitung *effective tax rates* (ETR) diperoleh dengan cara membagi hutang pajak atau kewajiban pajak perusahaan dengan penghasilan kena pajak atau laba sebelum pajak. Begitu juga dalam penelitian ini untuk menghitung *effective tax rate* dihitung menggunakan cara yang sama yaitu total kewajiban dibagi dengan penghasilan sebelum kena pajak. Peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian serupa diantaranya adalah Hanlon & Heitzman (2010); Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias (2012); Freire-Serén & Panadés i Martí (2013); Khomsatun & Martani (2015); Goh et al., (2016); Irianto, Sudibyoy & Wafirli (2017);Holzmann (2018a); dan Anindyka, Dimas, Pratomo, Dudi, Kurnia (2018).

Berdasarkan cara tersebut dapat diketahui perbandingan kewajiban pajak yang ditimbulkan dari laba kena pajak (LKP) sesuai fiskus (undang-undang pajak), terhadap laba komersial mengikuti aturan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga dapat diketahui besarnya persentase kewajiban pajak perusahaan yang sebenarnya terhadap laba akuntansi (komersial). Melalui ETR dapat diketahui perbandingan tarif pajak berdasarkan akuntansi

(komersial) dengan tarif pajak yang ditetapkan peraturan perpajakan. Oleh karena itu dengan cara menghitung menggunakan *effective tax rate* dapat ditentukan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar sebagai strategi yang sudah umum dilakukan oleh para pengusaha dalam menghemat beban sebagai kewajiban yang harus dibayarnya.

Memperkecil atau kecilnya perhitungan *effective tax rates* yang terjadi dalam suatu perusahaan dapat mengindikasikan adanya para pengusaha (wajib pajak) menghindari pajak Gupta (1997). Pemerintah harus tanggap terhadap adanya gejala yang sering dilakukan oleh para pengusaha untuk selalu mensiasati untuk meningkatkan efisiensi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tindakan yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut dapat merugikan karena mengurangi potensi penerimaan Negara. Untuk itu dalam rangka menghindari maraknya para pengusaha untuk menghindari pajak yang berpotensi berkurangnya penerimaan Negara dari pajak. Langkah kongkrit yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi para pengusaha yang termasuk kategori strategi dalam menghindari dari pajak yaitu dengan melakukan *transfer pricing*. Cara tersebut menurut Holzmann (2018b) sebagai bentuk transaksi yang dilakukan para pengusaha dengan penetapan harga tidak berdasarkan harga pasar. Berdasarkan hasil penelitiannya, Utama (2015) menambahkan bahwa transaksi yang mempunyai hubungan istimewa dapat merugikan juga untuk para pemegang saham minoritas.

Praktek *transfer pricing* menurut Maulana et al., (2018) adalah sebagai cara untuk menghindari pajak yang selama ini sering dilakukan oleh para wajib pajak. Hal tersebut dengan cara *transfer pricing* sering digunakan oleh para pengusaha untuk menggeser laba antar Negara dengan harapan agar pembayar pajak lebih efisien. Mencari tempat yang mempunyai tarif pajak yang kecil, lalu di Negara yang menerapkan pajak yang kecil tersebut dibuat labanya tinggi sebaliknya pada Negara yang menerapkan tarif pajaknya besar dibuat keuntungannya kecil bahkan dibuat rugi. Kondisi tersebut didukung oleh pendapatn Himmah & Sedianingsih (2018) yang berpendapat bahwa para pengusaha membuat perusahaan pada beberapa Negara yang disebut multinasional sering digunakan untuk berbuat perencanaan pajak sebagai usaha menghindari kewajiban pajak yang harus dibayar.

Praktek *transfer pricing* sering diterapkan oleh para pengusaha yang membuka perusahaan pada berbagai Negara yaitu cara mendirikan dalam bentuk cabang; anak perusahaan; badan usaha tetap yang disebut perusahaan multi nasional. Lebih lanjut, Huda et al., (2017) berpendapat bahwa konsekuensi adanya *transfer pricing* untuk Pemerintah dapat mengurangi penerimaan potensi pajak, pada saat bermunculan perusahaan multinasional yang terindikasi memilih Negara yang mempunyai tarif pajak paling rendah. Dalam upaya meredam maraknya transaksi *transfer pricing* yang dapat mengurangi penerimaan Negara.

Pemerintah melalui Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. 412/BL/2009 yang mengatur tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu. Berdasarkan peraturan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk membendung praktek apapun yang dilakukan oleh para wajib pajak dapat berpotensi merugikan keuangan Negara. Diharapkan dengan adanya *Advance Pricing Agreement* (APA) untuk memecahkan praktik *transfer pricing* yang dapat diterima oleh semua pihak baik fiskus maupun wajib pajak. Padahal APA juga sering digunakan oleh para wajib pajak karena efektif digunakan untuk mengantisipasi rumitnya pemeriksaan transaksi *transfer pricing*. Hal tersebut sependapat dengan Taylor & Richardson (2013) yang mengatakan

bahwa pemerintah harus mempunyai aturan mengenai mekanisme transaksi yang terindikasi melakukan menghindari pajak.

2.2. Hipotesis Penelitian

2.2.1. Pengaruh Transaksi Afiliasi Terhadap Penghindaran Pajak

Para pengusaha di dalam menjalankan usahanya selalu berpikir mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek termasuk beban pajak. Cara berpikir tersebut tentunya sesuai dengan tujuan didirikannya adalah untuk mendapatkan laba yang besar dan maksimal. Sebagai implementasi cara berpikir tersebut yaitu dengan memperbanyak transaksi yang masih dalam satu group perusahaan yang terafiliasi. Praktek transaksi dengan perusahaan yang terafiliasi dengan harapan dapat melakukan *transfer pricing* diantara sesama anggota *group* perusahaan dalam mengatur harga jual barang atau jasa.

Transaksi afiliasi ada hubungannya dengan teori agensi. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi agar diperoleh dividen yang besar. Di lain pihak pengelola perusahaan mengharapkan laba yang rendah agar membayar pajak juga kecil. Hal tersebut sependapat juga dengan Dyreng et al., (2008b) yang menyatakan bahwa konflik keagenan dapat diperluas adanya perbedaan kepentingan antar pemegang saham. Pemangku kepentingan mayoritas akan mencoba menyerap semua keuntungan perusahaan untuk meraup uang yang ada dalam perusahaan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, sebuah kegiatan yang dikenal dengan "*tunneling*". Kegiatan *tunneling* dilakukan terutama melalui hubungan bisnis diantara sesama perusahaan yang terafiliasi atau dalam *group* perusahaan yang sama. Tambunan et al., (2016) menyatakan bahwa *thin capitalization* yang dipraktekan oleh banyak perusahaan sangat berpotensi sebagai sarana melakukan *transfer pricing* yang akan mengurangi laba kena pajak.

Pada transaksi terafiliasi para pengusaha sering mempraktekan transaksi jual beli dalam penetapan harga yang biasanya tidak mencerminkan harga wajar karena harga ditetapkan untuk mendapatkan laba yang tinggi di negara yang menerapkan tarif pajakyang rendah dan laba yang rendah di negara yang mempunyai tarif pajak yang tinggi. Para pelaku bisnis tidak menerapkan kewajiban dan kelaziman atas barang yang dibeli ataupun yang dijual yang sesuai dengan harga pasar, melainkan lebih mengutamakan prinsip perencanaan pajak untuk pelaporan pajak.

Menurut Hanlon & Heitzman (2010), wajib pajak dapat menghindari pajak dengan cara mengatur transaksi dengan pihak terkait, seperti melalui skema *thin capitalization* atau skema *transfer pricing*. Huda et al., (2017) berpendapat terutama praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional ada upaya meminimalkan kinerja operasi dan mengoptimalkan cara menghindari pajak adalah lebih penting. Perusahaan yang tidak melakukan transaksi dengan *arm's length* dapat menyebabkan audit pajak atau investigasi oleh pihak berwenang (OECD, 2012). *Global Transfer Pricing Survey* oleh *Ernst and Young* pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 75% perusahaan mengindikasikan "manajemen risiko pajak" sebagai prioritas utama penetapan harga transfer mereka, naik dari hasil survey pada tahun 2013 yaitu 66 persen, dan pada tahun 2007 dan 2010 yang hanya sebesar 50 persen (G, 2008).

Maraknya praktek transaski antar sesama anggota *group* perusahaan multinasional di Indonesia sering menimbulkan rekayasa *transfer pricing*, hal tersebut terutama pada perusahaan yang berstatus penanaman modal asing (PMA) dan cabang perusahaan asing di

Indonesia yang berbentuk usaha tetap (BUT). Sebagian besar perusahaan tersebut bergerak di bidang industri manufaktur dan mempunyai kaitan internal yang cukup substansial dengan induk perusahaan atau afiliasinya di Negara lain. Menurut Gunadi (2007b) berdasarkan suatu studi di beberapa Negara yaitu: Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, dan beberapa Negara Eropa Lainnya serta Jepang hasilnya pada tahun 1970-an sekitar lebih dari 75% perdagangan internasional Negara-Negara tersebut dilakukan antar perusahaan yang tergabung dalam kelompok perusahaan multinasional.

Wise et al., (2003) berpendapat bahwa perusahaan di Kanada para pengusaha memilih bertransaksi bisnisnya dengan perusahaan dalam satu kelompoknya sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pajak dengan cara penetapan harga jual bukan dengan harga pasar. Gunadi (2007b) mengatakan pada umumnya perusahaan di Indonesia sering dimanfaatkan oleh perusahaan industri manufaktur untuk kelompok barang menengah (*intermediate goods*) juga bahan baku (*raw materials*) diantara kelompok mereka lalu hasil produksinya dijual lokal atau diekspor ke negara dunia ketiga yang masih dalam satu *group* usaha. Ini juga dapat berpotensi mengurangi penerimaan negara yang mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan uraian tersebut diatas dibentuk hipotesis bahwa:

H₁: Transaksi afiliasi mempengaruhi para emiten untuk menghindari pajak.

2.2 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang bersifat konglomerasi atau juga group perusahaan yang terdiri dari holding dan cabang. *Holding company* atau perusahaan induk dalam rangka perencanaan pajak dilakukan dengan cara menambah penghasilan dari bunga untuk perusahaan induk dan mengurangi laba kena pajak pada perusahaan anak. Perusahaan induk lebih suka meningkatkan pinjaman daripada menambahkan modalnya pada perusahaan anak. Melakukan kebijakan tersebut dengan maksud agar beban pajak di anak perusahaan membesar dan laba kena pajak mengecil.

Strategi yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut mendapat dukungan dari Harrington & Smith (2012) yang berpendapat bahwa pada umumnya untuk menghindari beban pajak memperbesar beban bunga agar laba kena pajak menjadi mengecil. Pendapat yang sama disampaikan oleh Khomsatun & Martani (2015) yang mengemukakan bahwa praktek perusahaan yang dinamakan *thinly capitalization* karena perusahaan sering memperbesar utang berbasis bunga lalu yang berakibat jumlah modal menjadi kecil. Praktek tersebut bertujuan jika perusahaan induk setor modal akan mendapatkan dividen ketika perusahaan anak memperoleh laba. Namun dividen ini tidak dapat mengurangi laba kena pajak pada perusahaan anak akibatnya membayar pajak tidak efisien.

Cara *treaty shopping* sebagai bentuk lain yang sering juga dilakukan oleh para wajib pajak untuk menghindari pajaknya melalui *treaty shopping* para wajib pajak memanfaatkan fasilitas *tax treaty* suatu Negara pada Negara lain oleh perusahaan yang tidak berhak dan *controlled foreign corporation/CFC* (menahan laba di Negara *tax haven* untuk menunda pemajakan di Negara domisili). Perusahaan juga sering menerapkan *Capital intensity ratio* yaitu perbandingan jumlah investasi dengan aktiva tetap. Perusahaan yang sengaja memperbesar *capital intensity ratio* yang besar pula agar beban depresiasi yang dapat mengurangi laba kena pajak juga besar, oleh karena itu sering dimanfaatkan oleh para wajib pajak dalam melaksanakan penghematan pajak karena beban depresiasi dapat mengurangi

laba sebelum pajak.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat peneliti Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias (2012) yang berpendapat bahwa investasi dalam bentuk aktiva tetap pada perusahaan berpotensi mengurangi kewajiban untuk membayar pajak karena adanya beban penyusutan aktiva tetap sebagai pengurang laba kena pajak. Selanjutnya, Hanlon & Heitzman (2010) mengungkapkan bahwa perusahaan dapat mendapatkan insentif pajak dengan memanfaatkan menghindari pajak selain dari utang, yaitu depresiasi, *investment tax credits*, dan *net operating loss carry forwards*. Oleh karena itu dengan meningkatkan komposisi investasi dalam aktiva tetap akan berdampak terhadap beban penyusutan aktiva tetap, sehingga *effective tax rate* yang dimiliki perusahaan akan semakin rendah yang menjadi indikasi melakukan penghematan pajak.

Ada beberapa hasil penelitian mengenai berbagai bentuk penghematan dalam pembayaran pajak oleh para wajib pajak, yaitu peneliti yang ditemukan oleh Gupta (1997) hasil temuannya mengatakan bahwa yang dapat mempengaruhi negatif terhadap *effective tax rate* adalah *capital intensity*; sedangkan yang berpengaruh negative adalah *inventory intensity*; dan *research and development intensity* tidak memberikan pengaruh terhadap *effective tax rates*. Temuan peneliti berikutnya adalah Richardson & Lanis (2007) menunjukkan hasil bahwa agresivitas pajak secara positif dipengaruhi oleh *capital intensity*. Penelitian lainnya oleh Sugiyarti (2017); dan Anindyka, Dimas, Pratomo, Dudi, Kurnia (2018); berpendapat bahwa perusahaan memperbesar aktiva tetap agar beban penyusutan besar dan akan mengurangi laba kena pajak.

Namun demikian tidak selamanya bahwa tingginya perusahaan berinvestasi pada aktiva tetap bertujuan mengurangi beban pajak. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Yuliana & Wahyudi (2018) berpendapat bahwa aktivitas perusahaan berinvestasi dalam aktiva tetap untuk operasional perusahaan sebagai bentuk untuk meningkatkan laba. Perusahaan berinvestasi pada aktiva tetap karena tuntutan aktivitas perusahaan yang meningkat yang dapat berimbas pada pencapaian laba yang meningkat juga. Hal senada juga disampaikan hasil penelitiannya Irianto, Sudibyo & Wafirli (2017) mengatakan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan tidak memberikan gambaran yang cukup untuk menyatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan efisiensi dalam pembayaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut masih ada silang pendapat mengenai *capital intensity* ini. Namun demikian ada indikasi bahwa besarnya investasi dalam bentuk aktiva tetap berpengaruh positif terhadap para pengusaha untuk menghindari pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas dibentuk hipotesis bahwa:

H₂: *Capital intensity* mempengaruhi para emiten untuk menghindari pajak.

3. METODOLOGI DAN ANALISA DATA

Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai November tahun 2018 analisis data pada emiten yang menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia khusus emiten sektor manufaktur. Penelitian dilakukan selama tiga periode pengamatan yang dimulai sejak tahun 2015 s/d 2017.

Alasan memilih para emiten tersebut yang dijadikan objek penelitian adalah dengan pertimbangan bahwa sektor manufaktur termasuk pembayar pajak paling besar. Disamping itu perusahaan manufaktur juga dapat mewakili perusahaan lain karena mempunyai

karakteristik proses bisnis yang lengkap dan ada indikasi cenderung lebih sering melakukan perencanaan pajak sebagai strategi untuk menghindari beban pajak. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Populasi para emiten sektor manufaktur yang menjual sahamnya di pasar bursa dalam hal ini adalah Bursa Efek Indonesia tahun 2015 s/d 2017. Adapun yang memenuhi syarat untuk diteliti 18 emiten selama 3 tahun menjadi 54 pengamatan. Penentuan sampel berdasarkan teknik pemilihan sampel dengan pertimbangan yang sesuai dengan kehendak peneliti. Kriteria sampel:

1. Para emiten selama periode penelitian
2. Para emiten selama tahun 2015 – 2017 yang publikasi melalui internet
3. Para emiten yang dikendalikan
4. Para emiten yang menyajikan laporan tahunan bukan dalam valas
5. Para emiten yang tidak memiliki kompensasi rugi fiskal
6. Para emiten yang memiliki data sesuai dengan kebutuhan penelitian
7. Para emiten yang tidak memiliki data ekstrim atau data outlier

Jumlah sampel yang terpilih disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Jumlah Sampel

No.	Uraian	n
1	Emiten 2015-2017	144
2	Emiten 2015-2017 yang tidak lengkap	(13)
3	Emiten tidak mempublikasikan 2015-2017 melalui internet	(4)
4	Emiten memiliki <i>net income</i> negatif	(59)
5	Emiten yang tidak dikendalikan	(20)
6	Emiten yang menggunakan valas	(23)
7	Emiten yang tidak diperlukan	(6)
8	Emiten memiliki data outlier	(1)
9	Jumlah	18
10	Tahun	3
11	Jumlah sampel dalam periode penelitian	54

Sumber: Hasil olahan Peneliti

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen adalah upaya menghindari pajak dinotasikan ETR.

Variabel:

$$ETR = \frac{\text{Beban PPh}}{\text{Laba sebelum kena pajak}}$$

Adapun variabel independen atau variabel bebas X_1 yaitu transaksi afiliasi, dikatakan transaksi afiliasi apabila terpenuhinya salah satu dari kriteria: 1) Kepemilikan atau penyertaan modal paling rendah 25%; 2) faktor penguasaan; Variabel transaksi afiliasi dilambangkan dengan UTA

$$UTA = \frac{\text{Total utang kepada afiliasi}}{\text{total utang perusahaan}}$$

Variabel independen atau variabel X_2 dilambangkan dengan CAPINT

$$CAPINT = \frac{\text{Total aset tetap bersih}}{\text{jumlah aset}}$$

Data dianalisis menggunakan persamaan regresi berganda yang sebelumnya diuji mengikuti persyaratan persamaan regresi berganda. Data sekunder berupa *pooled data* kombinasi *cross-sectional* yang saling melengkapi. Model matematis hubungan antar variabel adalah $ETR = \alpha + \beta_1 UTA + \beta_2 CAPINT + \varepsilon$

4. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

4.1. Statistik Deskriptif

Pada Tabel 2 disajikan analisis deskriptif

Tabel 2. Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics			
Description	ETR	UTA	CAPINT
Mean	0,244232	0,127348	0,410936
Median	0,252475	0,050990	0,423647
Maximum	0,459420	0,777021	0,783978
Minimum	0,024231	0,001621	0,148781
Std.Dev.	0,083703	0,156100	0,167751
Observations	54	54	54

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas Bertujuan mengetahui apakah error konstan atau tidak. Model regresi penelitian untuk menguji heterokedastisitas menggunakan uji Glejser dengan bantuan

software program EViews 8. Uji tersebut dalam rangka memperoleh probabilitas dari Obs*R-squared.

Tabel 3. Uji Glejser

Uji Glejser			
F-statistic	0,302715	Prob. F(2,51)	0,7401
Obs*R-squared	0,633522	Prob. Chi-Square(2)	0,7285
Scaled explained SS	0,844276	Prob. Chi-Square(2)	0,6556

Berdasarkan Tabel 3 Terlihat bahwa hasil probabilitas Obs*R-square (0,7285) > α (0.05). Dengan demikian bahwa hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.2. Multikolinearitas

Selanjutnya uji multikolinearitas untuk mendapatkan bukti bahwa antar variabel tidak memiliki hubungan atau antar variabel independen dalam model regresi panel.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0,001048	7,827506	NA
UTA	0,005597	1,678219	1,000606
CAPINT	0,004846	7,114652	1,000073

Berdasarkan hasil pengujian EViews 8 pada Tabel 4 ternyata memberikan bukti bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas, ditunjukkan karena nilai Centered VIF berada dibawah 10 untuk setiap variabel yang ada dalam penelitian ini.

4.2.3. Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi adalah:

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi				
Obs	dU	dW	4-dU	Kesimpulan
54	1,59829	2,137336	2,40171	Tidak terjadi autokorelasi

Berdasarkan Tabel 5 nilai dU diperoleh dari lampiran Tabel Durbin-Watson dengan tingkat kesalahan sebesar 5% dengan jumlah data 54 untuk jumlah variabel bebas (k) 2. Berdasarkan hasil pengujian diketahui jika nilai dW yang diperoleh untuk model tersebut berada diantara nilai dU dan 4-dU. Hasil tersebut menandakan model regresi yang digunakan sudah terbebas dari persoalan autokorelasi, oleh karena itu model tersebut memenuhi salah satu persyaratan menggunakan regresi.

4.3. Persamaan Regresi Berganda

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software EViews 8, diperoleh hasil pada Tabel 6 sebagai berikut

Tabel 6. Tabel Hasil Regresi Berganda

Variabel Independen	ETR		
	Coefficient	t-Statistics	Prob
C (Constant)	0,240952	6,487530	0,0000
UTA	-0,031527	-0,390001	0,0009
CAPINT	0,017752	0,221390	0,4257
R-squared			0,423369
Adjusted R-squared			0,101133
F-statistic			6,142178
Prob (F-statistic)			0,000008

Berdasarkan hasil pengolahan program EViews 8
 $ETR = 0,240952 - 0,031527UTA + 0,017752CAPINT$

Bahwa:

ETR = penghindaran pajak
 α = konstanta
 β = koefisien regresi
 UTA = transaksi afiliasi sebagai variabel independen
 CAPINT = *capital intensity* sebagai variabel independen

5. DISKUSI HASIL PENELITIAN

5.1. Pengaruh Transaksi Afiliasi Terhadap Para Emiten Untuk Menghindari Pajak

Hasil pengujian hipotesis bahwa nilai koefisien variabel transaksi afiliasi -0,031527 pada tingkat signifikansi 0,0009. Tingkat signifikansi yang dimiliki variabel transaksi afiliasi lebih kecil dari 0.05 mengindikasikan mempengaruhi secara signifikan antara transaksi afiliasi terhadap para emiten untuk menghindari pajak (ETR). Dengan demikian dapat diambil kaidah keputusannya agar dapat menerima H_1 dan menolak H_0 yang dengan demikian bahwa transaksi afiliasi atau UTA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap para emiten dalam menghindari pajak pada perusahaan yang diteliti untuk emiten manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Koefisien minus menunjukkan arah negatif artinya ada hubungan yang terbalik antara transaksi afiliasi dengan nilai *effective tax rates*. Jika para emiten di Bursa Indonesia semakin kecil nilai *effective tax rates* menunjukkan bahwa para emiten diindikasikan menghindari pajak. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Gupta & Newberry (1997b) yang menyatakan bahwa rendahnya *effective tax rates* yang terjadi pada perusahaan dapat mengindikasikan

adanya penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi para emiten melakukan transaksi dengan perusahaan yang terafiliasi akan memiliki nilai *effective tax rates* yang menandakan semakin tinggi pula para emiten untuk menghindari pajak.

Hasil kajian penulis ini sesuai pula dengan hasil penelitian Handayani & Arfan (2014) yang menyatakan bahwa transaksi afiliasi berpengaruh positif untuk menghindari pajak. Hal tersebut dikarenakan bahwa praktik transaksi afiliasi didorong oleh perusahaan di Indonesia pada umumnya dimiliki oleh pemegang saham yang terkonsentrasi. Kondisi ini bahkan bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi berlaku juga pada beberapa negara di Asia untuk perusahaan terbuka pemegang sahamnya terkonsentrasi. Dampak kurang baiknya bentuk struktur kepemilikan seperti ini berpotensi terjadinya kerugian pada pemegang saham yang jumlahnya lebih kecil (pemegang saham minoritas). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Utama (2015) yang menghasilkan temuannya bahwa praktik yang terjadi oleh pemegang saham mayoritas tersebut sering melakukan transaksi dengan perusahaan yang terafiliasi. Akibatnya transaksi yang terjadi diantara sesama group perusahaan dapat diatur dalam penetapan harga jual yang biasanya tidak menggunakan harga pasar.

Kondisi yang terjadi pada perusahaan dengan komposisi kepemilikan yang terpusat, biasanya pemegang saham dominan dapat menguasai dan mendominasi dan bahkan dapat mengambil alih kekayaan pemegang saham minoritas dengan berbagai cara. Sehingga para pemegang saham mayoritas dapat memperoleh uang tambahan dengan menjual aset, barang, atau layanan kepada perusahaan melalui transaksi afiliasi dengan harga di atas harga pasar; dapat memperoleh pinjaman dengan persyaratan yang sesuai dengan keinginan yang menguntungkan perusahaan; dapat mentransfer aset antar perusahaan yang berada di bawah kendalinya; dan lebih buruk lagi, dapat mencairkan kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan minoritas.

Hipotesis yang menyatakan bahwa transaksi afiliasi mempengaruhi para emiten dalam menghindari pajak secara statistik maupun secara keilmuan dalam bidang perpajakan terbukti. Dengan demikian bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan terbukti dapat diterima. Artinya semakin banyak para emiten melakukan praktik transaksi dengan perusahaan terafiliasi dalam kelompok group yang sama maka mengindikasikan bahwa semakin besar kemungkinan para emiten untuk menghindari kewajiban pajaknya. Hal tersebut terbukti yang ditunjukkan oleh adanya penurunan (semakin kecilnya) nilai *effective tax rates*. Keuntungan perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang terafiliasi adalah dapat mengatur harga jual sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh para wajib pajak. Namun dilihat dari aspek perpajakan konsekwensinya seluruh transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak ini dianggap tidak sah karena harga jual dan harga beli tidak wajar mengikuti harga pasar yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

5.2.2 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Para Emiten Untuk Menghindari Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai koefisien variabel transaksi afiliasi adalah 0,017752 pada tingkat signifikansi 0,4257. Tingkat signifikansi dengan variabel *capital intensity* dikarenakan lebih besar dari 0,05 dengan demikian kaidah keputusannya menolak H_2 dan menerima H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak mempengaruhi para emiten manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017 untuk menghindari pajak. Artinya semakin tinggi *capital intensity* belum tentu berdampak pada semakin tingginya para emiten menghindari pajak. Hasil kajian ini sesuai juga dengan pendapat para peneliti sebelumnya yaitu Lestari & Sugiharto (2007) berpendapat bahwa ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan hipotesis H_2 tidak didukung oleh peneliti sebelumnya. Puspita & Febrianti (2018) berpendapat bahwa besarnya aktiva tetap yang dimiliki perusahaan yang

mengakibatkan beban penyusutan juga menjadi besar tidak berpengaruh terhadap pengurangan pajak penghasilan perusahaan. Begitu juga hasil penelitian Putra & Merkusiwati (2016) yang berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki aktiva yang lebih dominan nilainya dibanding dengan aset lainnya ternyata tidak berindikasi melakukan menghindari pajak. Besarnya aktiva tetap dalam perusahaannya bertujuan untuk meningkatkan aktivitas operasi agar lebih optimal. Namun ada pula perusahaan lain memperbesar investasi pada aktiva tetap bertujuan mengefisienkan beban pajak. Ternyata berdasarkan kajian ini tidak selamanya perusahaan berinvestasi pada aktiva tetap dalam rangka menghindari pajak.

Ada beberapa alasan yang masuk akal dari hasil kajian ini. Kemungkinan pertama bahwa jumlah aktiva tetap yang dimiliki para emiten yang sahamnya dijual di Bursa Indonesia mempunyai nilai ekonomis yang besar namun umur ekonomisnya sudah melewati masa manfaat umur ekonomis menurut fiskal. Akibat dari kondisi tersebut aktiva tetap yang dimiliki para emiten sudah tidak ada lagi beban penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak. Terdapatnya perbedaan peraturan mengenai umur ekonomis antara Standar Akuntansi Keuangan dengan aturan perpajakan mengakibatkan koreksi fiskal yang bersifat sementara (perbedaan waktu). Sehingga akibat adanya perbedaan umur ekonomi menurut akuntansi (komersial) lebih panjang dari umur ekonomi menurut fiskal beban penyusutan menurut akuntansi (komersial) tidak dapat mengurangi laba kena pajak.

Kemungkinan yang kedua adalah besarnya aktiva tetap yang ada dalam perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi agar lebih optimal yang akan berdampak terhadap peningkatan laba perusahaan sebagai akibat adanya penambahan aktiva tetap. Tingginya aktiva tetap ini akan menunjang aktivitas operasional perusahaan sehingga lebih optimal dan laba perusahaan juga bertambah. Oleh karena itu sekalipun beban penyusutan tinggi akan tetapi karena diimbangi dengan pendapatan operasional perusahaan lebih tinggi. Sehingga ketika menghitung laba kena pajak akan diperoleh hasil bahwa penghasilan kena akan jauh akan jauh lebih tinggi yang pada gilirannya akan kas yang dikeluarkan perusahaan juga besar. Investasi dalam aktiva tetap yang tepat akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan melakukan efisiensi pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak dengan tidak mengganggu *cash flow* perusahaan. Oleh karena itu banyak cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi keinginan share holder (pemegang saham).

6. KETERBATASAN PENELITIAN, KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Keterbatasan Penelitian

- 1 Variabel transaksi afiliasi proksi yang digunakan hanya terbatas menggunakan nilai related party transaction (RPT) dalam hal utang pihak berelasi.
- 2 Nilai Adjusted R² dalam penelitian ini hanya 0,101133 atau 10,11% ada indikasi terdapat faktor lainnya diluar variabel yang diteliti yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak
- 3 Penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian
- 4 Jumlah sampel yang digunakan hanya 54 emiten

6.2 Kesimpulan

1. Transaksi afiliasi mempengaruhi para emiten pada industry manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017 dalam menghindari pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi para emiten melakukan transaksi dengan perusahaan terafiliasi maka akan semakin tinggi pula peluang para emiten untuk menghindari pajak. Karena harga transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi tidak

didasarkan pada harga pasar tetapi didasarkan kepada kepentingan perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya semakin rendah transaksi afiliasi menunjukkan bahwa semakin rendahnya penghindaran pajak

2. *Capital intensity* tidak mempengaruhi para emiten industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017 dalam menghindari pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi *capital intensity* belum tentu berdampak pada semakin tingginya penghindaran pajak. Begitu juga semakin rendah *capital intensity* belum tentu akan mengakibatkan para emiten semakin rendah untuk menghindari pajak. Kondisi ini tergantung kepada keberadaan aktiva tetap di perusahaan. Jika umur ekonomis menurut akuntansi (komersial) lebih panjang dibandingkan dengan umur ekonomi secara fiskal akan mengakibatkan beban penyusutan menurut komersial (akuntansi) tidak dapat mengurangi laba kena pajak. Begitu juga jika aktiva tetap digunakan dalam operasional perusahaan yang mengakibatkan pendapatan perusahaan jauh lebih besar dibandingkan beban penyusutan yang mengakibatkan laba kena pajak juga akan semakin besar pula.

6.2 Saran

1. Untuk Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap para pengusaha yang memiliki harga transfer diluar batas kewajaran atau *arms' length* dan memperketat regulasi yang berhubungan dengan transaksi afiliasi yang berpotensi melakukan penghindaran pajak
2. Untuk Perusahaan walaupun menghindari pajak yang selama ini dianggap wajar dalam praktek bisnis dan tidak menyalahi peraturan yang ada, namun perusahaan agar lebih bijak dalam melakukan penghindaran pajak dengan tidak terlalu merugikan negara, sehingga kredibilitas perusahaan dapat terjaga.
3. Peneliti selanjutnya agar ditambah jumlah sampel dengan cara menambah periode pengamatan; variabel dapat ditambah yang diduga dapat digunakan sebagai alat menghindari pajak.

Implikasi dari hasil penelitian ini kepada pemerintah agar membuat aturan yang jelas atau mereformasi undang-undang perpajakan khususnya mengenai transaksi afiliasi karena masih banyak para wajib pajak yang memanfaatkan celah kelemahan peraturan perpajakan yang ada selama ini. Apabila ini dibiarkan terus akan mengakibatkan potensi penerimaan negara menjadi hilang. Implikasi buat para wajib pajak khususnya pelaku bisnis adalah sampai saat ini masih punya kesempatan untuk memanfaatkan celah-celah perpajakan (tax loophole) dengan cara melakukan transaksi bisnis dalam satu group yang terafiliasi. Para pelaku bisnis dapat mengefisienkan pembayaran pajak selama tidak melanggar aturan yang ada dapat diperbolehkan.

REFERENSI

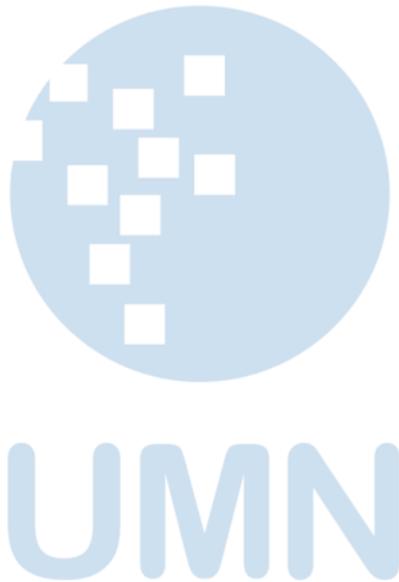
- Anindyka, Dimas, Pratomo, Dudi, Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage (Dar), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management* :, 5(1), 713–719.
- Cahyadi Putra, I., & Merkusiwati, N. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(1), 690–714.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008a). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008b). Long-Run Tax Avoidance Corporate. *The Accounting Review*.
- Faisal, A. (2016). Karakteristik Eksekutif, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Serta Dampak Terhadap Tax Avoidance. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Agency Problems and Residual Claims. *SSRN Electronic Journal*, XXVI(June), 327–349. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94032>
- Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). Do business characteristics determine an effective tax rate? *Chinese Economy*. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *Accounting Review*. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Freire-Serén, M. J., & Panadés i Martí, J. (2013). Tax Avoidance, Human Capital Accumulation and Economic Growth. *Economic Modelling*, 30(1), 22–29. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.08.021>
- G, Y. A. (2008). *Ernst & Young ' s Global Transfer Pricing Survey – Transfer Pricing Documentation and Controversy Risk Management Practices*. 1–2.
- Goh, B. W., Lee, J., Lim, C. Y., & Shevlin, T. (2016). The Effect of Corporate Tax Avoidance on The Cost of Equity. *Accounting Review*, 91(6), 1647–1670. <https://doi.org/10.2308/accr-51432>
- Gunadi. (2007a). *pajak internasional*. lembaga penerbit fe ui.
- Gunadi. (2007b). *Pajak Internasional* (Edition Reviton). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Gupta, S. (1997). A review of tax the variability in corporate effective tax rates evidence from longitudinal data. *Accounting and Public Policy*.
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997a). Determinants of the variability in corporate Cffective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(1), 1–34. [https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(96\)00055-5](https://doi.org/10.1016/S0278-4254(96)00055-5)
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997b). Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence From Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(1), 1–34. [https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(96\)00055-5](https://doi.org/10.1016/S0278-4254(96)00055-5)
- Handayani, D., & Arfan, T. (2014). Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. In *Journal of Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Harrington, C., & Smith, W. (2012). Tax avoidance and corporate capital structure. *Journal of Finance and Accountancy*, 11, 144–164.
- Himmah, E. F., & Sedianingsih. (2018). Determinant of Capital Structure on Multinationality Company in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 15(2), 1.

- <https://doi.org/10.19184/jauj.v15i2.7252>
- Holzmann, C. (2018a). Transfer Pricing as Tax Avoidance Under Different Legislative Schemes. *SSRN Electronic Journal*, July. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3164103>
- Holzmann, C. (2018b). Transfer Pricing as Tax Avoidance Under Different Legislative Schemes. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3164103>
- Huda, M. K., Nugraheni, N., & Kamarudin, K. (2017). The Problem of Transfer Pricing in Indonesia Taxation System. *International Journal of Economics and Financial Issues*.
- Hutagaol, J. (2006). *Kapita Selekta Perpajakan* (First Edition). Salemba Empat.
- Irianto, D. B. S., Sudibyo, Yudha Aryo & Abim, Wafirli. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*. <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(10), 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Khomsatun, S., & Martani, D. (2015). Pengaruh Thin Capitalization dan Assets Mix Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, 1–23.
- Lestari, M., & Sugiharto, T. (2007). Kinerja Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Proceeding PESAT*. <https://doi.org/10.3847/1538-3881/aab1f6>
- Maulana, M., Marwa, T., & Wahyudi, T. (2018). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables. *Modern Economics*, 11(1), 122–128. [https://doi.org/10.31521/modecon.v11\(2018\)-20](https://doi.org/10.31521/modecon.v11(2018)-20)
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Ross, S. (1973). Ross_1973_The economic theory of agency.pdf. In *Msnbc*.
- Sugiyarti, S. M. P. L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016)*, 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Tambunan, M. E., Siregar, H., Manurung, A. H., & Priyarsono, D. S. (2016). Determinan Intensitas Transaksi Afiliasi Pada Perusahaan-Perusahaan Dalam Group Bisnis di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 15(2), 121–138. <https://doi.org/10.12695/jmt.2016.15.2.2>
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2013.02.005>
- Utama, C. A. (2015). Penentu Besaran Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, Dan Struktur Kepemilikan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 37–54. <https://doi.org/10.21002/jaki.2015.03>
- Wise, K. A., Naish, J. P., Dunn, A. W., Alty, D. G., Carr, B. R., & Steeves, C. J. (2003).

Corporate Tax Planning. *Canadian Tax Journal*.

Yuliana, I. F., & Wahyudi, D. (2018). Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 105–120.

Zain, M. (2007). *Manajemen Pajak* (Third Edition). Salemba Empat.



KEBIJAKAN EDITORIAL DAN PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL ULTIMA MANAGEMENT DAN ULTIMA ACCOUNTING

Pedoman Penulisan Artikel

1. Naskah merupakan hasil penelitian atau kajian pustaka dan belum pernah dipublikasikan.
2. Jumlah halaman 15-25.
3. Nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademis dan diikuti dengan nama lembaga tempat kegiatan penelitian dilakukan.
4. Artikel menggunakan jenis huruf Times New Roman, ukuran font 12, dan spasi 1.
5. Ukuran kertas A4.

Sistematika penulisan meliputi:

1. Abstrak, ditulis dalam bahasa Inggris, tidak melebihi 200 kata. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel yang terdiri dari 3 paragraf, yaitu :
 - a. Paragraf 1 berisikan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dalam penelitian.
 - b. Paragraf 2 berisi metodologi penelitian yang digunakan dan unit analisis.
 - c. Paragraf 3 berisi hasil uji hipotesis. Abstrak diikuti dengan kata kunci (*keywords*) terdiri dari 3-5 kata.
2. Naskah disusun dengan sistematika:
 - a. Pendahuluan.
 - b. Tinjauan Literatur dan Hipotesis.
 - c. Metode Penelitian.
 - d. Hasil dan Pembahasan.
 - e. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran.
 - f. Referensi.
 - g. Lampiran.
3. Tabel dan Gambar (grafik).
 - a. Tabel dan gambar disajikan bersama dengan naskah, namun diperbolehkan disajikan terpisah dari naskah sebagai lampiran.
 - b. Tabel dan gambar diberi nomor urut dan judul lengkap serta disebutkan sumbernya jika merupakan kutipan.
4. Kutipan, dalam teks ditulis diantara tanda kurung, yang menyebutkan nama akhir penulis, tahun tanpa koma dan nomor halaman jika dipandang perlu.
 - a. Satu sumber kutipan dengan satu penulis, contoh: (Hartono, 2005); dua penulis, contoh: (Aris dan Hartono, 2006); lebih dari dua penulis, contoh: (Hartono et al., 2007); lebih dari dua sumber diacu bersamaan, contoh: (Ghozali, 2006; Sylvia, 2008); dua tulisan atau lebih oleh satu penulis, contoh: (Ghozali, 2006; 2008).
 - b. Kutipan disertai nomor halaman, contoh: (Sylvia 2008,102).
 - c. Pencantuman halaman karya yang diacu menggunakan tanda titik dua sebelum penomoran halaman, contoh: (Thomas, 2003:3).

- d. Jika pada referensi terdapat penulis dengan lebih dari satu artikel pada tahun penerbitan yang sama, maka pada kutipan gunakan huruf a, b... setelah tahun, contoh: (Kusuma, 2005a) atau (Kusuma, 2004b; Utama et al., 2005a).
 - e. Jika nama penulis disebutkan pada teks, maka nama tidak perlu disebutkan pada kutipan, contoh: Kusuma (2004) menyatakan
 - f. Sumber kutipan yang berasal dari pekerjaan suatu institusi sebaiknya menyebutkan akronim institusi yang bersangkutan misalnya: (IAPI 2008)
5. Referensi, yang dicantumkan dalam daftar referensi hanya yang benar-benar disebutkan dalam artikel. Sebaliknya, semua referensi yang telah dicantumkan dalam artikel harus dicatat dalam daftar referensi. Referensi disusun alfabetis sesuai dengan nama belakang penulis atau nama institusi.

Contoh:

Buku

Satu penulis

Hurt, R. L. (2008). *Accounting Information Systems*. New York: McGraw-Hill.

Dua penulis

Doupnik, T., & Perera, H. (2007). *International Accounting*. New York: McGraw-Hill.

Tiga penulis

Weygandt, J. J., Kieso, D. E., & Kimmel, P. D. (2008). *Accounting Principles*. Danvers: John Wiley & Sons.

Penulis Institusi

Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Divisi Penerbitan IAI.

Jurnal

Cohen, L. J., W, P., & David, J. S. (1996). *Measuring the Ethical Awareness and Ethical Orientation of Canadian Auditors*. *Behavioral Research in Accounting* , 98-199.

Website

Burgstahler, D., W.B. Elliott, and M. Hanlon. (2002). "How Firms Avoid Losses: Evidence of Use The Net Deferred Tax Asset Account".

Workshop/Seminar

Wainwright, S. P. (2000). *For Bordieu in Realist Social Science*. Cambridge Realist Workshop 10th Anniversary Reunion Conference.

Tesis/Disertasi

Millet, P. (2005). *Locus Of Control and Its Relation to Working Life: Studies from The Fields of Vocational Rehabilitation and Small Firm in Sweden*. Doctoral Thesis, Department of Human Work Science. Sweden: Lulea University of Technology Sweden.

6. Catatan Kaki, dipergunakan untuk memberi penjelasan/analisis tambahan yang jika dimasukkan dalam naskah akan mengganggu kontinuitas naskah. Catatan kaki tidak digunakan untuk acuan/ referensi. Catatan kaki diketik dua spasi dan diberi nomor urut dan dicetak superscript. Catatan kaki ditempatkan pada akhir artikel.
7. Penyerahan Artikel, yang dikirimkan ke jurnal Ultima Management memenuhi kriteria berikut:
 - a. Artikel yang sedang dipertimbangkan untuk dipublikasikan di jurnal lain atau di penerbit lain tidak dapat dikirim ke jurnal Ultima Management. Penulis harus membuat pernyataan bahwa artikel tidak dikirim atau dipublikasikan dimanapun.
 - b. Jika artikel menggunakan pendekatan survei atau eksperimen, maka instrument (kuesioner, kasus dll) disertakan.
 - c. Artikel dikirim ke:

Fakultas Bisnis

Universitas Multimedia Nusantara

Scientia Garden, Jl. Boulevard Gading Serpong, Tangerang

Telp (+6221) 5422 0808

Fax (+6221) 5422 0800

E-mail: ultimaaccounting@umn.ac.id or ultimamanagement@umn.ac.id



UMN

ISSN 2085-4595



9 772085 459509